

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PADAT KARYA
TUNAI DESA (PKTD) DALAM MENGURANGI
PENGANGGURAN DI DESA SISWO BANGUN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DITINJAU
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melegkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana (S1) dalam Ekonomi dan
Bisnis Islam

Oleh:

FITRIA MAULINA

NPM 1951010353

Program Studi: Ekonomi Syariah



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN

LAMPUNG

1444 H/2023 M

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PADAT KARYA TUNAI DESA (PKTD) DALAM MENGURANGI PENGANGGURAN DI DESA SISWO BANGUN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DITINJAU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Skripsi

Diajukan Untuk Melegkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana (S1) dalam Ekonomi dan
Bisnis Islam



Pembimbing I: Dr. Hj. Heni Noviarita S.E., M.Si

Pembimbing II: Dr. Muhammad Iqbal Fasa, M.E.i

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2023 M

ABSTRAK

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang penetapan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2018 diprioritaskan untuk membiayai Padat Karya Tunai Desa. Hal ini merupakan upaya pemerintah dalam memberikan pengendalian, pembinaan dan pengelolaan kegiatan Dana Desa bisa tepat sasaran sehingga bisa mencapai tujuan dari Program Padat Karya Tunai Desa. Maka rumusan masalah yaitu bagaimana implementasi kebijakan PKTD di Desa Siswo Bangun, bagaimana implementasi PKTD dalam mengurangi pengangguran dan bagaimana implementasi PKTD ditinjau dalam perspektif ekonomi islam.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam kajian ini adalah penelitian secara langsung atau disebut (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan pada masyarakat yang sebenarnya demi menemukan fakta-fakta yang ada pada masyarakat mengenai masalah-masalah yang terjadi. Dalam hal ini peneliti dalam mengumpulkan data yang valid, peneliti meneliti langsung dari lokasi penelitian yakni Desa Siswo Bangun Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa Implementasi Kebijakan Padat Karya Tunai Desa sudah diimplementasikan cukup baik dengan adanya komunikasi yang baik antar Pemerintah Desa dengan masyarakat mengenai program ini. Namun belum dapat menekan jumlah pengangguran yang ada di Desa Siswo Bangun dikarenakan lapangan pekerjaan yang tersedia sangat terbatas dan penyerapan tenaga kerja yang belum maksimal dibandingkan dengan jumlah pengangguran yang ada.

Kata Kunci: Implementasi, Padat Karya Tunai Desa, Pengangguran

ABSTRACT

With the stipulation of the Regulation of the Minister of Villages for Development of Disadvantaged Regions and transmigration Number 19 of 2017 concerning setting priorities for the use of Village Funds for 2018 to finance Village Cash Work Intensive. This is the government's effort to provide control, guidance and management of Village Fund activities so that they can achieve the objectives of the Village Cash Labor Intensive Program. Then the formulation of the problem is how to implement PKTD policies in Siswo Bangun Village, how to implement PKTD in reducing unemployment and how to implement PKTD viewed from an Islamic economic perspective.

This research method uses a descriptive qualitative approach with data collection methods through observation, interviews and documentation. The research used by the authors in this study is direct research or so-called (field research), namely research conducted in actual communities in order to find facts that exist in the community regarding the problems that occur. In this case, researchers in collecting valid data, researchers examined directly from the research location, namely Siswo Bangun Village, Seputih Banyak District, Central Lampung Regency.

The results of the study illustrate that the Implementation of the Village Cash Labor-Intensive Policy has been implemented quite well with good communication between the Village Government and the community regarding this program. However, it has not been able to suppress the number of unemployed in Siswo Bangun Village because the available jobs are very limited and employment absorption is not optimal compared to the number of unemployed.

Keywords: Implementation, Village Cash Labor Intensive, Unemployment



UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Kota Bandar Lampung 35131

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitria Maulina
NPM : 1951010353
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Implementasi Kebijakan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) Dalam Mengurangi Pengangguran Di Desa Siswo Bangun Ditinjau Dalam Prespektif Ekonomi Islam”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun salinan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Juni 2023



Fitria Maulina
NPM. 1951010353



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Padat Karya
Tunai Desa (PKTD) Dalam Mengurangi
Pengangguran Di Desa Siswo Bangun
Kabupaten Lampung Tengah Ditinjau
Dalam Perspektif Ekonomi Islam**

**Nama : Fitria Maulina
NPM : 1951010353
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam
Sidang Munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN
Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Hj. Heni Noviarita, S.E., M.Si
NIP.196511201992032002**

**Dr. Muhammad Iqbal Fasa, M.E.I
NIP. 199009182019031010**

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

**Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy
NIP.1982080820110120**



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **“Implementasi Kebijakan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) Dalam Mengurangi Pengangguran Di Desa Siswo Bangun Kabupaten Lampung Tengah Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam”** disusun oleh **Fitria Maulina NPM. 1951010353**, Program Studi **Ekonomi Syariah** telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas **Ekonomi dan Bisnis Islam** pada hari/tanggal: **Rabu/19 Juli 2023**.

TIM PENGUJI

Moderator : Dr. Asriani, S.H, M.H

Sekretaris : Erlin Kurniati, M.M.

Penguji I : Citra Etika, S.E., M.Si

Penguji II : Dr. Muhammad Iqbal Fasa, M.E.I



**Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

Prof. Dr. Julius Suryanto, S.E., M.M., Akt., C.A.

NIP.197009262008011008

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

(Q.S. An-nisa (4):58)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah. Rasa syukur saya ucapkan kepada Allah SWT karna atas rahmat dan Ridho-Nya yang telah memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta Bapak Rusnadi dan Ibu Ema Malini, sebagai tanda bakti dan rasa hormat dan rasa terima kasih kupersembahkan karya kecil ini kepada Ayah dan Ibu yang telah memberikan kasih sayang, motivasi, cinta kasih yang tiada terhingga, dan selalu mendoakanku serta menasihati agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan selalu mendukungku baik secara fisik ataupun materi. Terimakasih atas semua pengorbanan yang telah diberikan semoga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan yang lebih di dunia maupun di akhirat dan semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ayah dan Ibu bahagia.
2. Kakak dan adik ku tercinta umaiyah Amanda dewi, raysha aditya, Syakila Humairah dan Adipa Aska Maulana yang selalu membantu memberikan semangat dan mendukungku dalam proses penyelesaian skripsi ini.
3. Keluarga besar yang memberikan doa dan dukungannya serta hal positif lainnya yang diberikan agar penulis menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamater UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pengalaman yang sangat berharga serta memberikan ilmu pengetahuan dan ilmu agama dan yang telah mendidik ku menjadi lebih baik yang mampu berfikir untuk lebih maju.

RIWAYAT HIDUP

Penulis Bernama Fitria Maulina merupakan anak kedua dari tiga bersaudara yang dilahirkan di Gunung Betuah, tanggal 21 desember 2000. Fitria Maulina merupakan anak dari pasangan Bapak Rusnadi dan Ibu Ema Malini. Riwayat pendidikan yang ditempuh oleh Fitria Maulina dengan saat ini dimulai sejak ia bersekolah di TK Nurul Huda Pada Tahun 2006-2007. Kemudian dilanjutkan Sekolah Dasar Negeri 01 Karang Agung Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat dan selesai pada tahun 2013, Madrasah Tsanawiyah Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat dan selesai pada tahun 2016, Madrasah Aliyah Negeri 01 Kabupaten Lampung Tengah dan selesai pada tahun 2019. Kemudian masuk Perguruan Tinggi Negeri Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2019 hingga sekarang pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam prodi Ekonomi Syariah.



Bandar Lampung, 6 Juli 2023

Fitria Maulina
1951010353

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga sampai saat ini penulis diberikan nikmat karunia, hidayah dan rahmat-Nya dalam menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) Dalam Mengurangi Pengangguran Di Desa Siswo Bangun Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam”.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program pendidikan Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam (UIN) Raden Intan Lampung dalam program studi Ekonomi Syariah. Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, serta tidak mengurangi banyak terimakasih atas bantuan semua pihak, hanya secara khusus penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Tulus Suyanto, M.M, Akt, C.A., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap masalah – masalah akademik mahasiswa.
2. Ibu Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy., selaku Ketua Jurusan prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang membimbing kami selama masa study S1 di jurusan Ekonomi Syariah dengan baik dan lancar.
3. Ibu Dr. Hj. Heni Noviarita, S.E. M.Si. selaku pembimbing I yang senantiasa sabar dan yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi selama dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Muhammad Iqbal Fasa, M.E.i selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi kepada penulis sehingga penulis skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Kepada Bapak dan Ibu dosen, para staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Rdaen Intan

Lampung yang dengan penuh pengabdian telah memberikan ilmu pengetahuan pada penulis selama di bangku kuliah.

6. Petugas perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membantu memberikan informasi data referensi, pelayanan dan lainnya untuk mempermudah penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Masadi selaku Kepala Desa di Desa Siswo Bangun Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah beserta jajaran yang telah memberikan dukungan dan telah memberikan banyak informasi terait dengan kebijakan Padat Karya Tunai Desa di Desa Siswo Bangun serta memberikan izin atas lokasi yang memang dapat dijadikan bahan penelitian.
8. Bapak Fatkhur Rahim S.pd. selaku sekretaris Desa Siswo Bangun Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah yang telah meluangkan waktu dan memberikan banyak motivasi serta informasi kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
9. Kepada kedua orang tuaku Bapak Rusnadi dan Ibu Ema Malini. Terimakasih atas doa dan dukungannya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Terimakasih untuk keluarga besarku, kakek dan nenek, paman dan bibi serta sepupu-sepupuku yang selalu memberikan semangat kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. kepada sahabat-sahabat tercinta Livia Febriyani, Fanisa Amalia Zulfara, Hani Lathifah dan Dwi Yunita Sari saya ucapkan terimakasih atas segala waktu, tenaga, fikiran serta dukungan selama kurang lebih 4 tahun bersama di masa perkuliahan ini.
12. Partner Seperjuangan Johansyah yang telah memeberikan dukungan, semangat serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. seluruh teman-teman seperjuangan, satu jurusan dan satu almamater, terkhusus teman-teman ku di Ekonomi Syariah kelas E angkatan 2019, terimakasih atas kebersamaan yang ada selama ini, terimakasih karena telah saling menguatkan dalam proses perkuliahan yang penuh dengan suka cita ini.

14. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga kita semua senantiasa terikat dalam ukhuwah islamiyah.
15. Penulis menyadari bahwa hasil karya penelitian ini jauh dari kata sempurna. Akhir kata jika penulis ada kesalahan dan kelalaian dalam penulisan skripsi ini, penulis mohon maaf dan kepada Allah SWT mohon ampun dari perlindungan-Nya. Semoga karya penulis dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 6 juli 2023



Fitria Maulina
1951010353

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR BAGAN.....	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian	12
E. Rumusan Masalah	13
F. Tujuan Penelitian.....	13
G. Manfaat Penelitian.....	13
H. Kajian Penelitian Terdahulu	14
I. Metode Penelitian.....	18
J. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II LANDASAN TEORI.....	27
A. Implementasi Kebijakan	27
1. Pengertian Implementasi Kebijakan.....	27
B. Padat Karya Tunai Desa	38
1. Pengertian Padat Karya Tunai Desa.....	38
2. Sasaran dan Prinsip Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa.....	41
3. Prinsip Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa	42
4. Tujuan Padat Karya Tunai Desa.....	44
5. Manfaat dan Dampak Padat Karya Tunai Desa.....	46
C. Pengangguran	47

1. Pengertian Pengangguran.....	47
2. Jenis-jenis Pengangguran.....	49
3. Penyebab Pengangguran di Indonesia.....	52
D. Ekonomi Islam	54
1. Pengertian Ekonomi Islam.....	54
2. Tujuan Ekonomi Islam.....	58
3. Nilai-nilai Dasar Ekonomi Islam.....	62
E. Pengangguran Dalam Perspektif Ekonomi Islam	71
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	73
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	73
1. Sejarah Singkat Desa.....	73
2. Kondisi Geografis	73
3. Kondisi Perekonomian.....	74
4. Kondisi Sosial Budaya	78
5. Kondisi Sarana dan Prasarana	78
6. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Siswo Bangun .	80
7. Visi dan Misi Desa Siswo Bangun	81
B. Penyajian Data dan Fakta Penelitian	91
BAB IV ANAISIS DATA.....	109
A. Analisis Implementasi Kebijakan Padat Karya Tunai Desa 11(PKTD) Dalam Mengurangi Pengangguran di Desa Siswo Bangun Kecamatan Seputih Banya Kabupaten Lampung Tengah.....	109
B. Analisis Implementasi Kebijakan Padat Karya Tunai desa (PKTD) Dalam Mengurangi Pengangguran di Desa Siswo Bangun Dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	118
BAB V PENUTUP.....	129
A. Kesimpulan	129
B. Rekomendasi.....	130

DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel

1. Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Lampung (TPT) tahun 2019-2021	6
2. Informan Penelitian	21
3. Jumlah Penduduk di Desa Siswo Bangun	74
4. Tingkat Pendidikan	76
5. Pendidikan Formal	77
6. Prasarana Kesehatan	78
7. Tenaga Kesehatan	78
8. Sarana Prasarana Ibadah Desa Siswo Bangun.....	79
9. Karakteristik Informan Menurut Jabatan/Pekerjaan.....	92
10. Karakteristik Informan Menurut Usia	92
11. Karakteristik Informan Menurut Pendidikan Terakhir	93



DAFTAR BAGAN

1. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Siswo Bangun 80



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum peneliti membahas lebih lanjut tentang skripsi ini maka peneliti akan menjelaskan pengertian judul terlebih dahulu. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca. Maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini. penelitian yang akan dilakukan ini adalah berjudul: **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PADAT KARYA TUNAI DESA (PKTD) DALAM MENGURANGI PENGANGGURAN DI DESA SISWO BANGUN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM.**

Uraian sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.¹

2. Padat Karya Tunai Desa (PKTD)

Padat Karya Tunai Desa yaitu sebuah program dari pemerintah yang meliputi kegiatan dalam rangka memberdayakan masyarakat yang ada di tingkat desa, terkhusus bagi mereka yang tidak mempunyai pekerjaan atau pengangguran yang juga melibatkan masyarakat miskin, partisipatif dalam arti kegiatan ini dari masyarakat, oleh dan

¹ Nursalim, "Implementasi Kebijakan Tentang Pemungutan Retribusi Pasar Oleh Unit Pelaksana Teknis Pasar Cikatomas Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017," *Studi Administrasi Publik*, 2017, 117–26.

untuk masyarakat dengan semangat gotong royong yang ditentukan dalam musyawarah desa.²

3. Pengangguran

Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja tertentu dan ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum memperolehnya.³

4. Perspektif Ekonomi Islam

Berasal dari bahasa Italia "prospettive" yaitu gambar atau pandangan. Perspektif dapat dikatakan suatu cara pandangan tertentu digunakan dalam melihat suatu fenomena. Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda dan lain-lain pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan dimensi atau juga disebut sebagai cara pandang. Sedangkan Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai fahlah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Qur'an dan hadits.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

Alasan memilih judul ini adalah karena masih adanya hambatan dalam penerapan kebijakan Padat Karya Tunai Desa di Desa Siso Bangun dan masih ada beberapa instrumentasi dari pengimplementasian yang belum diterapkan. Dengan ini peneliti ingin mengungkapkan secara real apakah dengan adanya kebijakan Padat Karya Tunai Desa ini dapat memberikan dampak terhadap berkurangnya jumlah pengangguran yang ada di Desa Siswo Bangun.

2. Alasan Subjektif

- a. Peneliti merasa optimis, dapat menyelesaikan penelitian ini dengan tersedianya data dan literature dan dengan

² M. Nurjihadi, "Strategi Pengembangan Program Padat Karya Tunai Desa (Pktd) Dengan Pendekatan Analisis Swot Di Desa Stowe Brang Kecamatan Utan," *Jurnal Tambora* 4, no. 2A (2020): 26–32.

³ Moh. Subhan, "Pengangguran Dan Tawaran Solutif Dalam Perspektif Islam," *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 3, no. 1 (2018): 22–33.

target dan biaya yang telah direncanakan dan hasilnya sangat bermanfaat bagi pengembangan kemampuan penulis ilmiah bagi peneliti.

- b. Masalah yang peneliti bahas dalam skripsi ini relevan dengan disiplin ilmu yang peneliti tekuni di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

C. Latar Belakang Masalah

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang wilayah pedesaan, maka wilayah desa mempunyai kedudukan untuk menguasai dan mengurus kepentingan daerah sekitarnya dan ikut serta dalam memahami kebebasan berkeyakinan dalam pandangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan ini mengingat tenaga ahli di bidang penataan pedesaan, pelaksanaan pembangunan pedesaan, pengembangan wilayah pedesaan, dan penguatan wilayah pedesaan. Selama ini banyak pihak yang merasa bahwa berbagai program Pemerintah dalam menangani kemelaratan tidak terlalu banyak berbobot dan mubazir, mengingat proyek-proyek yang ditawarkan membuat masyarakat Indonesia kurang sejahtera dari keadaan berkekurangan, padahal yang diharapkan secara umum, itu membuat individu semakin kuat secara finansial. Hal ini dapat terjadi, karena bantuan yang diberikan oleh otoritas publik kepada daerah membuat daerah sangat bergantung pada otoritas publik, seperti Bantuan Uang Langsung (BLT). Memasuki tahun keempat menjalankan penataan wilayah pedesaan, perekonomian, dan kebutuhan masyarakat masih sangat tinggi.⁴

Desa memiliki kekuatan hukum dalam menjalankan pemerintahannya di bawah kepala desa serat perangkat desa lainnya yang juga diawasi oleh BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Hal itu tercantum dalam berbagai aturan serta pengertian desa menurut UU No 6 Tahun 2014 tersebut yang harus dipahami oleh warga negara Indonesia. Dalam pengertian

⁴ H Moh, "Pemberdayaan Pendidikan Islam," 2013.

desa menurut UU No 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa faktor dapat mempengaruhi kinerja aparatur di antaranya adalah disiplin kerja dan lingkungan kerja fisik.⁵

Banyaknya permasalahan perekonomian yang ada di Indonesia menyebabkan negara ini menjadi negara yang kurang pesat dalam membangun pertumbuhan ekonomi dikarenakan masih banyaknya penduduk Indonesia yang mengalami kemiskinan, pendidikan yang rendah, pengangguran terbuka, dikarenakan pengangguran yang ada di Indonesia setiap tahun meningkat yang di sebabkan pula karena banyaknya penduduk yang belum memiliki pekerjaan sedangkan lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah belum seimbang dengan yang melamar pekerjaan.⁶

Saat ini permasalahan ekonomi di Indonesia seperti kemiskinan, pengangguran dan pemerataan pembangunan masih menjadi salah satu masalah yang perlu di selesaikan di negeri ini. permasalahan tersebut terjadi di berbagai penjuror daerah baik kota maupun desa. Saat ini desa masih sangat melekat dengan permasalahan sosial seperti kemiskinan, pengangguran dan kesejahteraan sosial yang rendah.⁷

⁵ Maria Modesta et al., “Pengaruh Disiplin Kerja Dan Lingkungan Kerja Fisik Terhadap Kinerja Aparatur Pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Magepanda (Desa Kolisia , Desa Magepanda Dan Desa Reroroja)” 7 (2023): 4392–99.

⁶ Aisyah Sisnita and Nano Prawoto, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Di Provinsi Lampung (Periode 2009-2015),” *Journal of Economics Research and Social Sciences* 1 (2017): 1–7.

⁷ Astuti Sri Pawening and Puji Lestari, “Implementasi Padat Karya Tunai(Astuti Sri Pawening Dan Puji Lestari) Implementasi Program Padat Karya Tunai Dalam Mengurangi Pengangguran Di Desa Wonoenggal, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo *Implementation Cash For Work In Reducing Unemployment In*,” 2020, 2–14.

Para pakar ekonomi sepakat bahwa masalah pengangguran merupakan masalah yang sangat serius dan menjadi masalah yang paling berat dalam perekonomian karena langsung memengaruhi kehidupan manusia baik secara fisik maupun mental. Menganggur ataupun kehilangan pekerjaan bagi semua orang merupakan hal yang sangat ditakuti karena dapat menjadi sebab utama penurunan kualitas hidup karena tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari berupa sandang, pangan, papan ataupun yang lainnya serta akan menjadi beban secara psikologis.⁸

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, kesenjangan antar wilayah masih menjadi isu strategis utama dalam pembangunan kewilayahan yang salah satunya ditandai oleh ketimpangan pendapatan antara penduduk pedesaan dengan penduduk perkotaan. Oleh karena itu didalam RPJMN 2020-2024 terdapat 7 agenda pembangunan yang salah satunya diarahkan dalam pengurangan kesenjangan dan menjamin pemerataan dalam upaya pengembangan wilayah. Kesenjangan tersebut juga ditunjukkan melalui tingginya angka kemiskinan di pedesaan.⁹

Masalah pengangguran dan ketenagakerjaan sampai saat ini masih menjadi perhatian utama disetiap negara di dunia khususnya dinegara yang sedang berkembang. Kedua masalah tersebut merupakan satu kesatuan yang keduanya menciptakan dualisme permasalahan yang saling bertentangan antar satu dengan yang lainnya. Dualisme tersebut terjadi jika pemerintah tidak mampu dalam memanfaatkan dan meminimalkan dampak yang diakibatkan dari dua persalahan tersebut dengan baik. Namun jika pemerintah mampu memanfaatkan kelebihan tenaga kerja yang ada maka dualisme permasalahan tidak akan terjadi bahkan memberikan dampak yang positif dalam percepatan

⁸ Globalisasi Ekonomi et al., “Studi Kasus Indonesia Menciptakan Atau Malah Menghilangkannya Studi Mengenai Dampak Globalisasi Ekonomi Dan Peneliti Karena Hasil Yang Berbeda-Beda . Beberapa Makalah Penelitian Menemukan Bahwa Keterbukaan Perdagangan Dapat Menurunkan Tingkat Penganggur” 10, no. 3 (2021): 263–78.

⁹ Muhammad Yusril Amar Setiawan and Suci Megawati, “Evaluasi Kebijakan Padat Karya Tunai Di Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo,” *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 10, no. 2 (2022): 665–80.

pembangunan. Demikian sebaliknya jika pemerintah tidak mampu memanfaatkan maka akan menciptakan dampak negatif yaitu mengganggu pertumbuhan ekonomi.¹⁰

Dalam hal ini pemanfaatan tenaga kerja secara maksimal wajib dilakukan oleh pemerintah, jika pemerintah ingin survive dalam pembangunan, jika tidak perlahan tapi pasti bertambahnya jumlah angkatan kerja yang tidak terserap (pengangguran) akan menjadi beban dan penghambat dalam dalam perekonomian dan pada akhirnya menjadi masalah. Selain menjadi beban dan penghambat dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara, pengangguran juga digunakan menjadi salah satu indikator dari pasar tenaga kerja yang ada. Rendahnya pengangguran sering dianggap menjadi suatu prestasi dalam suatu negara demikian juga sebaliknya.¹¹

Tabel 1.1
Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Lampung
(TPT Tahun 2019-2021)

Wilayah	2019	2020	2021
Lampung Barat	1.66	2.13	2.83
Tanggamus	2.96	2.96	2.93
Lampung Selatan	4.68	5.19	5.27
Lampung Timur	2.87	2.64	3.05
Lampung Tengah	2.61	4.22	4.31
Lampung Utara	5.11	5.34	6.14
Way Kanan	3.59	3.56	3.36
Tulang Bawang	4.01	4.84	4.10
Pesawaran	4.41	4.64	4.19
Pringsewu	4.92	5.77	4.85

¹⁰ Ryan David Sinaulan, "Masalah Ketenagakerjaan Di Indonesia," *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Budaya* 5, no. 1 (2019): 55.

¹¹ Suhandi, Hendra Wijayanto, and Samsul Olde, "Dinamika Permasalahan Ketenagakerjaan dan Pengangguran di Indonesia," *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika* 13, no. 1 (2020): 85–94.

Mesuji	3.61	3.71	3.42
Tulang Bawang Barat	3.57	3.46	3.35
Pesisir Barat	3.25	3.41	3.08
Bandar Lampung	7.15	8.79	8.85
Metro	5.12	5.40	5.00
Provinsi Lampung	4.03	4.67	4.96

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

Dari data BPS (2021) untuk provinsi Lampung jumlah pengangguran pada tahun 2019 sebesar 4,03% sedangkan pada tahun 2020 sebesar 4,67% dan pada tahun 2021 sebesar 4,96%. Dilihat dari jumlah pengangguran di provinsi Lampung yang selalu meningkat setiap tahunnya itu menunjukkan bahwa pengangguran di daerah provinsi Lampung masih menjadi masalah yang cukup serius untuk ditangani oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah. Dari data di atas dapat dilihat bahwa tingkat jumlah pengangguran di Kabupaten Lampung Tengah masih cukup tinggi oleh karena itu pemerintah menerapkan kebijakan padat karya tunai desa, di Kabupaten Lampung Tengah terdapat 301 desa dan desa Siswo Bangun merupakan salah satu desa yang menerapkan kebijakan padat karya tunai desa.¹²

Pada dasarnya padat karya bukanlah istilah baru di bangsa Indonesia. Bahkan sejarah mencatat padat karya merupakan salah satu pilar yang menyukseskan pembangunan Indonesia pada masa sebelumnya khususnya dalam program swasembada pangan. Saat ini pun, padat karya masih dilaksanakan pada berbagai program pemerintah dalam bentuk pemberdayaan masyarakat yang banyak menghasilkan infrastruktur kebutuhan dasar bagi masyarakat, khususnya di perdesaan. Kesuksesan ini pula yang menjadi daya pikatnya sehingga Pemerintah Indonesia menggiatkan dan

¹² B Kode Dan et al., "Nama Provinsi / Kabupaten / Kota Nama / Jumlah Nama Provinsi / Kabupaten / Kota Nama/ Jumlah," no. 33 (2007): 1–120.

mencanangkan kembali padat karya pada program pembangunan nasional di tahun 2018 dengan nama Padat Karya Tunai.¹³

Peraturan teknis yang mendasari program PKTD ini adalah surat keputusan bersama atau SKB 4 menteri tentang penyalarsan dan penguatan kebijakan percepatan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014. Peraturan tersebut kemudian diturunkan dalam bentuk pedoman umum pelaksanaan PKTD dan penggunaan dana desa tahun 2018 untuk padat karya tunai, sedangkan ketentuan pelaksanaan penggunaan dana desa untuk PKTD mengacu pada Permendes tentang prioritas penggunaan dana desa yang setiap tahun berubah. PKTD ialah suatu program bantuan yang dikemas dalam suatu bentuk pemberdayaan bagi masyarakat dengan balita gizi buruk penganggur dan miskin secara swakelola melalui pemanfaatan tenaga kerja, teknologi dan sumber daya alam local dalam rangka mengurangi kemiskinan, menurunkan angka stunting dan meningkatkan pendapatan. Program PKTD ini sering disebut bantuan yang bermartabat karena bantuan yang diberikan tidak asal, masyarakat perlu bekerja terlebih dahulu untuk mendapatkan haknya.¹⁴

Kementerian perencanaan pembangunan nasional melakukan penetapan lokasi percontohan pelaksanaan padat karya tunai di desa pada 1.000 desa di 100 kabupaten/kota dengan mempertimbangkan kondisi stunting tinggi, tingkat pengangguran tinggi, tingkat kemiskinan tinggi dan kondisi infrastruktur dasar yang masih buruk.¹⁵

Program PKT Dana Desa bertujuan untuk penciptaan lapangan kerja melalui kegiatan pembangunan secara swakelola dan padat karya tunai, memupuk rasa kebersamaan, gotong royong dan partisipasi masyarakat Desa, meningkatkan kualitas

¹³ Oleh Roni et al., "Padat Karya Sebagai Kontribusi Kehidupan Masyarakat Pada Penggunaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Kaneyan Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan)," *Holistik* 12, no. 2 (2019): 1–21.

¹⁴ Setiawan and Megawati, "Evaluasi Kebijakan Padat Karya Tunai Di Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo."

¹⁵ SKB 4 (empat) Kementerian, "Surat Keputusan Bersama 4 Kementerian Nomor 140-8696/2017 Tentang Penyalarsan Dan Penguatan Percepatan UU 6 2014," 2017.

dan kuantitas pemberdayaan masyarakat Desa, mewujudkan peningkatan akses masyarakat miskin, perempuan, anak, dan kelompok marginal kepada pelayanan dasar, dengan berbasis pendekatan pemberdayaan masyarakat, menekan jumlah penganggur, setengah penganggur dan masyarakat miskin, dan membangkitkan kegiatan sosial dan ekonomi di Desa. Sasaran program PKT Dana Desa berdasarkan Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Kementerian PPN/Bappenas adalah 1) Penganggur, yaitu penduduk yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, 2) Setengah Penganggur, yaitu Penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal (<35 jam seminggu) dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan, 3) Penduduk miskin, yaitu penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan, dan 4) Stunting, yaitu penduduk yang memiliki balita bermasalah gizi.¹⁶

Program PKTD adalah salah satu program prioritas Dana Desa di Tahun 2020-2021. Pengerjaan PKTD tahun ini meliputi Pembangunan Sarana Olah Raga, Rumah Ibadah, rehabilitasi penanaman magrov. Program ini menjadi solusi di tengah pandemi untuk meningkatkan pendapatan warga desa, disamping manfaat pembangunan skala prioritas tetap berjalan, pendapatan warga desa pun mulai berangsur pulih, sehingga semua dapat terbantu dengan ada program ini.¹⁷

Pengembangan Padat karya sangat tepat karena di Indonesia banyak melimpahnya sumber daya manusia yang tidak berketerampilan. Salah satu bentuk dari pekerjaan Padat Karya adalah pekerjaan konstruksi perbaikan jalan, saluran, dan sebagainya sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Dengan adanya program padat karya tunai yang terkawal efektif, diharapkan padat karya tunai ini dapat menjadi solusi untuk

¹⁶ Dana Desa et al., "Implementasi Padat Karya Tunai," 2020, 25–35.

¹⁷ Sarfan Tabo et al., "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Padat," no. 140 (2022): 73–80.

menekan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan. Artinya dengan program padat karya tunai masyarakat secara langsung dapat menerima uang tunai yang dimaksud dari hasil kerja yang mereka kerjakan.¹⁸

Islam merupakan agama yang syumul yang mengandung peraturan hidup yang sangat lengkap dan menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan, aspek ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya. Kemajuan dan pembangunan dalam ekonomi juga merupakan satu seruan dalam islam ke atas semua umatnya supaya berusaha untuk mencapainya agar Negara mencapai kemakmuran dan kesejahteraan.

Berdialog tentang ekonomi berarti berdialog tentang taraf hidup serta kesejahteraan manusia. Manusia secara kodratnya diciptakan dengan bermacam tuntutan serta kebutuhan kehidupan. Islam tidak Cuma memerintahkan umatnya untk bekerja serta memproduksi guna menghasilkan perekonomian yang lebih baik. Adapun Allah SWT berfirman dalam surat Al Jumuah Atar 10 yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَأذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahan Kemenag 2019

10. Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. (Q.S. Al- Jumu'ah [62]:10)

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karenanya ia merupakan bagian tak terpisahkan (integral) dari agama Islam. Sebagai derivasi dari agama Islam, ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya. Islam adalah sistem kehidupan (way of life), di mana Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Beberapa aturan ini bersifat pasti dan berlaku permanen, sementara beberapa yang bersifat

¹⁸ Roni et al., “Padat Karya Sebagai Kontribusi Kehidupan Masyarakat Pada Penggunaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Kaneyan Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan)2019.”

kontekstual sesuai dengan situasi dan kondisi. Penggunaan agama sebagai dasar ilmu pengetahuan telah menimbulkan diskusi panjang di kalangan ilmuwan, meskipun sejarah telah membuktikan bahwa hal ini adalah sebuah keniscayaan.

Ekonomi islam merupakan salah satu pendekatan sistem ekonomi dalam pembentukan perekonomian masyarakat. Pengakuan akan hak individu dan masyarakat sangat diperhatikan dalam islam. Masyarakat akan menjadi faktor yang dominan dan penting dalam pembentukan individu, sehingga karakter individu dipengaruhi oleh karakter masyarakat. Sehingga keterlibatan individu dan masyarakat sangat diperlukan dalam membentuk peradaban yang maju, yang didalamnya terdapat faktor ekonomi itu sendiri.¹⁹

Tujuan akhir Ekonomi Islam semacam tujuan hukum Islam itu sendiri, ialah menggapai kebahagiaan di dunia serta di akhirat lewat kehidupan yang baik serta terhormat. Terwujudnya kesejahteraan yang hakiki untuk manusia ialah bawah sekalian tujuan utama syariat Islam bagi AsSyatibi, tujuan utama hukum Islam merupakan tercapainya kesejahteraan manusia yang terletak pada proteksi 5 mashlahah, ialah: keimanan, ilmu., kehidupan, harta barang serta kelangsungan generasi. Bila salah satu dari kelima kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, hingga kesejahteraan yang sebetulnya tidak hendak tercapai.

Desa siswo bangun merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah yang juga berbatasan dengan kabupaten Lampung Timur. Kondisi sosial ekonomi masyarakat di Desa Siswo Bangun Kabupaten Lampung Tengah ini sangat bervariasi mulai dari pedagang samapai pertanian dan juga ada peternakan. Namun sebagian besar masyarakat Desa Siswo Bangun bekerja sebagai petani yang umumnya yakni sebagai petani singkong.

Kebijakan Padat Karya Tunai Desa ini dilaksanakan di Desa Siswo Bangun mulai pada tahun 2020 yang mana pada saat itu

¹⁹ Muhammad Wildan and Muhammad Wildan, "Sistem Ekonomi Islam Simbol Kesejahteraan Masyarakat," *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2018): 49–64.

sedang mengalami masa pandemic Covid19. Mengingat Kebijakan Padat Karya Tunai Desa ini merupakan program yang belum lama diadakan oleh pemerintah tentu saja masih terdapat kekurangan dalam pengimplementasiannya dan berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Masadi selaku Kepala Desa Siswo Bangun terdapat beberapa masalah contohnya seperti kurangnya sumber daya baik lingkungan maupun sumber daya manusia. Kemudian belum adanya peraturan yang khusus yang dibuat oleh desa tentang kebijakan Padat Karya Tunai Desa ini, dan jumlah tenaga kerja yang belum terserap dengan maksimal menjadi masalah yang dihadapi dalam menjalankan Program Padat Karya Tunai Desa di Desa Siswo Bangun.

Beberapa hal yang ditemukan saat observasi awal tersebut di atas mengindikasikan bahwa masih adanya masalah dalam pelaksanaan program Padat Karya Tunai Desa di Desa Siswo Bangun Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Padat Karya Tunai Desa Dalam Mengurangi Pengangguran di Desa Siswo Bangun Dalam Perspektif Ekonomi Islam”**

D. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penelitian ini memfokuskan pada implementasi kebijakan padat karya tunai desa dalam mengurangi pengangguran di desa siswo bangun tahun.

Subfokus pada penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan padat karya tunai desa dalam mengurangi pengangguran di desa siswo bangun. Adapun waktu penelitian dilakukan dari bulan februari – april 2023.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan padat karya tunai desa di desa siswo bangun?
2. Bagaimana implementasi kebijakan padat karya tunai desa dapat mengurangi pengangguran yang ada di desa siswo bangun?
3. Bagaimana implementasi kebijakan Padat Karya Tunai Desa di Desa Siswo Bangun ditinjau dalam perspektif ekonomi islam?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan padat karya tunai desa di desa siswo bangun.
2. Untuk mengetahui peran implementasi kebijakan padat karya tunai desa dalam mengurangi pengangguran di desa siswo bangun.

G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan wawasan untuk memperdalam dan memperluas ilmu pengetahuan, pengalaman dan implementasi bagi masyarakat luas dengan mengacu pada sumber teori yang ada terutama pada ilmu ekonomi islam, dapat bermanfaat sebagai bahan referensi untuk penelitian dimasa yang akan datang terutama tentang implementasi kebijakan pemerintah dalam mengurangi pengangguran.
 - b. Penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi dan bahan kajian tentang padat karya tunai desa dan ekonomi islam.
2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat diterapkan dalam sebuah kinerja dimana pentingnya pengimplementasian kebijakan Padat Karya Tunai Desa di implementasikan

sebagaimana mestinya sehingga dapat memperoleh hasil dan tujuan seperti yang diinginkan salah satunya adalah dengan mengurangi pengangguran dan diterapkan pengimplementasiannya sesuai dengan perspektif ekonomi Islam yang mengedepankan sebuah keadilan didalamnya baik diterapkan oleh aparat desa ataupun kita sebagai masyarakat. Hal lainnya manfaat praktis yang dapat dirasakan baik itu bagi:

- a. Bagi peneliti, Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan penelitian ini dapat dijadikan bahan sebuah kajian, pengetahuan dan kajian khususnya Program Padat Karya Tunai Desa.
- b. Bagi UIN Raden Intan Lampung, khususnya jurusan Ekonomi Syariah hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai awal bagi penelitian selanjutnya tentang yang berminat melakukan penelitian tentang Implementasi Kebijakan Padat Karya Tunai Desa.
- c. Bagi masyarakat, diharapkan dapat menjadi sebuah pemahaman tentang bagaimana sebuah Implementasi Kebijakan Padat Karya Tunai Desa dalam mengurangi Pengangguran dan diharapkan masyarakat agar merasakan manfaatnya untuk berpartisipasi dalam sebuah program yang bertujuan untuk membantu mengurangi pengangguran yang ada pada masyarakat.

H. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Penelitian ini dilakukan oleh Hajar Risa, Badaruddin dan Munir Tanjung, tahun 2021, berjudul Implementasi Program Padat Karya Tuna Dana Desa dalam Mengatasi Kemiskinan Masyarakat Desa Karang Gading, Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian didapat, bahwa Implementasi program Padat Karya Tunai dari Dana Desa Karang Gading pada kegiatan rabat beton penimbunan sirtu pada Dusun VI untuk tahun anggaran 2020 hasilnya belum maksimal, Adapun kendala yang dihadapi yaitu Sumber daya manusia yang tidak mumpuni, dan terjadi konflik kecil berupa

protes dari warga Desa yang tidak diberdayakan sebagai pekerja atau penerima upah Padat Karya Tunai Desa.²⁰

2. Penelitian ini dilakukan oleh Herdiyana Deni, tahun 2019, berjudul Implementasi Padat Karya Tunai Dalam Menurunkan Penduduk Miskin di Pedesaan Provinsi Lampung dan Riau. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan CfWV di Provinsi Lampung dan Riau. Metode yang digunakan adalah dengan melakukan observasi dan wawancara dengan stakeholder di desa yang termasuk kategori Desa Tertinggal atau Desa Sangat Tertinggal dengan jumlah penduduk miskin yang tinggi. Hasil dari penelitian ini adalah pemberian hari kerja (HOK) minimal 30% belum sepenuhnya sesuai dan kegiatan ini belum bias memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dikarenakan sifat sementara dari kegiatannya.²¹
3. Penelitian ini dilakukan oleh Budiasa, Raka, Mardika, tahun 2019, Berjudul Implementasi Kebijakan Padat Karya Tunai (PKT) pada Masyarakat Miskin di Desa Lebih, Gianyar. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penentuan informan menggunakan purposive sampling. Hasil termaan penelitian yaitu 1) Implementasi kebijakan PKT di Desa Lebih, di mana PKT terlaksana dengan baik seperti: pelaksanaan kegiatan prioritas penggunaan Dana Desa; pelaksanaan kegiatan PKT secara swakelola; pembayaran upah secara tunai; serta keterlibatan masyarakat sebagai pelaksana swakelola. 2) Faktor-faktor pendukung kebijakan PKT, meliputi: kebijakan Pemerintah, kelembagaan desa, kesediaan tenaga kerja dan jenis pekerjaan, serta faktor-faktor penghambat kebijakan PKT, meliputi: penyelarasan perencanaan desa dan keahlian pekerja. 3) Dampak implementasi kebijakan PKT terhadap masyarakat

²⁰ Hajar Risa, Badaruddin Badaruddin, and Munir Tanjung, "Implementasi Program Padat Karya Tunai Dari Dana Desa Dalam Mengatasi Kemiskinan Masyarakat Desa Karang Gading," *Perspektif* 10, no. 2 (2021): 739–53.

²¹ Deni Herdiyana, "Implementasi Padat Karya Tunai Dalam Menurunkan Penduduk Miskin Di Pedesaan Provinsi Lampung Dan Riau," *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Ekonomi* 16, no. 02 (2019): 175–87.

miskin di Desa Lebih, meliputi: dampak ekonomi, sosial, dan budaya.²²

4. Penelitian ini dilakukan oleh Dian, Rama, Muhammad Farid, tahun 2019, berjudul Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Padat Karya Tunai. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana tahap pemberdayaan masyarakat melalui program padat karya tunai. Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, maka dapat dilakukan deskripsi tahapan pemberdayaan masyarakat melalui program Padat Karya Tunai di Desa Plandaan dengan menggunakan teori Isbandi Rukminto Adi yang terdiri dari tahap persiapan (Engagement), tahap pengkajian (Assessment), tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan (Designing), tahap pemformulasian rencana aksi (Formulation), tahap pelaksanaan program penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana tahap pemberdayaan masyarakat melalui program padat karya tunai Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, maka dapat dilakukan deskripsi tahapan pemberdayaan masyarakat melalui program Padat Karya Tunai di Desa Plandaan dengan menggunakan teori Isbandi Rukminto Adi yang terdiri dari tahap persiapan (Engagement), tahap pengkajian (Assessment), tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan (Designing), tahap pemformulasian rencana aksi (Formulation), tahap pelaksanaan program atau kegiatan (Implementation), tahap evaluasi (Evaluation), tahap terminasi (Disengagement).²³

²² Anak Agung Gde Rai Budiasa, A. A. Gde Raka, and I Made Mardika, "Implementasi Kebijakan Padat Karya Tunai (PKT) Pada Masyarakat Miskin Di Desa Lebih, Gianyar," *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik* 4, no. 2 (2019): 71–82.

²³ Tiara Rama Dian and Muhammad Farid Ma'ruf, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Padat Karya Tunai (Studi Kasus Desa Plandaan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)," *Publika* 7, no. 4 (2019): 6, www.bps.go.id.

5. Penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Rudi Wijaya, M. Bahri Ghazali, sonhaji dan Heni Noviarita, tahun 2020. Dengan judul Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan Dana Desa pada Pemberdayaan Masyarakat Islam di Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Sumber data informan dalam penelitian ini adalah pemerintah desa dan masyarakat serta data BPS dan sumber lain yang mendukung penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat dalam pemanfaatan dan desa memiliki peran yang cukup besar. Pemberdayaan masyarakat meliputi beberapa bidang yaitu pendidikan, kesehatan, teknologi, peningkatan sosial ekonomi, perbaikan kelembagaan pemerintah. Dalam implementasinya, pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan dalam program memang penting, namun tidak sedikit dari mereka yang tidak sepenuhnya mengambil aspirasi dari masyarakat.²⁴
6. Penelitian ini dilakukan oleh, Yunita Rahayu, Muhammad Iqbal Fasa dan Suharto, tahun 2022. Penelitian ini berjudul Implementasi Etika Bisnis Dalam Meningkatkan Kesejahteraan. Pada penelitian ini menggunakan metode *library research* (kajian pustaka) yang mengumpulkan data-data dari berbagai macam literature, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi etika bisnis islam dalam meningkatkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan material, kesejahteraan spiritual dan moral. Hasil penelitian adalah mengeahu cara bagaimana implementasi etika bisnis islam dalam melakukan suatu kegiatan muamalah.²⁵

²⁴ Muhamad Rudi Wijaya et al., "Community Participation in Utilization of Village Funds on Empowerment of Islamic Communities in East Lampung District," *Prosiding ICSMR* 1, no. 1 (2020): 60–73.

²⁵ Yunita Rahayu, Muhammad Iqbal Fasa, and Kata Kunci, "Islamic Economics and Finance Journal Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagog," 2022 .

I. Metode Penelitian

Metode merupakan aspek yang sangat penting dalam melakukan sebuah penelitian, untuk itu dalam bagian ini penulis akan menjelaskan metode yang digunakan.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yang berfokus pada penelitian lapangan (*field search*) yaitu penelitian yang dilakukan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lapangan yakni Masyarakat dan Aparatur Desa Siswo Bangun.

Data kualitatif memberikan dan menunjukkan kualitas objek penelitian yang dilakukan. Selain itu peneliti juga menggunakan studi pustaka yaitu dengan pemanfaatan literature (kepustakaan) berupa buku, catatan, dan hasil penelitian sebelumnya tentang Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD).

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini berdasarkan sifatnya termasuk kedalam penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung untuk menemukan fakta sosial di masyarakat. Penelitian kualitatif berusaha untuk mengangkat secara ideografis berbagai fenomena dan realitas sosial. Pembangunan dan pengembangan teori sosial khususnya sosiologi dapat dibentuk dari empiri melalui berbagai fenomena atau kasus yang diteliti. Dengan demikian teori yang dihasilkan mendapatkan pijakan yang kuat pada realitas, bersifat kontekstual dan historis.²⁶

Penelitian deskriptif bertujuan untuk pemecahan masalah secara sistematis dan factual mengenai sifat-sifat populasi dan fakta-fakta. Terkait dengan penelitian ini

²⁶ Gumilar Rusliwa Somantri, "Memahami Metode Kualitatif," *Makara Human Behavior Studies in Asia* 9, no. 2 (2005): 57.

adalah mendeskripsikan tentang implementasi Kebijakan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) di Desa Siswo Bangun dalam mengurangi pengangguran yang ada di Desa Siswo Bangun itu sendiri.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus (focus grup discussion FGD) dan penyebaran kuesioner.²⁷ Dalam hal ini peneliti mendapatkan data dan informasi langsung dari pihak yang bersangkutan yaitu masyarakat dan aparatur Desa Siswo Bangun.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. Pemahaman terhadap kedua jenis data di atas diperlukan sebagai landasan dalam menentukan teknik serta langkah langkah pengumpulan data penelitian. Data sekunder yang diperoleh oleh peneliti dari buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian yaitu tentang implementasi kebijakan padat karya tunai desa dalam mengurangi pengangguran.

²⁷ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Sleman: Literasi Media, 2015).

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan peneliti laksanakan berada di Desa Siswo Bangun Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah. Alasan memilih lokasi penelitian dikarenakan peneliti sdah melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Siswo Bangun selama 40 hari lamanya. Oleh karena itu peneliti tertarik untk melakukan penelitian tentang pengimplementasian kebijakan Padat Karya Tunai Desa. Alasan lain adalah karenanya peneliti bisa mendapatkan data yang sesuai dengan objek kajian yang diteliti oleh peneliti.

4. Informan Peneliti

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitiannya.²⁸ Dalam penelitian ini, peneliti menentukan informan penelitiannya dengan teknik purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu yang memahami fokus penelitian. Informan dalam pnelitian ini berjumlah 12 (Dua Belas) orang yang terdiri dari Kepala Desa Siswo Bangun yaitu Bapak Masadi, Sekertaris Desa Bapak Fatkhur Rohim, Kasi Pemerintahan Bapak Purwanto, Kasi Kesejahteraan Bapak Sumarji, Kasi Pelayanan Bapak Nurhakim Sunandar, Kaur Keuangan Bapak Eko Purnomo, Kaur Umum Bapak Iwan, serta masyarakat yang berjumlah 5 orang yakni Bapak Suhar, Robi Setiawan, Sumarno, Pono, Sutrisno. Hal ini dikarenakan semua informan ini lebih mengetahui tentang informasi yang dibutuhkan oleh peneliti dan masyarakat Desa Siswo Bangun yang ingin mengetahui tentang seputar Kebijakan Padat Karya Tunai Desa (PKTD).

²⁸ tjipto subadi, "Metode Penelitian Kualitatif," 2006, 1–110.

Table 1.2 Informan Peneliti

No	Kategori Informan	Informan
1	Kepala Desa Siswo Bangun	Masadi
2	Sekretaris Desa	Fatkur Rohim
3	Kasi Pemerintahan	Purwanto
4	Kasi Kesejahteraan	Sumarji
5	Kasi Pelayanan	Nurhakim Sunandar
6	Kaur Keuangan	Eko Purnomo
7	Kaur Umum	Iwan
8	Masyarakat (Pekerja)	- Suhar - Robi Setiawan - Sumarno - Pono - Sutrisno

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2023

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi yang diperlukan, teknik yang diterapkan yaitu:

a. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁹

Wawancara dalam penelitian kualitatif bersifat mendalam (*indepth interview*). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semiterstruktur, dimana wawancara dilakukan secara bebas untuk mengali informasi lebih dalam dan bersifat dinamis, namun tetap terkait dengan pokok-pokok wawancara yang telah peneliti buat terlebih dahulu dan tidak menyimpang dari konteks yang akan dibahas dalam fokus penelitian.

²⁹ lexy j moleong, "Metedologi Penelitian Kualitatif," 2001, 135.

Dalam penelitian ini peneliti mengajukan serangkaian pertanyaan kepada sejumlah responden yang dapat memberikan keterangan yang diperlukan oleh peneliti yaitu mengenai implementasi program. Responden yang diwawancarai yaitu Aparatur Desa dan anggota masyarakat Desa Siswo Bangun yang tergabung dalam pengimplementasian Kebijakan Padat Karya Tunai Desa.

b. Observasi

Pengumpulan data dengan menggunakan observasi ditunjukkan untuk mengungkapkan makna suatu kejadian atau *setting* tertentu., yang merupakan perhatian esensial dalam penelitian kualitatif. Observasi dilakukan untuk mengamati obyek penelitian, seperti tempat khusus organisasi, sekelompok orang atau beberapa aktivitas suatu sekolah. Pengamat dalam berlangsungnya observasi dapat berperan sebagai pengamat yang hanya semata-mata mengamati dengan tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan subyek. Disisi lain, pengamat dapat berperan serta dalam kegiatan subyek dengan sedikit terdapat perbedaan antara peneliti dengan subyek.³⁰

Yang di observasi dalam penelitian adalah Kebijakan Padat Karya Tunai Desa di Desa Siswo Bangun yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung dilapangan untuk mendapatkan gambaran nyata tentang implementasi Kebijakan Padat Karya Tunai Desa di Desa Siswo Bangun.

c. Dokumentasi

Menggunakan teknik dokumentasi. Berbagai dokumen atau arsip yang ada dapat dimanfaatkan sebagai sumber data sekunder, untuk melengkapi data-data yang telah digali melalui wawancara dengan

³⁰ Salim & Syahrums, *Metedologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012).

para informan dan observasi tentang tempat dan berlangsungnya peristiwa maupun aktivitas yang berkaitan dengan topik penelitian. Dokumen yang dikumpulkan dapat berasal dari informan, pejabat pemerintah, maupun dari sumber yang lainnya.³¹ Pada penelitian ini studi dokumentasi sebagai data pendukung dari kegiatan wawancara, observasi, serta untuk memperoleh kumpulan data seperti data foto kegiatan wawancara dan foto-foto kegiatan penelitian.

6. Teknik Menganalisis Data

Disini peneliti memakai analisis berdasarkan Janis data kualitatif untuk menganalisis datanya, terdapat tiga aktivitas dalam analisis data kualitatif, diantaranya:

a. Reduksi data

Miles dan Huberman (1984) menjelaskan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung. Jadi reduksi data adalah lebih memfokuskan, menyederhanakan, dan memindahkan data mentah kedalam bentuk yang lebih mudah dikelola. Tegasnya, reduksi data adalah membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat bagian, penggolongan dan menulis memo. Kegiatan ini berlangsung secara terus menerus sampai laporan akhir tersusun secara lengkap.³² Dalam hal ini penulis memperoleh data yang berkaitan dengan implementasi Kebijakan Padat Karya Tunai Desa di Desa Siswo Bangun.

b. Penyajian Data

³¹ John Olsson, “Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa” 1, no. 1 (2008): 305.

³² Salim & Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.2010.

Penyajian data di sini sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data ini berbentuk teks naratif, teks dalam bentuk catatan-catatan hasil wawancara dengan informan penelitian sebagai informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan tentang fenomena tersebut.³³ Data yang disajikan yaitu implementasi kebijakan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) di Desa Siswo Bangun.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seseorang penganalisis (peneliti) mulai mencari makna prosesnya. Dengan demikian, aktifitas analisis merupakan proses interaksi antara ketiga langkah analisis data tersebut, dan merupakan proses siklus sampai kegiatan penelitian selesai.³⁴ Untuk mengolah data yang didapat supaya penelitian dapat terarah dengan baik, peneliti menggunakan metode induktif-generalisasi, yaitu hipotesis yang disinggung diatas karena hasil pemikiran yang rasional, maka kebenarannya masih bersifat sementara, oleh sebab itu harus didukung oleh keserasian data koresponden. Kesimpulan yang bersifat generalisasi berdasarkan data empiris disebut logika induktif dimana peluang kebenarannya masih bersifat probabilistik. Penelitian induktif lebih menekankan kepada penelitian dari bersifat umum ke khusus, yaitu ketika kenyataan di lapangan dikaitan dengan teori yang ada.

³³ subadi, "Metode Penelitian Kualitatif."2005.

J. Sistematika Penulisan

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

b. BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi teori-teori yang digunakan sebagai landaan dalam penelitian. Mulai dari teori Implementasi Kebijakan, Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan teori yang relevan atau berkaitan dengan sesuai dengan tema skripsi.

c. BAB III OBJEK PENELITIAN

Bab ini memuat tentang beberapa gambaran umum objek penelitian dan penyajian fakta dan data di Desa Siswo Bangun Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah. Yaitu terdiri dari sejarah berdirinya Desa Siswo Bangun, struktur organisasi di Desa Siswo Bnagun, kondisi demografis dan kependudukan.

d. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang Implementasi Kebijakan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dalam mengurangi pengangguran di desa Siswo Bangun dalam perspektif ekonomi islam.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir berisi tentang kesimpulan hasil, serta saran-saran, kesimpulan disajikan berdasarkan hasil penelitian yang berisikan uraian langkah-langkah yang perlu diambil oleh pihak-pihak yang terkait dengan sebuah hasil penelitian



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil menghasilkan output dan outcomes seperti direncanakan. Untuk dapat mewujudkan output dan outcomes yang ditetapkan, maka kebijakan publik perlu untuk diimplementasikan tanpa diimplementasikan maka kebijakan tersebut hanya akan menjadi catatan-catatan elit sebagaimana dipertegas oleh Udoji yang mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan.³⁵

Secara konseptual, implementasi kebijakan dapat diidentifikasi sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh institusi pemerintah, baik secara individu maupun berkelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dalam kebijakan. Secara umum implementasi kebijakan merupakan suatu turunan pada tataran penjabaran suatu rumusan kebijakan dan tindakan yang lebih bersifat konkrit (mikro). Dengan kata lain, merupakan pelaksanaan dari suatu keputusan atau rumusan kebijakan yang menyangkut aspek manajerial dan teknis proses implementasi baru dimulai, jika tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan disusun,

³⁵ Ahmad Mustanir and Darmiah Darmiah, "Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang," *Jurnal Politik Profetik* 4, no. 2 (2016): 225–38.

serta dana telah siap untuk dialokasikan guna mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.³⁶

Merujuk pada pandangan Edward III ini Peneliti mengetahui, menganalisis, serta mendeskripsikan kesiapan dari Pemerintah Desa dalam menjalankan Program Dana Desa. Pembuatan kebijakan tidak selesai begitu saja setelah kebijakan tersebut disetujui dan disepakati. Implementasi kebijakan memang lebih sulit daripada perumusannya sehingga tidak semua berhasil di implementasikan. George Edward III menegaskan bahwa masalah utama dari administrasi publik adalah *lack of attention to implementation*. Dikatakannya bahwa *without effective implementation the decision of policy makers will be carried out successfully*. Agar implementasi kebijakan menjadi efektif, Edward menyarankan Kita untuk memperhatikan empat isu pokok, yaitu: *communication, resource, disposition or attitudes* dan *bureaucratic structures*.³⁷

Implementasi program tidak hanya terbatas pada tinakan/perilaku unit birokrasi untuk bertanggungjawab untuk melaksanakan program, tetapi berpengaruh pada semua pihak terlibat dan akhirnya terdapat sesuatu dampak yang tidak diharapkan.³⁸

Dari beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa implementasi kebijakan bukan hanya sekedar aktivitas dan tindakan dari pelaksanaan sebuah program, akan tetapi implementasi merupakan sesuatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan dan pedoman norma tertentu untuk mencapai tujuan dari kegiatan program tersebut.

³⁶ Marlan Hutahaean, "Perkembangan Teori Implementasi Kebijakan," n.d.,(2021), 81–150.

³⁷ George Edwards III, *Implementing Public Policy* (Washington congressional, 1980).

³⁸ Dody Setyawan and Nanang Bagus Srihardjono, "Analisis Implementasi Kebijakan Undang-Undang Desa Dengan Model Edward III Di Desa Landungsari Kabupaten Malang," *Jurnal Reformasi* 6, no. 2 (2016): 125–33.

Dalam penelitian ini teori yang di gunakan adalah teori implementasi kebijakan Model George C. Edward III, Implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan merupakan proses yang krusial karena sebera baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan public tidak akan terwujud. Begitu pula apabila kebijakannya tidak dirumuskan dengan baik maka tujuan dari kebijakan public tersebut tidak akan terwujud. Oleh karena itu, utuk mencapai tujuan kebijakan dan implementasi harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik. Oleh karena itu,

Evaluasi implementasi Edward menyatakan bahwa ada empat variable krusial dalam implementasi yaitu:

Komunikasi, sumber daya, watak atau sikap dan struktur birokrasi keempat faktor tersebut beroperasi secara simultan dan saling berinteraksi satu sama lainnya. Berikut ini akan dibahas lebih lanjut mengenai berbagai variable yang terlibat di dalam implementasi kebijakan melalui teori Implementasi Kebijakan Model George C. Edward III. Dalam pendekatan Edward III, terdapat empat variable yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor yang sangat penting dan merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam implementasi kebijakan yang mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yng harus dilakukan untuk mencapai tujuan dari implementasi tersebut dan mengetahui sasaran

dari sebuah implementasi sehingga dapat mengurangi distorsi implementasi. Komunikasi-komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh pelaksana. Kemudian bila kebijakan-kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk-petunjuk pelaksana tidak hanya dipahami melainkan juga petunjuk itu harus jelas. Komunikasi merupakan tolak ukur seberapa jauh kebijakan dalam bentuk suatu peraturan telah disampaikan secara jelas dengan interpretasi yang sama dan dapat dilakukan secara konsisten dengan aparat pelaksana peraturan tersebut. Komunikasi merupakan alat kebijakan untuk menyampaikan perintah-perintah dan arahan-arahan (informasi) dan sumber pembuat kebijakan kepada mereka-mereka yang diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Untuk itu perlu memahami arah penyampaian kebijakan.³⁹

Tipe komunikasi yang diajukan oleh Edward III termasuk pada tipe komunikasi vertical. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variable komunikasi tersebut diatas, yaitu:

a) Transmisi

Hal penting pertama bagi implementasi kebijakan adalah sebagai implementor mereka harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Komunikasi harus akurat dan mudah dimengerti serta dipahami oleh para pelaksana. Namun seringkali keputusan telah dibuat oleh perintah

³⁹ Risa, Badaruddin, and Tanjung, "Implementasi Program Padat Karya Tunai Dari Dana Desa Dalam Mengatasi Kemiskinan Masyarakat Desa Karang Gading." 2021.

pelaksanaanya juga telah dikeluarkan, namun demikian proses pelaksanaan keputusan tersebut tidak berjalan secara langsung sebagaimana seperti yang diharapkan. Bisa jadi keputusan itu diabaikan dan terjadi kesalah pahaman terhadap keputusan mereka. Persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Keputusan kebijakan dan perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan dan perintah itu dapat diikuti. Tentu saja, komunikasi harus akurat dan dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. Namun seringkali keputusan telah dibuat dan perintah pelaksanaanya juga telah dikeluarkan, namun demikian proses pelaksanaan keputusan tersebut tidak berjalan secara langsung sebagaimana diharapkan. Bisa jadi keputusan itu diabaikan dan terjadi kesalahpahaman terhadap keputusan tersebut atau mereka mempunyai keleluasaan untuk memaksakan pandangan-pandangannya terhadap keputusan yang mungkin berbeda dengan pandangan-pandangan atasan mereka atau pandangan-pandangan yang menjadi acuan.

b) Kejelasan

Apabila kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk pelaksanaan bukan hanya harus bias dipahami melainkan juga harus jelas. Karena apabila petunjuk pelaksanaan tidak jelas maka pelaksana akan kebingungan tentang apa yang sebenarnya harus mereka

lakukan. Ada faktor lain yang menyebabkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan yakni bias dikarenakan ada pihak yang mungkin tidak menyenangi atau bahkan tidak menyetujui terhadap pelaksanaan suatu kebijaksanaan

kan juga dapat terjadi. Ketidakjelasan dalam komunikasi juga bias terjadi karena mereka memiliki keleluasaan untuk memaksakan pandangan mereka sendiri pada implementasi kebijakan, pandangan yang mungkin berbeda dengan pandangan atasan atau berbeda dari pandangan yang harusnya dijadikan acuan.

c) Konsistensi

Konsistensi mengandung makna bahwa implementasi kebijakan akan berjalan dengan baik apabila perintah pelaksanaan berjalan dengan konsisten dan jelas. Konsistensi ini bias terkait dengan sikap, persepsi, dan respon dari aparat pelaksana dalam memahami secara jelas dan benar terhadap pedoman yang dilaksanakan. Oleh karena itu sangat pentingnya perintah dari pelaksana implementasi berjalan dengan konsisten dan jelas sehingga mendorong pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menerjemahkan dan mengimplementasikan kebijakan.

2. Sumber Daya

Sumber saya untuk tercapainya keberhasilan implementasi kebijakan program padat karya tunai desa ini adalah sumber daya yang dibagi kedalam 4 bagian yaitu sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya sarana

prasarana dan sumber daya kewenangan.⁴⁰ Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan karena bagaimanapun baiknya kebijakan atau program dirumuskan tanpa ada dukungan sumberdaya yang memadai maka kebijakan akan mengalami kebijakan kesulitan dalam mengimplementasikannya. Sumber daya yang dimaksudkan mencakup jumlah staff pelaksana yang memadai dengan keahlian yang memadai, informasi, wewenang atau kewenangan dan sarana dan prasarana-sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menjamin kebijakan dijalankan sesuai dengan apa yang diharapkan. Memadai yang dimaksudkan adalah jumlah para pelaksana harus sesuai dengan jumlah tugas yang dibebankan maupun kemampuannya, dan keterampilan yang dimiliki baik teknis maupun material. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi dari sumber daya adalah:

a) Staf

Sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan, dimana sumber daya manusia tersebut memiliki jumlah yang cukup dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan kebijakan. Yang dimaksud sumber daya manusia tersebut memiliki jumlah yang cukup dan memenuhi kualifikasi adalah para pelaksana yang berjumlah cukup dan memiliki kemampuan dan keterlampiran yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan. Jumlah pelaksana yang banyak tidak otomatis mendorong implementasi yang berhasil, jika tidak

⁴⁰ Risa, Badaruddin, and Tanjung. Implementasi Padat Karya Tunai Desa. 2021.

memiliki keterlampiran yang memadai. Disisi lain kurangnya personil yang memiliki keterlampiran juga akan menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut.

b) Informasi

Informasi merupakan sumber penting dalam implementasi kebijakan. Informasi dalam sumber daya adanya informasi yang dimiliki oleh sumber daya manusia untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Informasi untuk melaksanakan kebijakan disini adalah segala keterangan dalam bentuk tulisan atau pesan, pedoman, petunjuk dan tata cara pelaksanaan yang bertujuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

c) Wewenang

Kewenangan dalam sumber daya adalah kewenangan yang dimiliki oleh sumber daya manusia untuk melaksanakan suatu kebijakan yang ditetapkan. Kewenangan yang dimiliki oleh sumber daya manusia adalah kewenangan setiap pelaksana untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang diamanatkan dalam suatu kebijakan.

d) Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana dalam sumber daya adalah semua sarana dan prasarana yang tersedia demi terselenggaranya pelaksanaan suatu kebijakan dan dipergunakan untuk mendukung secara langsung dan terkait dengan tugas-tugas yang ditetapkan.

3. Disposisi/ Sikap

Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti

komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.⁴¹

Berbagai pengalaman pembangunan dinegara-negara dunia ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah. Berbagai kasus korupsi yang muncul dinegara-negara dunia ketiga, seperti indonesia adalah contoh konkrit dari rendahnya komitmen dan kejujuran aparat dalam mengimplementasikan program-program pembangunan. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut George C. Edward III, adalah:

a) Pengangkatan Birokrat

Dalam artian pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan lebih khusus lagi pada kepentingan warga.

b) Insentif

Dalam artian memanipulasi insentif dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendukung yang membuta para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan dalam sebagai upaya

⁴¹ A. GFallis, "Teori Kebijakan Implementasi," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–99.

memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

4. Struktur Birokrasi

Struktur dalam birokrasi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran birokrasi tersebut. sehingga struktur birokrasi ini menjadi faktor penting yang harus diperhatikan untuk menggiring suatu kebijakan menjadi tepat guna. Dalam struktur birokrasi ini berkaitan dengan faktor penentu keberhasilan kebijakan terletak pada dua hal, yaitu fakto internal dan eksternal. Pada faktor internal dikenal dengan standar operasional prosedur (SOP). SOP ini merupakan tata aliran pekerjaan dalam melaksanakan program atau dikenal dengan pemahaman ukuran-ukuran dasar. Alira ini perlu ada agar fapat mencapai hasil yang memuaskan. Sedangkan faktor eksternal berikatan dengan fragmentasi seperti tekanan-tekanan yang berasal dari luar unit birokrasi, komite dalam legislative atau tekanan dari faktor eksternal lainnya.⁴²

Struktur birokrasi menggambarkan pandangan sosiologis tentang organisasi-organisasi yang diperbaharui untuk meliputi riset baru yang memiul langsung analisis implementasi program sosial. Titik tolaknya adalah anggapan bahwa ciri esensial dari organisasi- organisasi adalah interaksi antara nilai dan dekresi.⁴³

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sudah mencukupi dan para implementor mengetahui

⁴² Ellen Meilinda Nainggolan and Siti Mardiana, "Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tentang Program Bela Pengadaan," *Jurnal Manajmen Sumber Daya Manusia* 10 (2023): 1–16.

⁴³ tachijan, *Implementasi Kebijakan Publik*, n.d.2006.

bagaimana cara melakukannya, implementasi bisa jadi belum efektif karena ketidak efisienan struktur birokrasi yang ada. Birokrasi merupakan salah satu bahan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksanaan kebijakan. Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi ke arah yang lebih baik, adalah:

a) Melakukan *Standart Operating Prosedures* (SOP)

Standard Operating Procedure berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber daya para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi yang kompleks dan tersebar luas. SOP mungkin menghalangi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan. Semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara lazim dari suatu organisasi, semakin besar pula SOP menghambat implementasi. Namun SOP juga memiliki manfaat dimana organisasi dengan prosedur perencanaan yang baik dan kontrol yang sejalan dengan program yang memungkinkan, akan lebih dapat menyesuaikan dengan tanggung jawab yang baru daripada birokrasi tanpa mempunyai ciri tersebut. Dari keterangan diatas maka dapat dikatakan bahwa adanya SOP atau petunjuk pelaksanaan walaupun dibuat secara sederhana, tidak akan menyulitkan aparat pelaksana dalam menjalankan suatu kebijakan tanpa mengurangi makna secara keseluruhan.

b) Melaksanakan Fragmentasi.

Fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas yang melibatkan unit diluar organisasi. Konsekuensi buruk dari fragmentasi birokrasi usaha untuk menghambat koordinasi. Para birokrat dengan alasan prioritas dari organisasinya masing-masing, mendorong para birokrat untuk menghindari koordinasi dengan organisasi lain, padahal terkadang penyebaran wewenang dan sumber untuk melaksanakan kebijakan kompleks membutuhkan koordinasi. Hambatan ini diperburuk oleh struktur pemerintah yang terpecah-pecah padahal semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan untuk berhasil. Dari keterangan diatas, dapat dikatakan bahwa fragmentasi yang dimaksud adalah penyebaran tanggung jawab pelaksanaan tugas yang dilaksanakan tanpa adanya tumpang tindih dengan tetap mencakup pembagian tugas secara menyeluruh dalam melaksanakan suatu kebijakan.

B. Padat Karya Tunai Desa

1. Pengertian Padat Karya Tunai Desa

Padat Karya Tunai (Cas for work) merupakan program pemerintah berupa kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, bersifat produktif yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk menambah pendapatan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus mendukung penurunan angka stunting. Dengan skema Padat Karya

Tunai dalam pelaksanaan Dana Desa diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dengan memberikan honorarium (upah) langsung tunai kepada tenaga kerja yang terlibat, baik secara harian maupun mingguan, sehingga dapat memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.⁴⁴

Pemerintah telah membuat berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. Salah satunya adalah kebijakan Padat Karya (*Cash for Work*). Dari program Padat Karya, Pemerintah pun telah menetapkan kebijakan pengupahan untuk program padat karya sebagai komitmen dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.⁴⁵

Cash for work (CfW) adalah suatu metode untuk membantu korban yang terdampak bencana alam dengan cara mengikutsertakan dalam berbagai macam pekerjaan yang mencakup rekonstruksi dan pemulihan pasca bencana, serta membayar upah secara tunai, salah satunya adalah pasca bencana gempa bumi yang terjadi di Fukushima Jepang.⁴⁶

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan padat karya sebagai (1) Pekerjaan yang berasaskan pemanfaatan tenaga kerja yang tersedia (dalam jumlah besar) dan ke (2) Kegiatan pembangunan proyek yang lebih banyak menggunakan tenaga manusia jika dibandingkan dengan modal atau mesin. Dari kedua definisi tersebut menitik beratkan adanya suatu pekerjaan yang mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia

⁴⁴ Nurjihadi, "Strategi Pengembangan Program Padat Karya Tunai Desa (Pktd) Dengan Pendekatan Analisis Swot Di Desa Stowe Brang Kecamatan Utan." 2020.

⁴⁵ Roni et al., "Padat Karya Sebagai Kontribusi Kehidupan Masyarakat Pada Penggunaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Kaneyan Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan)." 2019.

⁴⁶ Andi Firdha Muafiah, "Implementasi Padat Karya Tunai Desa," *Ayaa* 8, no. 5 (2019): 55.

dalam kuantitas yang besar. Artinya, padat karya menciptakan suatu lapangan pekerjaan, apakah itu baru atau sifatnya perluasan, yang benar- benar dapat menyerap potensi tenaga kerja yang ada sehingga tingkat pengangguran berkurang.⁴⁷

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pengaturan desa bertujuan antara lain untuk memajukan perekonomian masyarakat desa, mengatasi kesenjangan pembangunan, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan. Ada 2 (dua) hal yang menjadi sasaran program padat karya tunai, yaitu pembangunan infrastruktur dan peningkatan ekonomi masyarakat. Menurut UU nomor 6 tahun 2014 pada pada ayat 1 paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/ kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Secara terperinci, pengalokasian alokasi dana desa dalam APBDes wajib memperhatikan peruntukannya dengan persentase anggaran:

- 1) Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- 2) Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintahan desa, tunjangan operasional badan permusyawaratan desa insentif rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).⁴⁸

⁴⁷ *ibid*

⁴⁸ Muafiah, "Implementasi Padat Karya Tunai Desa." 2019.

2. Sasaran dan Prinsip Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD)

Padat Karya Tunai Desa merupakan program pemberdayaan masyarakat miskin dan marginal yang bersifat produktif dengan menciptakan kesempatan kerja yang mengutamakan sumber daya lokal, untuk memberikan tambahan pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di pedesaan. Terdapat empat kriteria yang menjadi target sasaran utama pemerintah meliputi: masyarakat menganggur, setengah menganggur, penduduk miskin dan penduduk dengan masalah stunting. Merekalah yang diutamakan untuk terlibat menjadi pekerja PKTD.⁴⁹

Padat karya tunai desa (PKTD) merupakan kegiatan pemberdayaan keluarga miskin, pengangguran, dan keluarga dengan balita gizi buruk yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting.

a. Padat Karya Tunai Desa diprioritaskan kepada:

1) Anggota keluarga miskin

2) Pengangguran

Pengangguran merupakan masalah dalam perekonomian yang sering terjadi di masyarakat karena ketidakseimbangan tenaga kerja dengan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan dan juga merupakan faktor yang signifikan dalam kenaikan harga barang atau inflasi.⁵⁰

3) Setengah menganggur

setengah penganggur (underemployed) adalah termasuk di dalamnya semua individu yang

⁴⁹ adib, *Padat Karya Tunai Desa* (yogyakarta: deepublish, 2020).

⁵⁰ Delvian Yosuky et al., "Analisa Kebijakan Pemerintah Terkait Ancaman Pengangguran Pasca Kenaikan Inflasi," *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa* 1, no. 4 (2022): 181–87.

bekerja kurang dari jam kerja normal, dan seseorang yang mau bekerja dengan jam kerja yang lebih banyak. Setengah penganggur adalah orang yang berada di dalam pasar tenaga kerja yang tidak memiliki waktu kerja yang cukup atau tidak memenuhi norma- norma minimal kerja, yaitu pekerjaan penuh waktu dan upah di atas garis kemiskinan.⁵¹

- b. Anggota keluarga dengan balita gizi buruk.
- c. Memberikan kesempatan kerja sementara
- d. Menciptakan kegiatan yang berdampak pada peningkatan pendapatan tanpa menggantikan pekerjaan yang lama
- e. Mekanisme dalam penentuan upah dan pembagian upah dibangun secara partisipatif dalam musyawarah desa
- f. Berdasarkan rencana kerja yang disusun sendiri oleh desa sesuai dengan kebutuhan lokal dan difokuskan pada pembangunan sarana dan prasarana perdesaan atau pendayagunaan sumber daya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat.⁵²

3. Prinsip pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa

a. Inklusif

Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai di Desa perlu disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan aspek tenaga kerja (penganggur, setengah penganggur dan masyarakat marginal/miskin), kondisi geografis, sosial, budaya dan ekonomi serta mempertahankan daya dukung dan keseimbangan lingkungan.

b. Partisipatif dan Gotong Royong

⁵¹ Cindy Sangri Kinanti, "Analisis Tentang Setengah Penganggur Di Indonesia : Antara Sukarela Dan Keterpaksaan," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB [Universitas Brawijaya]* 3, no. 1 (2014): 1–22.

⁵² Apriani Indah, Poti Jamhur, and Edison, "Online ISSN 2746-8453," no. 2017 (2021): 327–37.

Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai di Desa berdasarkan asas “DARI, OLEH dan UNTUK masyarakat”. Pemerintah berperan sebagai fasilitator yang mendampingi pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa untuk melaksanakan pembangunan Desa secara partisipatif dan gotong royong.

c. Transparan dan Akuntabel

Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilakukan dengan mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara moral, teknis, legal maupun administratif kepada semua pihak.

d. Efektif

Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa harus memiliki dampak positif terhadap produktifitas, kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan perekonomian.

e. Swadaya

Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilaksanakan dengan mendorong adanya sumbangan dana, tenaga, material, dan asset bergerak dan/atau tidak bergerak dari warga Desa yang berkecukupan.

f. Prioritas

Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilaksanakan dengan mendahulukan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja, teratasinya kesenjangan, dan terentaskannya warga miskin.

g. Swakelola

Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilaksanakan secara mandiri oleh Desa dengan mendayagunakan tenaga kerja, bahan material, serta peralatan dan teknologi sederhana yang ada di Desa.

h. Keberlanjutan

Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilaksanakan dengan memastikan adanya rencana

pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya.

i. Disepakati dalam musyawarah desa

Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa yang diselenggarakan berdasarkan asas kesamaan dan kesetaraan bagi setiap peserta musyawarah Desa melalui hak bicara, hak berpendapat dan hak bersuara dalam mencapai kemufakatan bersama.

j. Berbasis Kewenangan Lokal Desa dan Hak Asal Usul

Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa yang pembiayaannya bersumber dari APBDesa harus menjadi bagian dari Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

k. Kewenangan yang ditugaskan kepada desa

Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa yang pembiayaannya bersumber dari Non APBDesa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

l. Penentuan Upah Batas Bawah dan Batas Atas Upah/Hari

Orang Kerja (HOK) ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah desa mengacu pada Peraturan Bupati/Walikota. Adapun batas atas upah/HOK dibawah upah minimum provinsi. besaran upah/HOK lebih lanjut akan diatur oleh peraturan bupati/walikota.⁵³

4. Tujuan Padat Karya Tunai Desa

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, penaturan desa bertujuan antara lain untuk memajukan perekonomian masyarakat desa, mengatasi kesenjangan pembangunan, serta memperkuat

⁵³ Desa et al., "Implementasi Padat Karya Tunai."

masyarakat desa sebagai subyek pembangunan. Ada 2 hal yang menjadi sasaran program padat karya tunai, yaitu pembangunan infrastruktur dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Program padat karya tunai bertujuan untuk penciptaan lapangan pekerjaan melalui kegiatan secara swakelola dan padat karya tunai, memupuk rasa kebersamaan, gotong royong dan partisipasi masyarakat desa, meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat desa, mewujudkan peningkatan akses masyarakat miskin, perempuan, anak, dan kelompok marginal kepada pelayanan dasar, dengan berbasis pendekatan pemberdayaan masyarakat, menekan jumlah pengangguran, setengah pengangguran dan masyarakat miskin, dan membangkitkan kegiatan sosial dan ekonomi di desa.

PKTD disebutkan dalam Pasal 1 No. 29 dan Bab V pembinaan, pemantauan, dan evaluasi yaitu pelaksanaan pembangunan desa dengan pola Padat Karya Tunai Desa. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu undang-undang ini menggunakan dua pendekatan, yaitu desa membangun dan membangun desa yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan desa. (undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa) Peraturan kementerian desa nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 dengan

memprioritaskan pembangunan dengan pola padat karya tunai.⁵⁴

5. Manfaat dan Dampak Padat Karya Tunai Desa

Ada banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya PKTD ini. Masyarakat yang menjadi objek prioritas akan memperoleh manfaat langsung dari program ini seperti keluarga miskin, pengangguran serta setengah menganggur, serta masyarakat yang mempunyai balita *stunting*. Salah satu fokus pemerintah di dalam RPJMN 2019 adalah menurunkan angka *stunting* di Indonesia dan program ini menjadi bagian dalam intervensi pemerintah yang saling berkolerasi dengan program pemerintah yang lain.

Apabila para *stakeholder* menjalankan program ini sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan, maka akan dapat memperkecil tingkat pengangguran di desa-desa. Transparansi dalam perekrutan para pekerja sangat diperlukan agar dapat menyediakan lapangan kerja bagi pengangguran, keluarga miskin dan keluarga dengan balita gizi buruk di desa setempat. Adanya perencanaan, pengerjaan, serta pengawasan yang dilakukan secara mandiri, akan semakin menguatkan rasa kebersamaan, keswadyaan, gotong royong dan partisipasi masyarakat desa. Setiap kegiatan harus dikerjakan oleh masyarakat secara bersama-sama secara transparan tanpa kecemburuan sosial satu dengan yang lainnya.

Dalam jangka panjang, ada banyak dampak yang terjadi dengan adanya program seperti ini tersedianya lapangan pekerjaan bagi penganggur, setengah menganggur, serta masyarakat miskin. Program ini juga berdampak pada menurunnya tingkat pengangguran di desa. Apabila seleksi pekerja dilakukan sesuai dengan aturan yang ada maka dapat memperkecil tingkat kemiskinan di desa semakin kecil dan kesejahteraan

⁵⁴ Indah, Jamhur, and Edison, "Online ISSN 2746-8453." 2021.

masyarakat menjadi lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Status desa bisa meningkat kejenjang atasnya menjadi desa mandiri, berkembang, bahkan menjadi desa maju. akses masyarakat desa terhadap pelayanan dasar dan kegiatan sosial ekonomi semakin terjangkau dengan adanya pembangunan infrastruktur desa, sehingga arus migrasi dan urbanisasi akan semakin berkurang. Hidup di desa tidak kalah bergengsi dengan hidup di perkotaan. geliat ekonomi di desa ke depan akan semakin tinggi adanya pembangunan infrastruktur akan mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai pelayanan dasar dan meningkatkan kontribusi pendapatan mereka terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di desa, sehingga mampu memperoleh pendidikan layak yang berimplikasi luas terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.⁵⁵

C. Pengangguran

1. Pengertian Pengangguran

Pengangguran adalah masalah makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara tidak langsung dan paling berat. Bagi kebanyakan orang kehilangan pekerjaan berarti menurunnya standar kehidupan dan tekanan psikologis. Para ekonom mempelajari pengangguran untuk mengidentifikasi sebab-sebabnya dan untuk membantu memperbaiki kebijakan public yang mempengaruhi pengangguran.⁵⁶

Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja/ mempunyai pekerjaan tetapi belum memulai bekerja.

⁵⁵ adib, *Padat Karya Tunai Desa* (yogyakarta: deepublish, 2020).

⁵⁶ n. gregory Mankiw, *Teori Makro Ekonomi*, ed. Yati Sumiharti, 4th ed. (Jakarta: Erlangga, 2000).

Pengangguran ada dua macam yaitu pengangguran terbuka dan pengangguran terselubung.

- a. Pengangguran Terbuka (*open unemployment*) meliputi seluruh angkatan kerja yang mencari pekerjaan, baik yang mencari pekerjaan pertama kali maupun yang pernah bekerja sebelumnya. Pengangguran terbuka biasanya terjadi pada generasi muda yang baru menyelesaikan pendidikan menengah dan tinggi. Ada kecenderungan mereka yang baru menyelesaikan pendidikan berusaha mencari pekerjaan yang sesuai dengan keinginan. Mereka biasanya bekerja di sektor-sektor modern. Untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan, mereka bersedia menunggu beberapa waktu atau bahkan mencarinya di kota atau daerah lain yang sektor modernnya telah berkembang. Inilah yang menyebabkan pada negara yang sedang berkembang umumnya angka pengangguran terbuka di daerah perkotaan lebih besar daripada di daerah pedesaan. Tingkat pengangguran terbuka di perkotaan tiga kali lebih tinggi dibandingkan di pedesaan. Hal ini karena terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia di perkotaan sehingga terjadi persaingan yang ketat dalam memperebutkan lapangan kerja. Selain itu, di Indonesia, fenomena pengangguran terbuka ini juga diakibatkan terdapat perbedaan struktur ekonomi antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Struktur ekonomi KBI lebih modern dibandingkan dengan KTI sehingga angka pengangguran terbuka di KBI lebih tinggi jika dibandingkan dengan KTI.⁵⁷

⁵⁷ Riza Firdhania and Fivien Muslihatinningsih, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Di Kabupaten Jember Factors Affecting of Unemployment Rate in Jember Regency," *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi* IV, no. 1 (2017): 117–21.

- b. Pengangguran Terselubung (*underemployment*) adalah pekerja yang bekerja dengan jam kerja rendah (dibawah sepertiga jam kerja normal atau kurang dari 35 jam dalam seminggu), namun masih mau menerima pekerjaan.

BPS mengategorikan pengangguran terselubung menjadi dua macam, yaitu pekerja yang memiliki jam kerja kurang dari 35 jam per minggu karena sukarela kemauan sendiri dan ada juga yang terpaksa dikarenakan terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia.

2. Jenis- jenis Pengangguran

Pengangguran yang terjadi pada suatu Negara berkaitan dengan kegiatan ekonomi masyarakat, pada dasarnya dapat digolongkan dalam beberapa jenis, di antaranya:

- a. **Pengangguran Ketidaccakapan** Pengangguran ketidaccakapan adalah pengangguran yang terjadi karena seseorang mempunyai cacat fisik atau jasmani, sehingga dalam dunia perusahaan mereka sulit untuk diterima menjadi pekerja/karyawan.
- b. **Pengangguran tak kentara** atau pengangguran terselubung (*disguised unemployment/invisible unemployment*) adalah pengangguran yang terjadi apabila para pekerja telah menggunakan waktu kerjanya secara penuh dalam suatu pekerjaan, tetapi dapat ditarik ke sektor lain tanpa mengurangi outputnya.
- c. **Pengangguran kentara** atau pengangguran terbuka (*visible unemployment*) adalah pengangguran yang timbul karena kurangnya kesempatan kerja atau tidak adanya lapangan pekerjaan.⁵⁸

⁵⁸ Mohammad Rifqi Muslim, "Pengangguran Terbuka Dan Determinannya," *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan Volume 15, Nomor 2* 15, no. 2 (2014): 171–81.

Adapun jenis pengangguran menurut sebab-sebabnya dapat dibedakan sebagai berikut:

1) Pengangguran Musiman

Pengangguran musiman adalah pengangguran yang biasa terjadi pada sektor pertanian, misalnya di musim paceklik. Di mana banyak petani yang menganggur, karena telah usai masa panen dan menunggu musim tanam selanjutnya.

2) Pengangguran Friksional (peralihan)

Pengangguran Friksional (Peralihan), adalah pengangguran yang terjadi karena penawaran tenaga kerja lebih banyak daripada permintaan tenaga kerja atau tenaga kerja yang sudah bekerja tetapi menginginkan pindah pekerjaan lain, sehingga belum mendapatkan tempat pekerjaan yang baru. Kelebihan tersebut menimbulkan adanya pengangguran.

3) Pengangguran karena upah terlalu tinggi

artinya pengangguran yang terjadi karena para pekerja atau pencari kerja menginginkan adanya upah atau gaji terlalu tinggi, sehingga para pengusaha tidak mampu untuk memenuhi keinginan tersebut. Akan tetapi di Indonesia saat ini sudah terdapat ketentuan Upah Minimum Regional (UMR) yang disesuaikan biaya hidup daerah masing-masing, sehingga antara pekerja dengan pengusaha sudah terdapat konsensus dalam penentuan upahnya.

4) Pengangguran Struktural

Pengangguran Struktural yakni pengangguran yang terjadi karena terdapat perubahan struktur kehidupan masyarakat, misalnya dari agraris menjadi industri. Oleh sebab itu, banyak tenaga

kerja yang tidak memenuhi kriteria yang disyaratkan perusahaan.⁵⁹

- 5) Pengangguran voluntary
Pengangguran Voluntary yaitu pengangguran yang terjadi karena seseorang yang sebenarnya masih mampu bekerja tetapi secara sukarela tidak mau bekerja dengan alasan merasa sudah mempunyai kekayaan yang cukup.
- 6) Pengangguran Teknologi
Pengangguran Teknologi yaitu pengangguran karena adanya pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin.
- 7) Pengangguran Potensial (potential underemployment)
Pengangguran Potensial (potential underemployment), adalah pengangguran yang terjadi apabila para pekerja dalam suatu sektor dapat ditarik ke sektor lain tanpa mengurangi output, hanya harus diikuti perubahan-perubahan fundamental dalam metode produksi, misalnya perubahan dari tenaga manusia menjadi tenaga mesin (mekanisasi).
- 8) Pengangguran Konjungtur/siklis
Pengangguran konjungtur/siklis (cyclical unemployment) adalah pengangguran yang berkaitan dengan turunnya kegiatan perekonomian suatu negara. Pada masa resesi, tingkat pengangguran siklis akan semakin meningkat karena dua faktor yakni jumlah orang yang kehilangan pekerjaan terus meningkat dan dibutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk mendapatkan pekerjaan.⁶⁰

⁵⁹ Suhandi, Hendra Wijayanto, and Samsul Olde, "Dinamika Permasalahan Ketenagakerjaan Dan Pengangguran Di Indonesia."2020.

⁶⁰ Vega Falcon Dr. Vladimir, "Gastronomia," *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local*. 1, no. 69 (1967): 5–24.

3. Penyebab Pengangguran di Indonesia

Pengangguran adalah suatu masalah ekonomi yang sampai saat ini belum menemukan solusi yang baik untuk menghapuskan masalah pengangguran khususnya di Indonesia. Pengangguran bukan hanya terjadi di Indonesia melainkan banyak Negara berkembang lainnya yang harus berhadapan dengan masalah pengangguran ini. Untuk mengurangi angka pengangguran ini harusnya ada kerja sama yang baik antara pemerintah, lembaga pendidikan dan juga masyarakat disuatu Negara. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pengangguran yakni sebagai berikut:

- a. Terbatasnya lapangan pekerjaan yang menampung para pencari kerja. Banyaknya para pencari kerja tidak sebandung dengan lapangan pekerjaan yang tersedia khususnya yg dimiliki oleh negara Indonesia.
- b. Kurangnya keahlian yang dimiliki oleh para pencari pekerja. Banyaknya sumber daya manusia yang ada di Indonesia tidak memiliki keahlian sesuai dengan apa yang dibutuhkan di dunia pekerjaan sehingga terkadang para pencari kerja sulit untuk mendapatkan pekerjaan dan semakin menambah banyaknya angka pengangguran yang ada di Indonesia.
- c. Kurangnya informasi, dimana banyaknya para pencari kerja yang tidak tahu atau bahkan tidak mengerti dimana mereka bias mendapatkan informasi tentang pekerjaan, yang bisa disebabkan banyak hal.
- d. Kurang meratanya lapangan pekerjaan yang tersedia, contoh nyata nya adalah banyaknya lapangan pekerjaan lebih banyak di daerah perkotaan daripada daerah pedesaan sehingga para pencari kerja yang ada di desa kesulitan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan sehingga

- menambah semakin banyaknya angka pengangguran yang ada.
- e. Pemerintah belum melaksanakan upaya pengurangan pengangguran secara maksimal contohnya saja masih kurang maksimalnya pelatihan pembekalan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan.
 - f. Budaya malas yang masih menjadi penghalang besar bagi para pencari pekerjaan sehingga mereka mengalami ketertinggalan dalam mendapatkan informasi tentang lapangan pekerjaan yang tersedia dan masyarakat memiliki sifat mudah menyerah dalam mencari pekerjaan.⁶¹

Menurut Teori Keynes menjelaskan bahwa masalah pengangguran timbul disebabkan oleh adanya permintaan agregat yang rendah. Permintaan agregat merupakan seluruh permintaan terhadap barang dan jasa yang terjadi dalam suatu perekonomian. Ketika penawaran tenaga kerja mengalami peningkatan maka upah akan turun dan penurunan upah tersebut akan mengakibatkan kerugian bukan menguntungkan karena penurunan upah tersebut menggambarkan daya beli masyarakat terhadap suatu barang. Daya beli masyarakat yang merupakan salah satu indikator dalam IPM yang rendah akan mengakibatkan perusahaan menurunkan jumlah produksinya dan tidak dapat menyerap kelebihan tenaga kerja sehingga permintaan dan

⁶¹ Riska Franita, "Analisa Pengangguran Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 1, no. 3 (2016): 88–93.

penawaran tenaga kerja hampir tidak pernah seimbang dan pengangguran sering terjadi.⁶²

D. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi islam sebenarnya telah muncul sejak islam itu dilahirkan. Ekonomi islam lahir bukanlah karena disiplin ilmu tersendiri melainkan bagian Integral dari agama islam. Sebagai ajaran hidup yang lengkap, islam memberikan petunjuk terhadap semua aktivitas manusia, termasuk ekonomi. Sejak abad ke-8 telah muncul pemikiran-pemikiran ekonomi islam secara parsial, misalnya peran Negara dalam ekonomi, kaidah berdagang, mekanisme pasar, dan lain-lain tetapi pemikiran secara komprehensif terhadap system ekonomi islam sesungguhnya baru muncul pada pertengahan abad ke-20 dan semakin marak sejak dasawarsa terakhir.

Berbagai ahli ekonomi muslim memberika definisi ekonomi islam yang bervariasi, tetapi pada dasarnya mengandung makna yang sama. Pada intinya ekonomi islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan pada akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara yang islami. Yang dimaksudkan dengan cara-cara yang islami disini adalah cara-cara yang didasarkan atas ajaran agama islam, yaitu Al Qur'an dan sunnah nabi. Dengan pengertian seperti ini maka istilah yang juga sering digunakan adalah ekonomi islam.⁶³

Dalam pandangan islam, ilmu pengetahuan adalah suatu cara yang sistematis yang digunakan untuk memecahkan masalah kehidupan manusia yang mendasarkan segala aspek tujuan (ontologis), metode

⁶² Dwi Mahroji and Iin Nurkhasanah, "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Banten," *Jurnal Ekonomi-Qu* 9, no. 1 (2019).

⁶³ Agung Eko Purwana, "Pembangunan Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Justicia Islamica* 10, no. 1 (2013).

penurunan kebenaran ilmiah (epistemologis), dan nilai-nilai (aksiologis) yang terkandung pada ajaran islam. Secara singkat, ekonomi islam dimaksudkan untuk mempelajari upaya manusia untuk mencapai *falah* dengan sumber daya yang ada melalui mekanisme pertukaran. Penurunan kebenaran atau hukum dalam ekonomi islam didasarkan pada pendekatan deduktif wahyu ilahi (ayat *qauliyah*) yang didukung oleh kebenaran induktif- empiris (ayat *kauniyah*). Ekonomi islam juga terikat oleh nilai-nilai yang diturunkan dari ajaran islam itu sendiri.

Beberapa ekonom memberikan penegasan bahwa ruang lingkup dari ekonomi islam adalah masyarakat muslim atau Negara muslim sendiri. Artinya, ia mempelajari perilaku ekonomi dari masyarakat atau Negara muslim dimana ajaran nilai-nilai islam dapat diterapkan. Namun, pendapat lain tidak memberikan pembatasan seperti ini, melainkan lebih kepada penekanan terhadap perspektif ekonomi islam tentang masalah ekonomi pada umumnya. Dengan kata lain, titik tekan ilmu ekonomi islam adalah pada bagaimana islam memberikan pandangan dan solusi atas berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi umat manusia secara umum. Untuk memberikan pengertian yang lebih jelas maka berikut disampaikan definisi ekonomi islam dari beberapa ekonom muslim terkemuka saat ini.

- a. Ekonomi islam merupakan ilmu ekonomi yang diturunkan dari ajaran Al Qur'an dan sunnah. Segala bentuk pemikiran ataupun praktik ekonomi yang tidak bersumberkan dari Al-Qur'an dan sunnah tidak dapat dipandang sebagai ekonomi islam⁶⁴. Dalam hal ekonomi islam akan dipandang lebih bersifat normatif ketika perkembangan ilmu ekonomi islam belum

⁶⁴ Anwar Abbas, "Sistem Ekonomi Islam: Suatu Pendekatan Filsafat, Nilai-Nilai Dasar, Dan Instrumental," *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 4, no. 1 (2016).

didukung oleh praktik. Dalam hal ini ekonomi islam dianggap tidak memiliki kelemahan dan selalu dianggap benar. Kegagalan dalam memecahkan masalah ekonomi empiris dipandnag bukan sebagai kelemahan ekonomi islam, melainkan kegagalan ekonom dalam menafsirkan Al-Qur'an dan sunnah. Beberapa ekonomi muslim yang cenderung menggunakan definisi dan pendekatan ini adalah hazanuzzaman (1984) dan metwally (1995).

- b. Ekonomi islam merupakan implementasi system etika islam dalam kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk pengembangan moral masyarakat. Dalam hal ini, ekonomi islam bukanlah sekedar memberikan justifikasi hokum terhadap fenomena ekonomi yang ada, namun lebih menekankan pada pentingnya spirit islam dalam setiap aktivitas ekonomi. Perbedaan pandangan muncul dalam mengidentifikasi spirit dasar islam yang terkait dengan ekonomi. Spirit inilah yang kemudian menjadi dasar penurunan ilmu ekonomi. Beberapa ekonom yang menggunakan pendekatan ini adalah Mannan (1993), Ahmad (1992), dan Khan (1994).
- c. Ekonomi islam merupakan representasi perilaku ekonomi umat muslim untuk melaksanakan ajaran islam secara menyeluruh. Dalam hal ini, ekonomi islam tidak lain merupakan penafsiran dan praktik ekonomi yang dilakukan oleh umat islam yang tidak bebas dari kesalahan dan kelemahan. Analisis ekonomi setdaknya dilakukan dalam tiga aspek, yaitu norma dan nilai-nilai dasar islam, batasan ekonomi dan status hokum, dan aplikasi dan analisis sejarah. Beberapa ekonom yang menggunakan pendekatan ini adalah Siddiqie (1992) dan Naqvi (1994).
- d. Beberapa ekonom muslim mencoba mendefinisikan ekonomi islam lebih komprehensif ataupun menggabungkan anatar definisi-definisi yang telah ada.

Seperti berbagai pendekatan dapat digunakan untuk mewujudkan ekonomi islam, baik pendekatan historis, empiris ataupun teoretis.⁶⁵ Namun demikian, pendekatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia sebagaimana yang dijelaskan oleh islam, yaitu *falah*, yang bermaknakan kelangsungan hidup, kemandirian, dan kekuatan untuk hidup.

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi islam bukan hanya merupakan praktik kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu dan komunitas muslim yang ada, namun juga merupakan perwujudan perilaku ekonomi yang didasarkan pada ajaran islam. Ia mencakup cara memandang permasalahan ekonomi, menganalisis, dan mengajukan alternative solusi atas berbagai permasalahan ekonomi. Ekonomi islam merupakan konsekuensi logis dari implementasi ajaran islam secara *kaffah* dalam aspek ekonomi. Oleh karena itu, perekonomian islam merupakan suatu tatanan perekonomian yang dibangun atas nilai-nilai dasar ajaran islam yang diharapkan, yang belum tentu tercermin pada perilaku masyarakat muslim yang ada pada saat ini.

Ekonomi islam mempelajari perilaku individu yang dituntun oleh ajaran islam, mulai dari penentuan tujuan hidup, cara memandang dan menganalisis masalah ekonomi, serta prinsip-prinsip dan nilai yang harus dipegang untuk mencapai tujuan tersebut. Ekonomi islam berbeda dengan ekonomi konvensional tidak hanya dalam aspek penyelesaian masalah, namun juga dalam aspek cara memandang dan analisis terhadap permasalahan ekonomi. Ekonomi islam melingkupi pembahasan atas perilaku ekonomi manusia yang sadar dan berusaha untuk mencapai *masalah* atau *falah*, yang disebut sebagai

⁶⁵ Wildan and Wildan, "Sistem Ekonomi Islam Simbol Kesejahteraan Masyarakat."2018.

Islamic man. Dalam hal ini, perilaku ekonomi meliputi solusi yang diberikan atas tiga permasalahan mendasar tersebut di atas dan masalah-masalah turunannya.

2. Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan ekonomi islam tidak bisa dilepaskan dari tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini. ini karena, kegiatan berekonomi tidak bias dipisahkan dari aktivitas manusia di muka bumi. Inilah mengapa islam juga menatur segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam berekonomi.⁶⁶

Di dalam islam, pencapaian tujuan ekonomi selaras dengantujuan syariat islam itu sendiri (maqashid syariah), yaitu mencapai maslahat untuk kebahagiaan dunia dan akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (hayyatan thayyiban) tujuan ini dapat dicapai dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia, atau dengan mengusahakan aktivitas yang secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan itu sendiri. Kemaslahatan ekonomi juga dapat diraih dengan menghindarkan diri dari segala hal yang membawa mafsadah bagi manusia. Tujuan akhir penerapan ekonomi islam adalah mewujudkan falah (kesejahteraan) masyarakat secara umum. Falah adalah kesuksesan hakiki berupa pencapaian kebahagiaan dari segi material dan spiritual serta tercapainya kesejahteraan di dunia dan akhirat. Berkaitan dengan ini dalam Q.S al-baqarah [2]: 201, Allah SWT berfirman:

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً
وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Terjemahan Kemenag 2019

⁶⁶ Abdul Latif et al., “Nilai-Nilai Dasar Dalam Membangun Ekonomi Islam,” 2021, 153–69.

201. *Di antara mereka ada juga yang berdoa, “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta lindungilah kami dari azab neraka.”*

Falah dapat terwujud jika terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang. Terpenuhinya kebutuhan tersebut akan mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Di dalam Al-Qur'an, malahat sering juga disebut dengan istilah manfaat, atau manafi' yang berarti kebaikan yang terkait dengan material, fisik, dan psikologis hal-hal indrawi lainnya. Masalah sering juga diungkap dengan istilah lain seperti hikmah, huda dan barakah yang berarti imbalan baik yang dijanjikan oleh Allah SWT di dunia maupun di akhirat. Jadi, masalah adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun spiritual, yang mampu memberikan kemanfaatan dunia maupun akhirat.

Implementasi aturan syariah dan akhlak yang baik diharapkan akan menghasilkan suatu fenomena kebersamaan dalam melaksanakan kegiatan muamalah yang mengutamakan kesejahteraan bersama dalam setiap pencapaian tujuan ekonomi. Kemaslahatan dalam bidang ekonomi sebagaimana yang dimaksudkan diatas akan tercapai jika hal-hal berikut terwujud:

- a. Kesejahteraan Ekonomi dengan berpegang pada norma moral. Didalam kerangka usaha agar masing-masing individu dalam lingkungan ekonomi bisa mewujudkan kerja dan kemaslahatan dengan sebaik-baiknya itulah maka kita membutuhkan aturan-aturan baju yang kita pahami sebagai aturan syariah. Denagn kata lain syariah mempunyai tujuan untuk mewujudkan agar setiaporang bisa memenuhi kebutuhannya dan menghindarkan diri dari segala kesengsaraan, baik kesengsaraan dunia maupun kesengsaraan akhirat.
- b. Persaudaraan dan Keadilan
Manusia berasal dari satu ayah dan satu ibu. Berbagai jenis suku bangsa yang ada di dunia ini, dari berbagai

warna kulit, badan, rupa, keturunan, semuanya (sebenarnya) merupakan satu keluarga besar dari Ayah (Adam as) dan Ibu (Hawa) yang sama. Di antara mereka, entah yang kaya raya atau yang hidup kekurangan, yang cerdas luar biasa ataukah yang mengalami keterbelakangan, yang punya kuasa ataukah rakyat jelata, tidak ada yang lebih mulia, kecuali di antara mereka yang paling bertakwa, sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
خَبِيرٌ

Terjemahan Kemenag 2019

13. *Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.*

Di dalam islam, keadilan bersifat imparisial terhadap semua orang dan golongan dengan mengesampingkan emosional yang diakibatkan oleh persepsi tertentu dari individu maupun golongan tertentu. Dalam konteks ekonomi, keadilan ditegakkan dengan praktik ekonomi yang mementingkan kepentingan semua golongan, tidak saling merugikan, saling eksploitasi dan berbuat kecurangan dalam melakukan kegiatan ekonomi.⁶⁷

Salah satu bentuk keadilan ekonomi dalam islam adalah pola hubungan antara pekerja dengan atasannya bekerja. Setiap pekerja berhak atas upahnya dengan

⁶⁷ Abu Bakar, "Konsep Dasar Ekonomi Islam Ditengah Konservatisme Pemikiran Ekonomi Modern Di Indonesia," *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 4, no. 1 (2020): 84-94.

segera atas kerja yang mereka berikan. Selain itu, pemberi pekerjaan dilarang keras mengeksploitasi pekerja, dan membebani pekerja dengan sesuatu di luar kemampuannya. Rasulullah SAW mengatakan bahwasannya setiap pekerja berhak atas upah atau imbal jasa yang setara dengan kontribusi mereka dalam pekerjaan yang mereka lakukan.

c. Kesetaraan Distribusi Pendapatan

Di dalam konsep tauhid disebutkan bahwa segala sesuatunya yang kita miliki dan yang ada di dunia ini, baik itu berupa harta benda kita, bumi, alam, bahkan pekerjaan dan kecerdasan yang ada pada setiap individu pada hakikatnya adalah milik Allah SWT yang dititipkan kepada manusia untuk mengusahakannya agar dapat memberi manfaat. Hal ini berimplikasi bahwa tidak alasan apa pun untuk menahan sumber daya yang diberikan Allah SWT tersebut hanya kepada sebagian golongan saja. Dalam konteks ini, syariat Islam menekankan terjadinya keadilan distribusi dan menyediakan sebuah sistem untuk terwujudnya keadilan distribusi pendapatan, dengan harapan bahwa setiap individu mendapatkan jaminan untuk bisa memperoleh standar kehidupannya secara baik dan terhormat. Islam menganjurkan diciptakannya sistem sosial kemasyarakatan agar dapat menjamin setiap warga masyarakat mendapatkan standar kehidupan yang layak dan terhormat.

Sebuah sistem yang disediakan oleh Islam dalam kaitannya untuk terjadinya redistribusi kekayaan ini terdiri atas:

- 1) Memberikan bantuan dan memfasilitasi setiap orang untuk bisa mendapatkan kesempatan kerja yang baik sesuai dengan kapabilitas dan kapasitasnya masing-masing, serta memberikan upah pekerja dengan segera bagi mereka yang mempunyai pekerja pada mereka.

- 2) Memungut zakat dari golongan kaya untuk didistribusikan kepada golongan miskin untuk memenuhi kebutuhan minimum atau meningkatkan taraf kehidupannya. Dengan sistem zakat inilah akan terbentuk perputaran kekayaan sehingga tidak akan ada penumpukan harta di sebagian golongan saja.
- 3) Pembagian harta dari mereka yang meninggal dunia (waris). Dengan nisbah yang telah diatur oleh syariat, pembagian warisan akan mendistribusikan kekayaan orang yang sudah meninggal ke banyak golongan, dan tidak hanya mengalir ke satu orang saja.⁶⁸

3. Nilai-nilai Dasar Ekonomi Islam

Nilai-nilai ini merupakan sisi normative dari ekonomi islam yang berfungsi mewarnai atau menjamin kualitas perilaku ekonomi setiap individu. Misalnya saja kita sebagai orang islam mebayar zakat namun diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan hati penerima zakat, maka amalan zakat tersebut tidak dinilai ibadah atau mendapatkan imbalan baik dihadapan Allah. Amalan zakat harus diikuti dengan nilai-nilai kesopanan saat mendistribusikannya dan juga membayarnya, conthnya dengan tidak mengungkit-ngungkit zakat yang telah kita bayarkan, menncela dan melakukan hal yang tidak terpuji lainnya.

Oleh karena itu implementasi nilai-nilai harus didaarkan atas prinsip-prinsip ekonomi. Prinsip inilah yang akan membuta ekonomi islam menjadi lebih kuat lagi dan dinamis, dan nilailah yang berguna untuk mewarnai kualitas bangunan tersebut.⁶⁹

a. keadilan

Keadilan yaitu memberikan setiap hak kepada para pemiliknya masing-masing tanpa melebihi

⁶⁸ Etc. Azharsyah, *Pengantar Ekonomi Islam*, 2021.

⁶⁹ Latif et al., "Nilai-Nilai Dasar Dalam Membangun Ekonomi Islam."2021.

dan mengurangi. dalam sistem ekonomi Islam, hal itu menjadi otoritas dan kewenangan Tuhan. Allah SWT berfirman dalam Al'Qur'an surah Asy-Syura ayat 17:

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ
السَّاعَةَ قَرِيبٌ

Terjemahan Kemenag 2019

17. Allah yang menurunkan Kitab (Al-Qur'an) dengan benar dan (menurunkan) timbangan (keadilan). Tahukah kamu (bahwa) boleh jadi hari Kiamat itu sudah dekat?

Konsekuensi konsep ini dalam kehidupan tentu akan menimbulkan perbedaan. Misalnya dalam sistem sosialisme-komunisme yang menjadikan kebersamaan dan kesama-rataan sebagai nilai utama, maka kebutuhan dijadikan dasar untuk menentukan sesuatu itu adil atau tidak. mereka berpendapat bahwa suatu masyarakat akan dikatakan adil jika kebutuhan semua warganya terpenuhi, seperti kebutuhan akan sandang, pangan, (dan) papan. Jika hal itu tidak terjadi maka berarti telah terjadi praktik kezaliman. Sementara dalam Islam keadilan dilihat dari sisi kesesuaian dan ketidaksesuaiannya dengan ajaran agama seperti yang telah digariskan di dalam Alquran dan Sunah. Oleh karena itu, kepedulian kepada orang yang miskin dan tertindas dalam Islam akan dilihat sebagai sebuah praktik keadilan karena hal demikian diperintahkan oleh agama (Q.s. al-Tawbah [9]: 61).

وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنٌ خَيْرٌ
لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ
وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahan Kemenag 2019

61. Di antara mereka (kaum munafik) ada orang-orang yang menyakiti Nabi (Muhammad) dan mengatakan, "Dia adalah telinga (yang menampung

dan memercayai semua apa yang didengarnya tanpa seleksi.” Katakanlah, “(Nabi Muhammad adalah) telinga yang baik bagi kamu, dia beriman kepada Allah, memercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu.” Orang-orang yang menyakiti Rasulullah bagi mereka azab yang sangat pedih. Sementara mengabaikan hal itu merupakan sebuah praktik kezaliman (Q.s. al-Mâ’ûn [107]:1-3).⁷⁰

Dengan berbagai macam arti adil tersebut, secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana terdapat kesamaan perlakuan di mata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan dan tidak adanya pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Berdasar muatan makna adil yang ada dalam Al-Qur’an sebagaimana disebut diatas maka bisa diturunkan berbagai nilai turunan yang berasal darinya sebagai berikut.

1) Persamaan kompensasi

Pesamaan kompensasi adalah pengertian adil yang paling umum, yaitu bahwa seseorang harus memberikan kompensasi yang sepadan kepada pihak lain sesuai dengan pengorbanan yang telah dilakukan inilah yang menimbulkan hak pada seseorang yang telah melakukan pengorbanan untuk memperoleh balasan yang seimbang dengan pengorbanannya.

2) Persamaan Hukum

Persamaan hukum berarti setiap orang harus diperlakukan sama di depan hukum. Tidak boleh ada perbedaan terhadap seseorang di depan hukum atas dasar apapun. Dalam kegiatan

⁷⁰ Abbas, “Sistem Ekonomi Islam: Suatu Pendekatan Filsafat, Nilai-Nilai Dasar, Dan Instrumental.”2016.

ekonomi setiap orang harus diperlakukan sama dalam setiap aktivitas maupun transaksi ekonomi. Tidak ada alasan untuk melebihkan hak suatu golongan atas golongan yang lainnya hanya karena kondisi yang berbeda dari kedua golongan tersebut.

3) Moderat

Moderat di sini dimaknai sebagai posisi tengah-tengah. Nilai adil di sini dianggap telah diterapkan seseorang jika orang yang bersangkutan mampu memosisikan dirinya dalam posisi di tengah. Hal ini memberikan suatu implikasi bahwa seseorang harus mengambil posisi di tengah dalam arti tidak mengambil keputusan yang terlalu memperberat ataupun keputusan yang terlalu memperingan, misalnya dalam hal pemberian kompensasi.

4) Proporsional

Adil tidak selalu diartikan sebagai kesamaan hak, namun hak ini disesuaikan dengan ukuran setiap individu atau proporsional, baik dari sisi tingkat kebutuhan, kemampuan, pengorbanan, tanggung jawab, ataupun kontribusi yang diberikan oleh seseorang. Proporsional tidak saja berkaitan dengan konsumsi, namun juga pada distribusi pendapatan. Suatu distribusi yang adil tidak selalu harus merata, namun perlu tetap memerhatikan ukuran dari masing-masing individu yang ada; mereka yang ukurannya besar perlu memperoleh besar dan yang kecil memperoleh jumlah yang kecil pula.⁷¹

⁷¹ Latif et al., "Nilai-Nilai Dasar Dalam Membangun Ekonomi Islam."2021.

b. *Khalifah*

Khilafah merupakan representasi bahwa manusia adalah pemimpin (khalifah) di dunia ini dengan dianugerahi seperangkat potensi mental dan spiritual oleh Allah SWT, serta disediakan kelengkapan sumberdaya alam atau materi yang dapat dimanfaatkan dalam rangka untuk sustainabilitas atau keberlangsungan hidupnya. Sehingga kosep khilāfah ini melandasi prinsip kehidupan kolektif manusia atau hablum minannas dalam Islam. Fungsi utamanya adalah untuk menjaga keteraturan interaksi (mu'amalah) antar pelaku ekonomi dan bisnis, agar dapat meminimalisir kekacauan, persengketaan, dan keributan dalam aktivitas mereka.

Implikasi dari prinsip khilāfah dalam aktivitas ekonomi dan bisnis adalah: persaudaraan universal, kepercayaan bahwa sumber daya adalah amanah, kewajiban agar berpola hidup hemat dan sederhana, dan setiap individu memiliki kebebasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan kebebasan tersebut dibatasi dengan kebebasan antar sesama manusia sebagai wujud dari hablum minannas. Semua itu dalam rangka untuk mencapai tujuan syariah (maqāshid as-syariah), yang mana maqāshid as-syariah dalam perspektif Al-Ghazali adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan manusia. Hal ini dicapai dengan menjaga atau melindungi agama (hifzu ad-din), jiwa (hifzu an-nafs), akal (hifzu al-'aql), keturunan (hifzu an-nasl), dan harta manusia (hifzu al-māl).⁷²

Nilai khilafah secara umum berarti tanggung jawab sebagai pengganti atau utusan Allah di alam semesta. Manusia diciptakan Allah untuk menjadi

⁷² Nurul Fahmi, "Norma Dan Nilai Dalam Ilmu Ekonomi Islam," *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 11, no. 1 (2019): 105–23.

Khalifah di muka bumi, yaitu menjadi wakil Allah untuk memakmurkan bumi dan alam semesta. Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental-spiritual dan materiil untuk memungkinkannya hidup dan mengemban misi-Nya secara efektif. Manusia juga telah disediakan segala sumber daya memadai bagi pemenuhan kebutuhan kebahagiaan bagi manusia seluruhnya seandainya digunakan secara efisien dan adil. Konsep khilafah dapat dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai pengertian, namun pengertian umumnya adalah amanah dan tanggung jawab manusia terhadap apa-apa yang telah dikuasakan kepadanya, dalam bentuk sikap dan perilaku manusia terhadap Allah, sesama, dan alam semesta.

Dalam makna sempit, khilafah berarti tanggung jawab manusia untuk mengelola sumber daya yang dikuasakan Allah kepadanya untuk mewujudkan mashlahah yang maksimum dan mencegah kerusakan di muka bumi. Untuk mewujudkan nilai khilafah ini manusia telah diberi oleh Allah berupa hak penguasaan-pemilikan, hak pengelolaan sumber daya dan kebebasan untuk memilih dan berkreasi untuk mengemban amanahnya. Makna khilafah dapat dijabarkan lebih lanjut menjadi beberapa pengertian sebagai berikut:

- 1) Tanggung jawab berperilaku ekonomi dengan cara yang benar Suatu usaha pemilikan, pengelolaan ataupun pemanfaatan sumber daya yang tidak benar akan bisa membuat kerusakan pada lingkungan baik kerusakan yang dampaknya langsung maupun kerusakan yang baru akan dirasakan akibatnya setelah beberapa dekade kemudian. Bentuk pengelolaan yang tidak benar dalam Islam diartikan sebagai setiap bentuk pengelolaan yang berdampak pada

kemubazdiran dan pengrusakan ataupun cara pengelolaan yang bertentangan dengan syariah Islam, seperti perjudian, penyuapan (bribery), prostitusi, dan sebagainya. Secara praktis, manusia diwajibkan untuk mengikuti semua petunjuk-petunjuk Allah dan menjauhi semua larangan-larangan-Nya dalam memanfaatkan sumber daya tersebut.

- 2) Tanggung jawab untuk mewujudkan masalah maksimum Dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi, nilai yang digariskan Islam adalah memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kehidupan manusia sebagai sarana terciptanya kesejahteraan Adanya hambatan yang menyebabkan sekelompok manusia dari kalangan tertentu menguasai atau memonopoli pemanfaatan sumber daya ekonomi harus dicegah. Juga harus dicegah adanya hambatan struktural yang menghalangi sekelompok manusia untuk ikut memperoleh manfaat dari sumber daya ekonomi, terutama sumber daya ekonomi vital yang menentukan kelangsungan hidup manusia.
- 3) Tanggung jawab perbaikan kesejahteraan setiap individu Perbedaan rizki dari Allah merupakan kehendak Allah semata. Allah telah mengetahui ukuran yang tepat bagi masing-masing hambaNya. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh menjadi unsur yang memicu kekacauan. Hal ini bisa diwujudkan jika kesejahteraan tidak dimonopoli oleh sekelompok orang. Mereka yang memperoleh kelebihan rizki bertanggung jawab untuk memberikan sebagian dari rizkinya kepada pihak lain yang sedikit jumlah rizkinya."

c. *Takaful*

Ekonomi Islam mewajibkan *takaful* (saling menanggung) diantara anggota masyarakat. Islam mengajarkan bahwa seluruh manusia adalah bersaudara. Sesama orang Islam adalah saudara dan belum sempurna iman seseorang sebelum ia mencintai saudaranya melebihi cintanya pada diri sendiri.⁷³ Hal inilah yang mendorong manusia untuk mewujudkan hubungan yang baik di antara individu dan masyarakat melalui konsep penjaminan oleh masyarakat atau *takaful*. Jaminan masyarakat (*social insurance*) ini merupakan bantuan yang diberikan masyarakat kepada anggotanya yang terkena musibah atau masyarakat yang tidak mampu. Jaminan masyarakat ini tidak saja bersifat material, melainkan juga bersifat *ma'nawiy* (*nonmateri*). Konsep *Takaful* ini bisa dijabarkan lebih lanjut menjadi sebagai berikut:

- 1) Jaminan terhadap pemilikan dan pengelolaan sumber daya oleh individu memiliki dan mengembangkan sumber daya ekonomi. Oleh karena Setiap individu dalam pandangan Islam mempunyai hak untuk itu, tidak diperbolehkan memonopoli suatu barang atau sumber daya ekonomi untuk kepentingan pribadi. Sebagaimana Allah jelaskan bahwa setiap individu manusia adalah Khalifah Allah di bumi dan sumber daya alam ini diciptakan untuk kesejahteraan manusia, Setiap individu juga harus dijamin mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan lapangan kerja (pemilikan dan penge lolaan tenaga kerja) dan pemanfaatan sumber daya alam yang dikuasainya.

⁷³ Muhammad Aswad, "Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam – ISSN 2089-7227 (p) 2598-8522 (E)," *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam* 6, no. 1 (2021): 1–22.

- 2) Jaminan setiap individu untuk membangun keluarga sakinah Keluarga merupakan elemen inti dari wujudnya masyarakat. Dalam pandangan Islam, masyarakat bukan sekadar hasil perkumpulan dari individu-individu, namun masyarakat dibangun secara hierarkis oleh individu, keluarga, masyarakat, negara, dan umat sedunia. Masyarakat yang sejahtera hanya akan terwujud oleh keluarga- keluarga yang sakinah. Sakinah dalam hal ini dimaknai sebagai keluarga yang dibangun dengan tujuan dan proses benar. Setiap individu harus mendapatkan jaminan untuk membentuk keluarga sakinah, baik dari mulai memilih jodoh yang terbaik, menikah, dan memiliki serta membangun keturunan yang baik.
- 3) Jaminan setiap individu untuk menikmati hasil pembangunan atau output Setiap individu memiliki hak untuk hidup secara baik dan mulia, menikmati sumber daya ciptaan Allah tetap dengan berpegang pada nilai keseimbangan dan masyarakat yang harmoni.'Sekecil apa pun hasil pembangunan yang diperoleh oleh suatu masyarakat harus didistribusikan kepada setiap anggotanya.
- 4) Jaminan untuk amar ma'ruf nahi munkar Amar ma'ruf nahi munkar merupakan kewajiban bagi setiap individu Muslim dalam menjalani kehidupan di dunia, yaitu kewajiban untuk mendorong orang lain berbuat kebaikan dan mencegah manusia dari berbuat keburukan. Dengan konsep ini manusia secara individu atau kelompok akan berusaha untuk mewujudkan

kehidupan yang baik dan menjauhkan hal-hal yang dilarang Allah dari kehidupannya.⁷⁴

E. Pengangguran Dalam Prespektif Ekonomi Islam

Salah satu faktor ekonomi penyebab kemiskinan yang melanda Negara tercinta kita, yakni makin meningkatnya angka pengangguran. Pengangguran adalah masalah yang paling berat, karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya masalah-masalah sosial lainnya. Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Teori tentang pengangguran dalam khazanah ekonomi Islam sangat penting karena pengangguran adalah masalah ekonomi yang sangat serius. Maka sangat perlu untuk membangun teori tentang pengangguran dari pakar pemikir Ekonomi Islam di abad pertengahan semisal Ibnu Khaldun yang konsep-konsepnya dipakai oleh pakar ekonomi modern.

Pengertian pengangguran sebagaimana yang ada dalam ekonomi konvensional yang membatasi pengangguran hanya pada pencari kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan, adalah definisi yang sangat sempit bila dilihat dari kaca mata islam. Karena islam memandang istilah kerja sangat umum yakni menyangkut segala aktifitas kegiatan manusia baik yang bersifat badaniah maupun rohaniah yang dimaksudkan untuk mewujudkan atau menambah suatu manfaat yang dibolehkan oleh syariat islam. Dalam konsep islam bekerja merupakan suatu kewajiban agama yang menyeluruh atas setiap muslim yang masih memiliki kemampuan, kesehatan untuk bekerja

⁷⁴robi, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (CV. Adanu Abimata, 2020).

demi mendapatkan kebahagiaan individu, keluarga dan masyarakat.⁷⁵

Islam memandang bahwasannya pengangguran adalah sesuatu yg buruk dan tidak baik bagi seorang muslim karena dalam agama islam memberikan arahan kepada penganutnya untuk setiap individu bekerja. Bekerja adlah salah satu tuntunan yang utama dalam agama islam yang perlu untuk dilakukan dan diwujudkan. Islam juga merupakan agama yang selalu mendukung setiap individu muslim unuk bekerja dan apabila mampu untuk melakukan kegiatan prodksi yang menghasilkan dan menciptakan lapanganpekerjaan khususnya untuk sesama umat islam. Karena pekerjaan dan lapangan pekerjaan ada dua hal yang saling memiliki keterkaitan dan tdak dapat dipisahkan. Maka karena itu ketika seseorang dapat berinovasi menciptakan lapangan pekerjaan maka mereka akan mampu mengurangi pengangguran yang ada. Islam juga adalah agama yang sebisa mungkin mengarahkan umatnya untuk tidak menjadi penganggurann alias bekerja dan memiliki penghasilan. Karena ketika seorang muslim tidak memiliki pekerjaan maka mereka tidak memiliki penghasilan maka mereka bias menjadi miskin. Karena ditakutkn karena miskin seseorang rela melakukan apa saja yang bisa saja merugikan diri sendiri dan orang lain untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, ada sebuah hadis yang mangatakan“ kemiskinan akan mendekatkan kepada kekufuran”. Namun kenyataan yang ada ekarang pengangguran yang ada di Negara yang mayoritas muslim atau Negara islam lebih tinggi angka penganggurannya daripada Negara non-muslim.⁷⁶

⁷⁵ Aswad, “Asy Syar’iyyah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Perbankan Islam – ISSN 2089-7227 (p) 2598-8522 (E).”2021.

⁷⁶ Tetti Maisyaroh, “Inflasi Dan Pengangguran Dalam Islam Inflation And Unemployment In Islam” 7, no. 1 (2023): 1–5.

BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Siswo Bangun

Pada jaman dahulu kampung siswo bangun terkenal dengan hasil perkebunan singkong dan jagung. Tanah di desa siswo bangun sangat subur, sehingga kehidupan masyarakat kampung pun bias dikatakan makmur.

Asal mula pemberian nama kampung ini bermula dari musyawarah yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dan adat. Dari musyawarah yang dilakukan tersebut diambil kesepakatan bahwa kampung ini diberi nama Kampung Siswo Bangun.

Berikut adalah silsilah kepemimpinan kampung:

- Bp. Muhammad Khusnan 1960 s/d 1963
- Bp. Murdo Asmoro 1963 s/d 1966
- Bp. Suhardi 1966 s/d 1974
- Bp. Sarhono Saleh 1974 s/d 1982
- Bp. Katijan 1982 s/d 1990
- Bp. Mujiman 1990 s/d 1991
- Bp. M Kasidi 1991 s/d 1999
- Bp. Mujiman 1999 s/d 2000
- Bp. Wayan Suje 2000 s/d 2006
- Bp. Saino 2006 s/d 2018
- Bp. Masadi 2019 s/d sekarang

2. Kondisi Geografis

Kampung siswo bangun memiliki luas wilayah 1.350 ha dengan perincian sebagai berikut. Letak Kampung berada di sebelah Barat yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Lampung Tengah, jarak dari

Kampung Siswo Bangun ke Kampung Tetangga sekitar 100 km, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara: Kampung Sumber Baru Kecamatan Seputih Banyak

Sebelah Timur: Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak

Sebelah Selatan: Kabupaten Lampung Timur

Sebelah Barat: Kampung Setia Bumi Kecamatan Seputih Banyak

3. Kondisi Perekonomian

Jumlah penduduk Kampung Siswo Bangun Sebanyak 4295 jiwa dengan penduduk usia produktif 3000 jiwa, sedangkan penduduk yang dikategorikan miskin 700 jiwa. Mata pencaharian sebagian penduduk adalah petani sedangkan hasil produksi ekonomi kampung yang menonjol adalah singkong.

Table 3.1

Jumlah Penduduk

NO	PENDUDUK	JUMLAH
1.	Jumlah Laki-Laki	2173 orang
2.	Jumlah Perempuan	2122 orang
3.	Jumlah Total	4295 orang
4.	Jumlah Kepala Keluarga	1310KK
5.	Jumlah RT	26 RT
6.	Jumlah Dusun	11RW
7.	Kepadatan Penduduk	200 per km

Sumber: Data Umum Kampung Siswo Bangun

Table 3.2

Pekerjaan Masyarakat Siswo Bangun

NO	JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Petani	1190 Orang	127 Orang
2.	Buruh Tani	409 Orang	117 Orang
3.	Pegawai Negeri Sipil	.. Orang	Orang
4.	Pedagang keliling	50 Orang	13 Orang
5.	Pengrajin	30 Orang	... Orang
6.	Pekerja seni	5 Orang	... Orang
7.	Dokter swasta	-Orang	- Orang
8.	Bidan swasta	3 Orang	5 Orang
9.	Jasa	50 Orang	... Orang
10.	TNI...	1 Orang	- Orang
11.	POLRI	2 Orang	... Orang
12.	Swasta	9 Orang	6 Orang
13.	Pengusaha kecil dan menengah	... OrangOrang
13.	Pengusaha besarOrang Orang
27.	Karyawan Perusahaan swasta	... Orang Orang
29.	Belum Bekerja	650 Orang	500 Orang
30.	Tidak Bekerja	120 Orang	100 Orang
	JUMLAH PENDUDUK	1496 Orang	742 Orang

Sumber: RPJMDes 2019-2024

4. Kondisi Sosial Budaya

Tabel 3.3
Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Usia 3-5 tahun yang belum masuk TK	300 Orang	300 Orang
2.	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play group	15 Orang	41 Orang
4.	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	110 Orang	110 Orang
5.	18-56 tahun tidak pernah sekolah	15 Orang	15 Orang
6.	Tamat SD/ sederajat	125 Orang	125 Orang
7.	Jumlah usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	100 Orang	100 Orang
8.	Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	150 Orang	150 Orang
9.	Tamat SMP/ sederajat	65 Orang	65 Orang
10.	Tamat SMA/ sederajat	2 Orang	2 Orang
11.	Tamat D-1/ sederajat Orang Orang
12.	Tamat D-2/ sederajat Orang Orang
13.	Tamat D-3/ sederajat Orang Orang
14.	Tamat S-1/ sederajat Orang Orang
15.	Tamat S-2/ sederajat Orang Orang
	Jumlah	1057 Orang	1198 Orang
	Jumlah Total	2255 Orang	

Sumber: RPJMDes 2019-2024

5. Kondisi sarana dan Prasarana

Kampung Siswo Bangun memiliki Sarana dan Prasarana untuk masyarakat yang meliputi sarana prasarana dibidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sarana umum.

- a. Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Sarana dan prasarana pemerintahan Kampung Siswo Bangun mempunyai Kantor Balai Kampung disertai dengan perangkat Kampung lengkap. Pemerintah Kampung membawahi RW (Rukun Warga) dan RW membawahi beberapa RT (Rukun Tangga). Kampung Siswo Bangun mempunyai 11 RW dan 26 RT. Sarana prasarana tersebut berjalan lancar sesuai peraturan dan memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat.

b. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan prasarana di kampung siswo bangun mempunyai sekolah dari PAUD sampai Sekolah tingkat dasar dengan rincian:

Table 3.4
pendidikan formal

No	Nama	Jumlah	Status (terdaftar, terakredita si)	Kepemilikan			Jumlah tenaga pengajar	Jumlah siswa/ Mahasiswa
				Pemerinta h	Swast a	Lain- lain		
1.	TK/R A	2			V		10	
2.	SD / Seder ajat	2		2			12	
3.	SMP / Seder ajat	1		1			10	
4.	SMA / Seder ajat							

Sumber: RPJMDes 2019-2024

c. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sarana dan prasarana kesehatan di Desa Siswo Bangun mempunyai PKD di tingkat kampung dengan satu orang bidan kampung dan posyandu di adakan di satu tempat atau satu pos.

Table 3.5
 prasarana kesehatan

NO	PRASARANA KESEHATAN	JUMLAH
1.	Puskesmas Pembantu	1 unit
2.	Posyandu	4 unit
3.	Balai Kesehatan Ibu Dan Anak	- unit
4.	Tempat praktek Bidan	- Unit

Sumber: RPJMDes 2019-2024

Table 3.6
 tenaga kesehatan

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH
1.	Jumlah dokter umum	- orang
2.	Jumlah paramedic	4 orang
3.	Jumlah dukun bersalin terlatih	3 orang
4.	Bidan	3 orang
5.	Perawat	5 orang
6.	Dukun pengobatan alternative	- Orang

Sumber: RPJMDes 2019-2024

d. Prasarana Keagamaan

Sarana dan prasarana keagamaan di Kampung Siswo Bangun mempunyai masjid, mushola, Pure dan Gereja di tiap dusun dengan perincian sebagai berikut:

Table 3.7

sarana prasarana ibadah kampung

NO	PRASARANA IBADAH	JUMLAH
1.	Masjid	10 buah
2.	Langgar / Surau / Mushola	9 buah
3.	Pure	8 buah
4.	Gereja	1buah

Sumber: RPJMDes 2019-2024

e. Sarana dan Prasarana Umum

Sarana dan prasarana umum yang terdapat di Kampung Siswo Bangun, meliputi perdagangan dan kesehatan, sarana prasarana di bidang kesehatan mempunyai Satu (MCK Umum) dengan kondisi Baik. Dalam hal ini beberapa pembangunan MCK Umum dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka

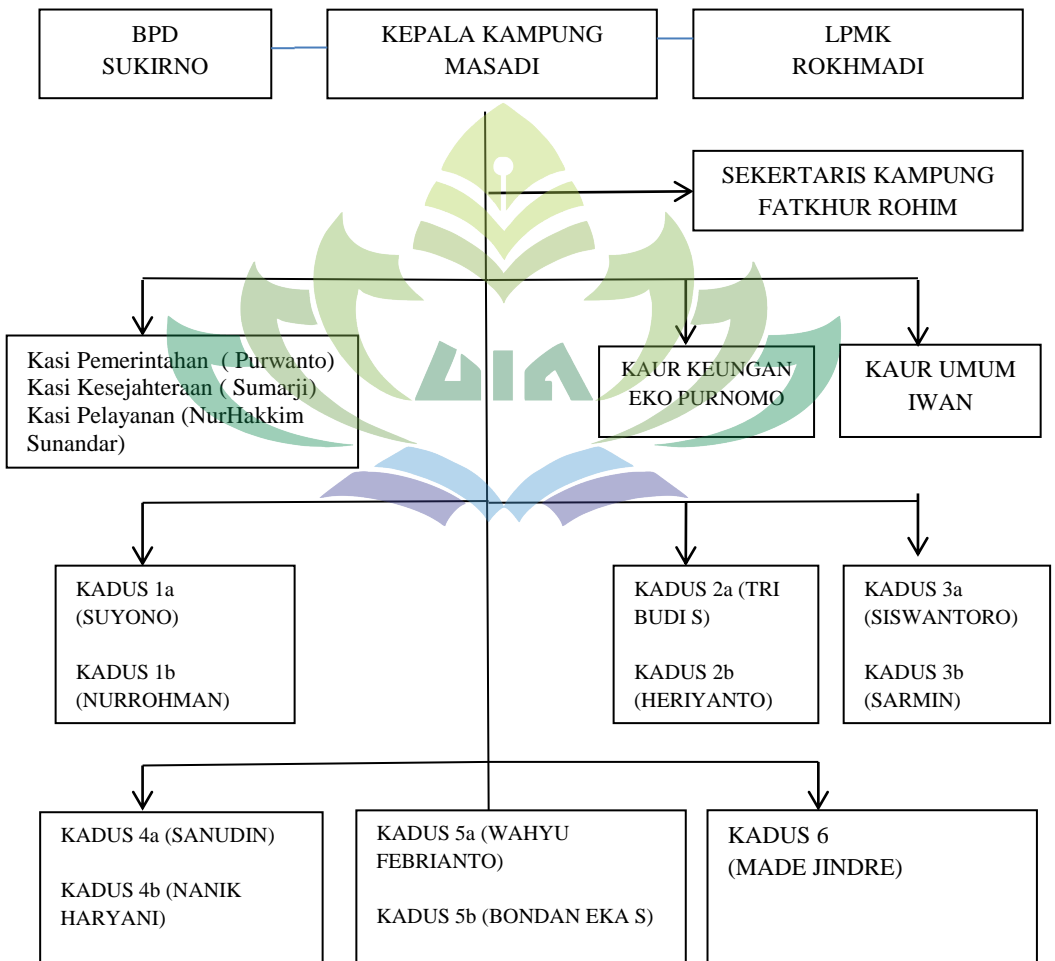
Menengah Kampung (RPJM Kampung). Jalan dalam Kampung Siswo Bangun, meliputi jalan Kampung dan jalan RT.

Beberapa ruas jalan di Kampung sudah beraspal dan rabat beton namunada jalan makam bahkan masih ada jalan yang berupa tanah. Keadaan tersebut meliputi jalan Kampung dan jalan RT. Pembangunan jalan tersebut dimasukkan dalam

Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Kampung
(RPJM Kampung) 2019-2024.

6. Struktur organisasi pemerintah Desa siswo bangun

**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH
KAMPUNG SISWO BANGUN KEC. SEPUTIH
BANYAK**



7. Visi dan Misi Desa Siswo Bangun
 - a. Landasan Filosofi Pembangunan

Pembangunan pada dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kondisi atau keadaan yang lebih baik dari pada kondisi atau keadaan sebelumnya. Pelaksanaan pembangunan menjadi kewajiban bagi pemerintah, baik dari Pusat maupun Daerah hingga ke tingkat Kampung dan harus terintegrasi antar tingkatan pemerintahan. Bahwa Kampung adalah tingkatan pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pembangunan Kampung harus menjadi fokus dari pembangunan nasional.

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Kampung memberikan pedoman perencanaan yang terintegrasi dan visi tersinergi antar ruang, waktu dan fungsi pemerintahan Kampung. Pemerintah Kampung Siswo Bangun dalam rangka melakukan perencanaan pembangunan telah berusaha untuk mengikuti regulasi yang berlaku sehingga tercipta perencanaan pembangunan yang baik.

Perencanaan yang baik akan memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Pada sisi lain juga berkembang penganggaran berbasis kinerja, oleh karena itu aspek perencanaan harus menyatu dengan penganggaran untuk mendapatkan keterpaduan yang berdaya guna

dan berhasil guna dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

b. Visi Pembangunan Kampung

Visi pembangunan Kampung adalah suatu gambaran yang menantang tentang kondisi Kampung yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Kampung yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui berbagai strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Kampung dengan melihat potensi dan kebutuhan Kampung. Penetapan visi pembangunan Kampung, sebagai bagian dari perencanaan strategis pembangunan Kampung, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pembangunan suatu Kampung mencapai kondisi yang diharapkan.

Visi Pembangunan Kampung Siswo Bangun Tahun 2019-2024 disusun berdasarkan pada sumber utama dari visi Kepala Kampung yang telah terpilih melalui proses Pemilihan Kepala Kampung secara langsung yang saat ini sedang menjabat. Mengingat bahwa Kepala Kampung terpilih dalam Pemilihan Kepala Kampung Tahun 2019 s/d Tahun 2024 belum menyusun RPJM-Kampung, maka Visi dan Misi dalam RPJM-Kampung ini ditetapkan untuk Tahun 2019-2024, yang dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Kampung Siswo Bangun seperti

Pemerintah Kampung, BPK, LPMK, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat Kampung pada umumnya, serta pertimbangan kondisi eksternal di Kampung seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan. Namun demikian dapat dimungkinkan apabila Kepala Kampung terpilih dalam Pemilihan Kepala Kampung yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2019-2024 akan merubah Visi dan Misi yang disesuaikan dengan Visi dan Misi yang bersangkutan.

Visi pembangunan Kampung Tahun 2019-2024 ini disusun dengan memperhatikan/mengacu visi pembangunan daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019-2024 (Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2013), yakni ***“Terwujudnya Kabupaten Lampung Tengah yang Lebih Maju, dan Sejahtera”*** Maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Kampung Siswo Bangun Tahun 2019-2024 adalah :

“Terwujudnya Kampung Siswo Bangun yang Maju dan Sejahtera“. Secara khusus, dijabarkan makna dari visi pembangunan Kampung yang sangat diperlukan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen), dan perilaku (partisipasi) segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam setiap

tahapan proses pembangunan selama enam tahun kedepan.

Maju merupakan karakter yang dibutuhkan dalam pembangunan Kampung, maju, mampu bersaing dari segi pembangunan dan sumber daya manusia dari Kampung-Kampung yang lain.

sifatnya hanya stimulan atau perangsang. Kampung Siswo Bangun adalah Kampung yang memiliki banyak potensi-potensi yang dapat dikembangkan baik potensi dari sumber daya manusia maupun dari sumber daya alamnya, memaksimalkan potensi yang ada di Kampung dan kemampuan masyarakatnya dan tidak tergantung pada bantuan pihak luar. Bila ada kerjasama yang baik, dan tidak tergantung dengan bantuan pemerintah, sistem administrasi baik, pendapatan masyarakat cukup. Supaya lebih berdaya, masyarakat perlu menghormati aturan, kelestarian sumberdaya alam, memiliki kemampuan keahlian, ketrampilan, sumber pendapatan cukup stabil, semangat kerja yang tinggi, memanfaatkan potensi alam untuk lebih bermanfaat dengan menggunakan teknologi tepat guna maka tujuan dari pembangunan Kampung Harapanjaya akan dapat terwujud.

Sejahtera yaitu konsep sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (*materiil*) maupun sosial (*spirituil*), dengan kata lain

kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata dengan menitik beratkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berdaya guna dan meningkatkan pembangunan yang difokuskan pada pembangunan perekonomian Kampung yang berbasis pada potensi Kampung yang berdaya jual dan berdaya saing.

Adapun indikator secara ilmiah adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga meningkatkan pendapatan perkapita pada tingkat yang tinggi, menurunnya tingkat pengangguran, menurunnya jumlah penduduk miskin, terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif, meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai terpenuhinya hak sosial masyarakat mencakup akses pada pelayanan dasar sehingga mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial, keluarga kecil berkualitas, pemuda dan olah raga serta meningkatkan kualitas kehidupan beragama; meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan, tersedianya infrastruktur yang memadai, meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih,

berwibawa dan bertanggungjawab yang mampu mendukung pembangunan Kampung.

c. Misi Pembangunan Kampung

Misi pembangunan Kampung adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah Kampung, sesuai visi pembangunan Kampung yang telah ditetapkan, agar tujuan pembangunan Kampung dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka memberikan kemudahan bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan, maka misi pembangunan Kampung Siswo Bangun Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019-2024 dapat dirumuskan sebagai berikut:

1) Mewujudkan masyarakat kampung siswo bangun yang maju

Misi:

- a) Meningkatkan kemajuan sumber daya manusia
- b) Meningkatkan pembangunan

2) Mewujudkan masyarakat kampung siswo bangun yang sejahtera

Misi:

- a) Meningkatkan pembangunan infrastruktur kampung
- b) Meningkatkan sumber daya yang ada

- c) Meningkatkan peran aktif BPK, LPMK, RT/RW dan tokoh masyarakat dalam pembangunan kampung
- d) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berswadaya membangun kampung
- e) Menciptakan system pemerintahan yang baik dan demokratis
- f) Peningkatan dan pembangunan usaha kecil dan menengah
- g) Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga
- h) Mewujudkan keluarga sehat sejahtera melalui peran aktif ibu-ibu PKK, Posyandu dan organisasi lainnya.

d. Tujuan pembangunan kampung

Tujuan pembangunan kampung siswa adalah sebagai berikut:

- 1) terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama.
- 2) terbangunnya perekonomian daerah berbasis potensi lokal
- 3)
- 4) yang berdaya saing.
- 5) meningkatnya pembangunan prasarana dan sarana Kampung.
- 6) termanfaatkannya dan terkelolanya sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.

7) terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis.

8) terciptanya masyarakat yang aman dan tenteram.

e. Sasaran Pembangunan Kampung

Sasaran pembangunan kampung siswo bangun adalah sebagai berikut:

1) Misi Pertama : Bidang keagamaan “Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap agama”, dilaksanakan untuk mencapai sasaran yaitu Makin meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pengetahuan agama sehingga terwujud masyarakat yang berkarakter agamis, berbudaya, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan falsafah pancasila.

2) Pembangunan “Meningkatkan pembangunan infrastruktur Kampung, meningkatkan sumber daya alam yang ada, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun Kampung dan peran aktif BPK, LPMK, RT/RW, dan tokoh masyarakat”, dilaksanakan untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu:

3) Terbangun dan mantapnya jaringan infrastruktur yang andal sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi Kampung/Dusun

serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru.

- 4) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera.
- 5) Membaiknya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif sektor basis ekonomi Kampung sehingga mampu menghasilkan komoditi berkualitas, berdaya saing, menjadi motor penggerak perekonomian.
- 6) Terpenuhi dan meratanya kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah Kampung/dusun dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- 7) Makin optimalnya pemanfaatan sumber daya alam, aset dan produk Kampung yang berdaya saing tinggi sebagai sumber kekayaan Kampung.
- 8) Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan yang berorientasi tata ruang, serta mengurangi resiko bencana alam.
- 9) Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup.
- 10) Meningkatnya peran aktif BPK, LPMK, RT/RW, Tokoh masyarakat, dan masyarakat pada umumnya dalam pembangunan Kampung. Pemerintahan

“Menciptakan Sistem Pemerintahan yang Baik & Demokratis”, untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu:

- a) Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih.
- b) Meningkatnya profesionalisme aparatur Kampung.
- c) Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat.
- d) Meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak.

Kemasyarakatan “Memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan pengembangan usaha, menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga”, dilaksanakan untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu:

- a) Berkembangnya Industri kecil masyarakat.
- b) Meningkatnya pendapatan masyarakat yang akan berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- c) Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga.
- d) Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,

- e) Mantapnya situasi dan kondisi peri kehidupan bermasyarakat yang didukung oleh penegakan HAM

B. Penyajian Data dan Fakta Penelitian

Penelitian ini ditulis berdasarkan situasi atau fenomena yang ada dalam masyarakat dan sesuai fakta yang terjadi dan dihadapi oleh masyarakat dan sesuai dengan fakta yang terjadi dan dihadapi oleh masyarakat. Peneliti menggunakan cara berfikir induktif yaitu berangkat dari kesimpulan khusus kemudian ditarik menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Maka analisis data dapat menelaah dari berbagai sumber yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi pribadi atau resmi dan sebagainya. Berikut adalah hasil data observasi dan wawancara terhadap kebijakan Padat Karya Tunai Desa di Desa Siswo Bangun Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah:

1. Karakteristik Informan

Pada bagian ini karakteristik informan yang akan dibahas yaitu dimulai dari jabatan, usia, dan pendidikan terakhir. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang relevan dan sesuai dengan pokok masalah yang ingin diteliti. Penelitian ini dilakukan pada pengurus Desa Siswo Bangun dan juga masyarakat yang terlibat dalam pengimplementasian kebijakan Padat Karya Tunai Desa di Desa Siswo Bangun.

Table 3.8

Karakteristik informan menurut jabatan/pekerjaan

No	Nama	Jabatan/Pekerjaan
1	Masadi	Kepala Desa Siswo Bangun
2	Fatkhur Rohim	Sekretaris Desa
3	Purwanto	Kasi Pemerintahan
4	Sumarji	Kasi Kesejahteraan
5	Nurhakim Sunandar	Kasi Pelayanan
6	Eko Purnomo	Kaur Keuangan
7	Iwan	Kaur Umum
8	Suhar	Buruh Tani
9	Robi Setiawan	Buruh
10	Sumarno	Buruh Tani
11	Pono	Buruh
12	Sutrisno	Buruh

Sumber: Data primer Diolah tahun 2023

Dari table di atas dapat kita ketahui sebagian besar informan penelitian bekerja sebagai buruh atau buruh harian lepas dimana sesuai dengan tujuan dari program PKTD ini dimana sasaran nya adalah masyarakat pengangguran atau masyarakat setengah menganggur dan juga masyarakat miskin. Sehingga program PKTD di desa ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yakni mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Siswo Bangun.

Table 3.9

Karakteristik informan menurut usia

No	Nama	Usia
1	Masadi	56

2	Fatkhur Rohim	35
3	Purwanto	40
4	Sumarji	35
5	Nurhakim Sunandar	42
6	Eko Purnomo	33
7	Iwan	50
8	Suhar	48
9	Robi Setiawan	42
10	Sumarno	60
11	Pono	47
12	Sutrisno	42

Sumber: Data primer tahun 2023

Dari table di atas, informan dalam penelitian ini memiliki usian antara 33-62 tahun. Dengan rata-rata usia iforman adalah 44 tahun.

Table 3.10

Karakteristik informan menurut pendidikan terakhir

No	Nama	Pendidikan Terakhir
1	Masadi	SMA
2	Fatkhur Rohim	Sarjana
3	Purwanto	SMA
4	Sumarji	SMA
5	Nurhakim Sunandar	SMA
6	Eko Purnomo	SMA
7	Iwan	SMA
8	Suhar	SMA
9	Robi Setiawan	SMP

10	Sumarno	SMP
11	Pono	SMA
12	Sutrisno	SMA

Sumber: Data Primer diolah tahun 2023

Dari table di atas tingkat Pendidikan terakhir informan penelitian di dominasi oleh lulusan Sekolah Menengah Atas di Desa Siswo Bangun.

2. Hasil Wawancara dan Observasi

Dalam hal ini peneliti mencari langsung data yang ada di lapangan dan menyesuaikannya dengan teori yang peneliti gunakan yaitu menggunakan teori implementasi menurut model George C. Edward III. Dalam pendekatan Edward III, terdapat empat variable yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Berdasarkan teori tersebut, fokus penelitian ini mengarah kepada indikator implementasi program PKTD di Desa Siswo Bangun. Berdasarkan kegiatan yang sudah dilakukan oleh peneliti dari data wawancara dan observasi, maka didapatkan data sebagai berikut:

a. Komunikasi

Komunikasi program Padat Karya Tunai Desa merupakan penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan dan diefektifkan lagi dengan disampaikan juga kepada kelompok sasaran kebijakan serta pihak lain yang berkepentingan. Sebagaimana dikemukakan oleh Edward III bahwa keputusan kebijakan dan perintahnya harus diteruskan kepada orang yang tepat dan dikomunikasikan dengan jelas dan akurat agar dapat dimengerti dengan cepat oleh pelaksana. Indikator yang pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Transmisi

komunikasi atau penyaluran komunikasi yang baik akan data menghasilkan suatu implemenasi yang baik pula. Komunikasi internal terjadi antara aparatur Desa Siswo Bangun, komunikasi internal ini disampaikan dengan pertemuan seperti musyawarah dan rapat atau kadang di lakukan di rumah di kepala desa atau di rumah aparatur desa lainnya. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh kepala desa Siswo Bangun:

*“kalau untuk koordinasi antara aparatur desa dengan secara internal itu biasanya diadakan setelah keputusan dari pemerintah kabupaten turun langsung kami adakan pertemuan biasanya di rumah kepala desanya untuk nanti bisa menyampaikan tentang program PKTD ini kemasyarakat Siswo Bangun”*⁷⁷

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh sekretasis Desa Siswo Bangun:

*”untuk koordinasi internal antar aparatur desa itu biasanya setelah ada peraturan dari pemerintah baru setelah itu kami pelajari bersama kemudian membuat laporan seperti itu”*⁷⁸

Hal yang sama dikatakan oleh kaur keuangan Desa Siswo Bangun:

*“untuk koordinasi program ini kita langug melakukan koordinasi antar aparatur desa atau ya biasanya itu dibicarakan secara musyawarah”*⁷⁹

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa koordinasi yang dilakukan antara aparatur desa Siswo Bangun itu cukup baik dan terlaksana sejalan dengan apa yang diharapkan.

Komunikasi eksternal terjadi anatara aparatur desa Siswo Bangun dengan masyarakat desa Siswo Bangun yang dilakukan dengan cara sosialisasi. Hal

⁷⁷ “Hasil Wawancara dengan kepala desa Siswo Bangun,”5 april 2023.

⁷⁸ “Hasil Wawancara Sekretaris Desa Siswi Bangun.” 5 april 2023

⁷⁹ “Hasil Wawancara dengan Kaur Keuangan.” 7 April 2023.

ini sesuai dengan hasil wawancara sekretaris desa Siswo Bangun:

“untuk sosialisasi kita sosialisai itu setelah kita melakukan musyawarah dengan sesama aparatur desa kemudian didapatkan hasil bersama tentang program PKTD ini baru setelah itu kami merencanakan sebuah acara sosialisasi untk menyampaikan tentang program ini kemasyarakat”⁸⁰

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh kepala desa Siswo Bangun:

“nah itu mbak jadi setelah kami aparatur desa sudah melaukan musyawarah tentang program PKTD ini kemudian kami sampaikan kemasyarakat secara sosialisasi biasanya kami adakan di balai desa Siswo Bangun dengan mengundang para masyarakat yang enajdi sasaran dan tujuan dari program ini secara bersamaan kemudian kami sampaikan tentang program PKTD ini seperti apa itu PKTD fungsinya dan tujuannya kepada masyarakat agar masyarakat paham tentang bagaimana program ini akan dijalankan”⁸¹

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang sudah dilakuakn memang benar sampai kepada masayarakatt Siswo Bangun. Sebagaimana hasil wawancara pada pak Suhar selaku masyarakat:

“ada, pernah ada sosialisasi tentang program PKTD itu ya waktu itu di adakannya di balai desa”⁸²

Hal ini juga senada dengan apa yang dikatakan oleh masyarakat lainnya yang ikut juga dalam sosialisasi yang dilakukan oleh aparatur desa mengenai Program Padat Karya Tunai Desa ini.

⁸⁰ “Hasil Wawancara Dengan Sekretaris Desa Siswo Bangun.” 5 April 2023.

⁸¹ “Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Siswo Bangun.” 5 April 2023.

⁸² “Hasil Wawancara dengan Masyarakat.” 8 April 2023.

Hal ini juga sama seperti yang disampaikan oleh kaur keuangan Desa Siswo Bangun bahwasannya:

“kami sebagai aparatur desa sangat senang sekali apabila ada program seperti ini jadi langsung kami ingi secepatnya mengimplementasikannya apalagi program Padat Karya Tunai Desa ini sangat bagus tujuannya untuk memberikan pekerjaan kepada masyarakat yang masih menganggur atau setengah menganggur jadi kami sebagai aparatur desa segera mensosialisasikan program ini kepada masyarakat dan semoga saja tepat sasaran dan bisa mengurangi kemiskinan dan pengangguran di Desa Siswo Bangun ini”⁸³

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa selama adanya program Padat Karya Tunai Desa ini aparatur sudah pernah melkaukan sosialisasi kepada masyarakat Siswo Bangun. Dan dalam pelaksanaan sosialisasi pasti terdapat kendala-kendala saat proses melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh sekretaris desa Siswo Bangun:

“kendala yang sering ada dalam proses sosialisasinya itu bisa datang dari internal sama eksternal nya, misalnya kalo dari internal itu kan tidak semua aparatur desa itu ikut berpartisipasi aktif dalam mensosialisasikannya jadi kadang ya orang itu-itu saja yang aktif, kalo dari eksternalnya itu susah buat ngumpulin semua masyarakat untuk datang ketika ada sosialisasi jadi kadang ngga semua masyarakat daoet informasi tentang Padat Karya Tunai Desa ini”⁸⁴

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh kepala desa Siswo Bangun:

⁸³ “Hasil Wawancara dengan Kaur Keuangan.” 7 April 2023.

⁸⁴ “Hasil Wawancara dengan Sekretaris Desa Siswo Bangun.” 5 April 2023.

“kalau kendalanya sih pasti ada ya tapi menurut saya kendalanya ngga terlalu besar sih, ya mungkin cuman kaya masyarakatnya susah untuk diajak menghadiri sosialisasi di balai desa karena ya itu bisa banyak alasan dari mereka ada yang males ada juga yang nganggep sosialisasi ini tidak seberapa penting”⁸⁵

Namun menghadapi kendala yang terjadi ini kepala desa Siswo Bangun mengatakan:

“sebenarnya hambatan sosialisasi itu sendiri ya ngga terlalu besar ya hambatannya itu dari personil warga nya aja yang susah dikumpulin. Tapi masih bisa ditangani ko sama aparatur desa”

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa yang menjadi kendala dalam proses sosialisasi adalah partisipasi masyarakat dalam mengikuti sosialisasi yang masih minim. Namun dalam mengatasi hambatan tersebut pihak-pihak terkait aparatur Desa Siswo Bangun ini tetap berusaha mengkomunikasikan seperti dari mulut ke mulut maupun dari sosial media. Sebagaimana hasil wawancara terhadap kaur keuangan Desa Siswo Bangun:

“kita tetap bilang ke masyarakat kita tetap usaha menyampaikan ke masyarakat bahkan kita minta tolong untuk saling bantu kasih tau ke tetangga tetangga, teman, saudara tentang program PKTD ini untuk bisa bekerja sama, kita bisa ngobrol-ngobrol bersama untk masyarakat yang belum begitu paham”⁸⁶

Indikator selanjutnya dalah kejelasan komunikasi, kejelasan informasi merupakan hal yang penting karena dengan adanya kejelasan komunikasi diharapkan tidak terjadi perbedaan persepsi antara pelaksana dan masyarakat. Hasil wawancara sebagian

⁸⁵ “Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Siswo Bangun.” 5 April 2023.

⁸⁶ “Hasil Wawancara dengan Kaur Keuangan.” 7 April 2023.

masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan PKTD ini sebagaimana wawancara dengan bapak Sutrisno selaku masyarakat:

“kalau tentang adanya program PKTD ini ya tau, waktu itu aparat desa perah ngadain sosialisai tentang PKTD ini di balai kampung ya kalo menurut saya info yang diberikan sudah cukup jelas bisa saya mengerti”⁸⁷

Hal lain dikatakan oleh bapak Sumarno selaku masyarakat adalah:

“iya pas waktu itu pernah ada sosialisasi tentang PKTD ini disamapaikan tentang program ini cukup jelas”⁸⁸

Indikator selanjutnya adalah konsistensi. Konsistensi disini mengandung pengertian bahwa implementasi kebijakan akan berjalan baik apabila perintah pelaksanaan harus konsistensi dan jelas. Menurut hasil wawancara konsistensi komunikasi yang dilakukan oleh apataur Desa Siswo Bangun sudah cukup baik seperti dengan konsisten setiap tahun melakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa Siswo Bangun. Sebagaimana yang dikatakan oleh kasi kesejahteraan Desa Siswo Bangun:

“iya mbak jadi kita setiap setahun itu melakukan yang namanya sosialisasi ke masyarakat Siswo Bangun biar masyarakatnya tau dan paham tentang PKTD ini”⁸⁹

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh sekretaris Desa Siswo Bangun:

“jadi sosialisasinya kan itu ya cuman setahun sekali gitu mbak jadi ya kita harus tetap konsisten karna ngga banyak sosialisasi yang dilakukan”

b. Sumber Daya

⁸⁷ “Hasil Wawancara dengan Masyarakat.” 9 April 2023.

⁸⁸ “Hasil Wawancara dengan Bapa Sumarno.” 9 April 2023.

⁸⁹ “Hasil Wawancara dengan Kasi Kesejahteraan.” 6 April 2023.

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan karena bagaimanapun baiknya kebijakan atau program dirumuskan tanpa adanya dukungan sumber daya yang memadai maka kebijakan akan kesulitan dalam mengimplementasikan nya. Sumber daya yang dimaksudkan mencakup jumlah pelaksana yang melaksanakan kebijakan, informasi, wewenang atau kewenangan dan sarana dan prasarana-sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menjamin kebijakan dijalankan sesuai dengan apa yang diharapkan. Memadai yang dimaksudkan adalah jumlah para pelaksana harus sesuai dengan dengan jumlah tugas yang dibebankan maupun kemampuan, dan keterampilan yang dimiliki baik teknis maupun material.

Pertama sumber daya manusia, program Padat Karya Tunai Desa memiliki jumlah pekerja sebanyak 33 Orang Pada tahun 2022. Untuk saat ini, pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat untuk program Padat Karya Tunai Desa ini adalah membuat siring atau gorong-gorong di desa Tegal Rejo oleh karena itu sumber daya manusia yang di pekerjaan sudah cukup untuk melaksanakan pogram ini. sebaaimana yang telah disampaikan oleh kaur umum Desa Siswo Bangun:

“sekarang jumlah pekerja untuk PKTD ini berjumlah 33 saya rasa sudah cukup jadi ngga telalu banyak pekerja takutnya nant malah ngga efisien”⁹⁰

Maka dari hasil wawancara di atas bisa dilihat bahwa sumber daya manusia itu telah mencukupi dan sesuai dengan kebutuhan lapangan. Kenyataannya dilapangan bisa berjalan efektif arena tenaga kerja yang cukup tidak terlalu banyak dan tidak kekurangan

⁹⁰ “Hasil Wawancara dengan Kaur Umum.” 7 April 2023.

pula. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh kepala Desa Siswo Bangun Bapak Masadi bahwasannya:

“untuk sumber daya manusia nya ya mbak menurut saya sudah cukup dengan jumlah orang yang bekerja sekarang karna ngga baik juga kalo dipaksain terlalu banyak”

Dari wawancara di atas bisa dilihat bahwa program Padat Karya Tunai Desa ini sudah cukup menyerap para tenaga kerja dengan cukup dan tidak berlebihan karena di khawatirkan malah tidak efektif dalam melaksanakan program nya nanti. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya tenaga kerja yang diserap dari program PKTD ini dirasa sudah cukup.

Untuk kemampuan sumber daya manusia sendiri, program Padat Karya Tunai Desa ini dijalankan oleh masyarakat Siswo Bangun yang memang bisa melakukannya. Hal ini sama seperti yang dikatakan oleh Kasi Pelayanan Desa Siswo Bangun:

“jadi untuk masyarakat yang bekerja ya yang memiliki kemampuan dasar ya udah pada bisa mbak karena kan mereka bekerja nya membuat siring gitu mbak jadi ya menurut saya tidak perlu keterampilan khusus ya”⁹¹

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi kemampuan sumber daya manusia dinilai cukup. Hal ini sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja memang tidak terlalu membutuhkan kemampuan khusus karena memang para pekerjanya adalah dilakukan oleh lelaki dan yang sudah berumah tangga dan yang paling penting mereka memiliki kemampuan untuk bekerja bangunan.

⁹¹ “Hasil Wawancara dengan Kasi Pelayanan.” 7 April 2023.

Kedua sumber daya informasi, informasi dalam sumber daya adanya informasi yang dimiliki oleh sumber daya manusia untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Informasi untuk melaksanakan kebijakan disini adalah segala keterangan dalam bentuk tulisan atau pesan. Semua informasi mengenai pelaksanaan program Padat Karya Tunai Desa di Desa Siswo Bangun tertuang dalam AD/ART (Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga) baik pedoman, petunjuk dan tata cara pelaksanaan dan tujuan.

Ketiga sumber daya kewenangan yaitu kewenangan yang dimiliki oleh sumber daya manusia. Untuk melaksanakan suatu kebijakan yang ditetapkan. Kewenangan yang dimiliki oleh sumber daya manusia adalah kewenangan setiap pelaksana untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang diamanatkan dalam suatu kebijakan. Dalam pelaksanaan program Padat Karya Tunai Desa, kewenangan yang diberikan pada setiap individu sudah tercantum dalam AD/ART desa Siswo Bangun. Setiap individu yang terlibat dalam pelaksanaan program Padat Karya Tunai Desa memiliki kewenangan yang berbeda beda sesuai jabatan yang mereka pegang. Sebagaimana hasil wawancara dengan kepala desa Siswo Bangun:

“kewenangan kalau untuk aparatur desa sama ya mbak, kepala pelaksana nya tetap saya jadi tidak terdapat perbedaan tetap sama struktur pada kepengurusan desa ini, dan saya dalam menjalankan program ini tentunya dibantu oleh rekan-rekan kerja yang lain untuk bisa menentukan bagaimana baiknya program ini dijalankan, mengambil keputusan yang tidak merugikan pihak manapun. Jadi kalo untuk kewenangan itu diberikan sepenuhnya kepada pemerintah desa dengan catatan tidak merugikan dan tidak menguntungkan individu manapun”

Hal yang sama dikatakan oleh sekretaris desa Siswo Bangun:

“iya mbak kalo untuk kewenangan itu sama seperti struktur desa jadi kami menjalankan tugas sebagaimana mestinya dengan bapak masadi sebagai kepala kampung dan apabila ada sesuatu yang dibutuhkan atau perlu dibicarakan kami tetap mencari solusi dengan musyawarah”

Keempat sumber daya sarana dan prasarana, terkait sumber daya ini tidak terlepas dari anggaran dana desa. Sebagaimana yang dikatakan oleh aparatur desa Siswo Bangun bahwa dana untuk proram Padat Karya Tunai Desa ini diperoleh dari pemerintah yang ada dari dana desa. Sebagaimana yang dikatakan oleh kaur keuangan Desa Siswo Bangun:

“kalau untuk modal ya kita kan sudah ada anggarannya ya mbak untuk PKTD sekian untuk yang lain sekian jadi ya semua anggaran sudah di plot sedemikian rupa. Itupun sudah peraturan dari pusatnya begitu dan saya rasa ngga hanya do Desa Siswo Bangun ini aja ya tapi di seluruh Indonesia, jadi ya kita memaksimalkan dana yang ada dengan sebaik mungkin”⁹²

Hal ini senada dengan apa yang diktakan oleh Bapak Purwanto selaku kaur Pemerintahan Di desa Siswo Bangun beliau mengatakan:

“dari pemerintah pusat yang terdapat di dana desa untuk program Padat Karya Tunai Desa ini”

Menurut hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa permodalan atau anggaran yang diberikan untuk program Padat Karya Tunai Desa ini hanya berasal dari desa.

c. Disposisi

⁹² “Hasil Wawancara dengan Kaur Keuangan.” 7 April 2023.

Menurut Edward III disposisi merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Disposisi pada penelitian ini adalah tentang komitmen. Komitmen dibuktikan dengan melihat alasan implementor untuk dapat melaksanakan implementasi, tujuan/perubahan yang ingin dicapai, dan perubahan yang telah dicapai para implementor untuk implementasi kebijakan Padat Karya Tunai Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa komitmen para implementor program Padat Karya Tunai Desa ini sudah baik:

“ya kalau saya ya mbak sebagai kepala desa, mewakili semua pemerintahan desa. Saya mendukung penuh dalam artian saya tidak terlalu intervensi salgi itu masih mengikuti alur yang ada dan sesuai dengan peraturan dan tidak merugikan siapapun. Dana untuk program ini pun sudah ada dari pusat ini berartikan program ini memang benar-benar di dukung dan bermanfaat. Saya ssebagai kepala desa sangat apresiasi mbak dengan adanya PKTD ini kalo saya tidak komit denagn adanya PKTD ini bisa saja saya tidak mesosialisikannya ke masyarakat namun saya sangat antusias sekali karena memang program ini sangat bermanfaat”

Hal ini senada dengan jawaban yang diberikan oleh bapak sekretaris desa bapak Fatkhur Rohim bahwasannya:

”dari kita sebagai penyampai sendiri ya sudah menjalankan dengan baik, transparan semua

laporan mengenai PKTD ini ada, bertanggung jawab dan berharap program ini memang bisa menurunkan khususnya pengangguran yang ada di Deasa Siswo Bangun ini. kita juga selalu berkomitmen dengan keyakinan dan kemampuan penuh semoga Program Padat Karya Tunai Desa ini sudah tepat saran jadi bisa membantu perekonomian masyarakat di Siswo Bangun ini”⁹³

Dari hasil wawancara di atas dapat kita ketahui bahwa komitmen dari tiap aparatur desa dalam mengimplementasikan program ini sudah dapat dikatakan cukup baik. Begitupula dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan oleh masyarakat Bapak Pono

“ya kita sebagai masyarakat kan sudah mengikuti arahan dari aparatur desa harus bagaimana jadi ya kita sebagai pekerja ya bekerja sesuai dengan aturan yang ada mbak”

Indikator disposisi dalam implementasi terdiri dari:

1) Rekrutmen pekerja/tenaga kerja

Pemilihan personil untuk bekerja merupakan wewenang kepala desa dan disetujui oleh BPK (Badan Permusyawaratan Kampung). Namun dalam menentukan siapa yang harusnya bekerja tidaklah mudah karena harus benar-benar tepat sasaran seperti tujuan adanya Program Padat Karya Tunai Desa ini.

2) Insentif

Pendapat George C. Edward III, Insentif merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan dirinya

⁹³ “Hasil Wawancara dengan Sekretaris Desa.” 5 April 2023.

sendiri, maka memnipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan dengan cara menambah keuntungan atau biao tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi. Insentif dalam Program Padat Karya Tunai Desa ini sama seperti pemberian upah kepada para pekerja sejumlah RP. 50.000,00/Hari.

d. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi termasuk salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan Program Padat Karya Tunai Desa. Ada dua karakteristik utama dari birokrasi menurut Edward, yaitu prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau sering disebut sebagai *Standart Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi. Mengenai Struktur birokrasi dan SOP ini telah tercantum dalam AD/ART dan Perdes

1) Fragmentasi Struktur Organisasi

Pada struktur organisasi pemerintah desa Siswo Bangun menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lainnya dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi ini pola koordinasi yang terjalin menempatkan Kepala Desa Sebagai pejabat tertinggi dimana saetiap bagian-bagian organisasi terhubung dengan rantai komando langsung ke Kepala Desa. Dalam segi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pengurus Desa mereka diberikan secara penuh untuk mengambil keputusan sendiri selama tidak melanggar AD/ART yang ada. Sebagaiman hasil wawancara dengan Kepala Desa Siswo Bangun:

“ya kalau untuk keputusan itu biasanya diberikan kewenangan kepada saya untuk memutuskan keputusan akhir mengenai Program Padat Karya Tunai Desa ini namun keputusan yang diambil tetap saja harus dari hasil musyawarah bersama”

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Bapak Kaur Umum Desa Siswo Bangun:

“untuk masalah intern yang sifatnya di dalam itu dari aparatur Desa Siswo Bangun saja. Tapi untuk yang eksternal misalnya yang berkaitan dengan masyarakat dengan desa itu dengan musyawarah desa bersama”

2) *Standard Operating Procedure (SOP)*

Implementasi kebijakan Program Padat Karya Tunai Desa di Desa Siswo Bangun belum memiliki SOP atau prosedur-prosedur kerja secara detail hanya saja mengikuti aturan peraturan desa dan AD/ART Desa Siswo Bangun. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan sekretaris Desa Siswo Bangun:

“harusnya ada ya, tapi untuk saat ini ada dalam bentuk umumnya itu ya mengikuti peraturan yang ada dalam AD/ART tapi SOP yang lebih kebawah yang lebih khususnya belum ada”

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Kasi Pemerintahan Desa Siswo Bangun:

“belum ada SOP nya mbak, untuk sekarang ya mgnikuti SOP dari pemerintah aja. Ya mengikuti peraturan yang ada yang penting tidak melanggar aturan-aturan dari perintah yang ada”⁹⁴

Hal ini senada dengan yang disampaikan Kepala Kampung Siswo Bangun:

⁹⁴ “Hasil Wawancara dengan Kaur Pemerintahan.” 6 April 2023.

“untuk sekarang ini belum ada kayanya”

Hal ini sama seperti yang disampaikan oleh Kasi Kesejahteraan dan Kaur Umum Desa Siswo Bangun:

“sementara ini untuk SOP khususnya itu belum ada mbak tapi kita pake SOP yang ada dari Pemerintah”⁹⁵



⁹⁵ “Hasil Wawancara dengan Kaur Umum.” 7 April 2023.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Implementasi Kebijakan Program Padat Karya Tunai Desa dalam mengurangi pengangguran di desa Siswo Bangun Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah

1. Implementasi Kebijakan Program Padat Karya Tunai Desa Siswo Bangun

Salah satu rencana pemerintah dalam meningkatkan perekonomian desa adalah dengan program yang dikenal dengan sebutan Padat Karya Tunai Desa. Program Padat Karya Tunai pada awalnya diinisiasi melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri Yaitu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Desa dan Pemabngunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa), serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Keempat kementerian tersebut diberikan mandate oleh presiden untuk merancang berbagai kebijakn mengenai penyelarasan dan penguatan kebijakan percepatan pelaksanaan Undang-Undang Desa yang diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara swakelola. Dalam pengimplementasian kebijakan tersebut semua kementerian dan lembaga harus saling bersinergi dan berkonsolidasi dalam rangka mendukung program presiden yang mengarah ke desa.

Padat Karya Tunai digalakkan guna mendukung kebijakan presiden agar berbagai program yang ditujukan ke desa dilakukan dengan model padat karya. Pemerintah ingin mewujudkan desa sebagai tempat yang dapat mengakomodasi berbagai pilihan dan kesempatan bagi masyarakat secara lebih mandiri dan inklusif. Undang-Undang Desa mengukuhkan bahwa pada dasarnya pengalokasian Dana Desa bertujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat desa secara swadya dan swakelola, dimana kebijakan padat karya tunai desa merupakan salah satu amanat dari Undang-Undang tersebut yang harus diimplementasikan kepada masyarakat desa.

Dalam analisis data ini, peneliti akan menganalisis menggunakan teori implementasi menurut George C. Edward III. Dalam pendekatan Edward III, terdapat empat indikator yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Indikator tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Analisis yang dilakukan oleh peneliti melalui indikator tersebut adalah sebagai berikut:

a. Komunikasi

Komunikasi antar pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan merupakan tahap awal dari tahap implementasi kebijakan. Komunikasi Program Padat Karya Tunai Desa merupakan penyampaian kebijakan dari pembuat kebijakan kepada yang akan melaksanakan kebijakan dan diefektifkan lagi dengan disampaikan juga kepada kelompok sasaran kebijakan serta pihak lain yang berkepentingan. Sebagaimana dikemukakan oleh Edward III bahwa keputusan kebijakan dan perintahnya harus diteruskan kepada orang yang tepat dan dikomunikasikan dengan akurat dan jelas serta dapat dimenerti dan mudah dipahamidengan cepat oleh pelaksana. Tiga hal yang perlu ditekankan dalam melaksanakan komunikasi menurut George C. Edwards III adalah transmisi komunikasi, konsistensi dalam penyampaian informasi dan kejelasan informasi yang disampaikan. Dari hasil penelitian disebutkan bahwa proses transmisi komunikasi yang terjadi antara internal aparatu pemerintah desa Siswo Bangun berjalan dengan baik, karna dalam mengambil setiap tindakan serta keputusan tentang Program Padat Karya Tunai

Desa ini dilakukan dengan cara musyawarah bersama sehingga keputusan yang akan diambil adalah keputusan bersama aparat desa Siswo Bangun contohnya seperti sosialisasi tentang Program Padat Karya Tunai Desa ini aparat desa dengan sigap dan cepat membahas hal tersebut agar program ini bisa secara cepat sampai kepada masyarakat Desa Siswo Bangun. Sedangkan transmisi komunikasi yang terjadi antara eksternal aparat desa dengan masyarakat Desa Siswo Bangun sudah hampir baik cara yang digunakan aparat Desa Siswo Bangun dalam menyampaikan program Padat Karya Tunai Desa ini kepada masyarakat adalah dengan cara mensosialisasikannya kepada masyarakat.

Indikator kedua adalah kejelasan informasi. Menurut hasil penelitian penyampaian informasi yang disampaikan sudah cukup jelas hal ini karena komunikasi yang dilakukan oleh aparat Desa Siswo Bangun kepada masyarakat sudah cukup rinci dan detail dan mudah dipahami sehingga masyarakat mampu menyerap informasi dengan baik dan jelas. Contohnya seperti apa itu Padat Karya Tunai Desa kemudian apa tujuannya dan bagaimana manfaatnya dan selain dengan sosialisasi secara langsung aparat Desa Siswo Bangun juga melakukan sosialisasi dengan memanfaatkan sosial media agar untuk masyarakat yang belum begitu paham bisa menayakan tentang Padat Karya Tunai Desa ini secara online.

Selanjutnya, indikator ketiga yaitu konsistensi dalam penyampaian informasi. Dari hasil penelitian konsistensi komunikasi sudah dilaksanakan oleh aparat desa Siswo Bangun dikarenakan memang penyampaian tentang Program Padat Karya Tunai Desa ini ke masyarakat hanya dilakukan sekali dalam satu tahun jadi bagi aparat desa Siswo Bangun hal

tersebut bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan secara konsisten.

Komunikasi merupakan tolak ukur dan merupakan hal yang penting untuk mengetahui seberapa jauh kebijakan dalam bentuk suatu peraturan telah disampaikan secara jelas dengan interpretasi yang sama dan dapat dilakukan secara konsisten dengan aparat pelaksana peraturan tersebut. Implementasi kebijakan akan berjalan secara efektif bila mereka yang melaksanakan keputusan mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Komunikasi-komunikasi Program Padat Karya Tunai Desa sudah cukup efektif dan terserap dengan baik oleh masyarakat yang menjadi sasaran dari program ini.

b. Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan karena bagaimanapun baiknya kebijakan atau program dirumuskan tanpa adanya dukungan dari sumber daya yang memadai maka kebijakan akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan kebijakannya. Sumber daya dalam penelitian ini yang akan dianalisis mencakup jumlah pekerja yang memadai dengan keahlian yang memadai, Informasi yang tersedia, anggaran dan sarana dan prasarana-sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa ini. memadai yang dimaksudkan adalah jumlah para pelaksana harus sesuai dengan jumlah tugas yang dibebankan maupun kemampuannya, dan keterampilan yang dimiliki baik teknis maupun material.

Indikator pertama adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang utama adalah pemerintah Desa Siswo Bangun dan masyarakat yang menjadi pihak yang melaksanakan operasional Padat

Karya Tunai Desa di Siswo Bangun. Pneliti mendapatjan data bahwasannya penggerak daripada program Padat Karya Tunai Desa ini sama seperti aparatuer pemerintahan Desa Siswo Bangun. Dalam segi kuantitas hal ini dianggap sudah cukup untuk melakukan operasional program Padat Karya Tunai Desa. Namun dalam hal kualitas untuk sumber daya manusia masih kurang karena rata-rata tingkat pendidikan masih tingkat sekolah menengah atas. Namun disisi lain kemampuan mereka untuk membuat atau menyusun dokumen laporan pertanggungjawaban sudah cukup modern dan tidak manual sehingga untuk pengelolaan administrative sudah terkelola dengan cukup baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, sumber daya manusia dalam menjalankan program Padat Karya Tunai Desa di Siswo Bangun ini sudah cukup berjalan dengan baik namun memang harus lebih ditingkatkan lagi.

Selanjutnya sumber daya informasi yaitu segala keterangan dalam bentuk tulisan atau pesan, pedoman, petunjuk dan tata cara pelaksanaan yang bertujuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Dari hasil penelitian mendapatkan data bahwa sumber daya informasi dinilai cukup baik semua informasi dalam pelaksanaan program Padat Karya Tunai Desa sudah tertuang dalam AD/ART (Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga) baik pedoman, petunjuk dan tata cara pelaksanaan dan tujuan.

Sumber daya anggaran program Padat Karya Tunai Desa juga akan di kaji disini. Peneliti mendapatkan data bahwa sumber daya finansial dirasa sudah cukup untuk menjalankan operasional program Padat Karya Tunai Desa karena memang sudah ada peraturan mengenai finansial untuk program ini dari pemerintah pusat. Oleh karena itu peneliti mendapatkan data bahwasannya saran dan prasarana

ituntut program Padat Karya Tunai Desa ini sudah cukup memadai karena memang ada yang disediakan dari aparat desa da nada yang menggunakan prasarana dari masyarakat yang ikut bekerja dalam program Padat Karya Tunai Desa ini.

Teori mengatakan bahwasannya keberhasilan proses implementasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan suatu organisasi dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Sesuai dengan teori menurut Edward III mengenai sumber daya yang paling utama. Kegagalan yang sering terjadi dalam suatu implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh sumber daya manusia yang tidak mencukupi dan memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan orang saja tidak cukup tetapi juga diperlukan kemampuan yang sesuai dengan bidangnya dan juga yang diperlukan dalam

mengimplementasikan kebijakan. Jadi untuk mencapai implementasi yang baik dibutuhkan sumber daya yang seimbang antara kuantitas dan kualitas. Berdasarkan teori dan data tersebut, maka dapat dianalisis bahwa sumber daya yang ada baik manusia maupun sarana-prasarana sudah cukup berjalan dengan efektif.

c. Disposisi

Disposisi merupakan kecenderungan sikap, keinginan dan komitmen pelaksanaan kebijakan untuk melaksanakan sebuah kebijakan yang ditetapkan. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Dalam implementasi program Padat Karya Tunai Desa Siswo Bangun berkomitmen dalam melakukan

implementasi program Padat Karya Tunai Desa dinilai sudah baik. Aparatur Desa Siswo Bangun sudah berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menjalankan program-program yang ada dengan meminimalkan kerugian. Namun kiranya masih perlu adanya kerja sama lagi dari aparatur desa dengan masyarakat setempat untuk mendukung program ini agar berjalan sesuai dengan tujuan.

Sesuai dengan teori Edward III, yang menjadi perhatian mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan yaitu mengenai masalah rekrutmen pekerja dan pemberian insentif atau upah. Terkait dengan upah yang diberikan itu sudah diatur dalam AD/ART dimana para pekerja mendapatkan uang senilai RP. 50.000,00 dan itu sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Maka dapat dianalisis bahwa disposisi atau kepengurusan program Padat Karya Tunai Desa ini sudah berjalan dengan baik.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi termasuk salah satu faktor yang penting dalam implementasi kebijakan program Padat Karya Tunai Desa. Ada dua karakteristik utama dari birokrasi menurut Edward, yaitu prosedur-prosedur kerja ukuran dasat atau sering disebut sebagai *Standart Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi. Mengenai struktur birokrasi dan SOP ini tercantum dalam AD/ART.

Menurut hasil penelitian pada struktur organisasi dalam menjalan program Padat Karya Tunai Desa ini sama dengan struktur pemerintahan pada Desa Siswo Bangun dimana memisahkan dengan jelas kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lainnya dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi ini pola koordinasi yang terjalin menempatkan Kepala Desa Siswo Bangun sebagai

pejabat tertinggi dimana setiap bagian-bagian organisasi terhubung langsung dengan rantai komando langsung ke Kepala Desa Siswo Bangun. Masing-masing pihak mengetahui wewenang sesuai dengan prosedur yang berlaku yang terdapat pada AD/ART. Kewenangan yang dimiliki oleh sumber daya manusia adalah kewenangan setiap pelaksana untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang diamanatkan dalam suatu kebijakan, peneliti mendapatkan data kewenangan setiap pelaksana untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang diamanatkan dalam suatu kebijakan. Peneliti mendapatkan data kewenangan yang didapatkan setiap individu belum tersusun dengan baik. Hal ini dikhawatirkan dapat menyebabkan timbulnya hambatan dalam koordinasi.

Sedangkan *Standart Operating Procedure* (SOP) implementasi kebijakan Padat Karya Tunai Desa di Siswo Bangun belum memiliki SOP atau prosedur-prosedur kerja secara detail hanya saja mengikuti aturan peraturan dari pemerintah pusat dan AD/ART desa Siswo Bangun. Hal ini sesuai dengan teori menurut George C. Edward III yang mengatakan bahwa SOP mungkin menghalangi implementasi kebijakan baru yang akan membutuhkan cara-cara kerja atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan. Semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara lazim dari suatu organisasi, semakin besar pula SOP menghambta implementasi. Oleh karena itu, SOP yang sederhana tidak akan menyulitkan aparat pelaksana dalam menjalankan suatu kebijakan tanpa mengurangi makna secara keseluruhan. Berdasarkan data dan teori tersebut, maka dapat dianalisis bahwa struktur birokrasi kepengurusan untuk menjalankan program Padat Karya Tunai Desa ini sudah berjalan dengan baik.

Menurut teori implementasi kebijakan George Edward III, implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan public tidak akan terwujud. Begitu pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau kebijakannya tidak dirumuskan dengan baik maka apa yang menjadi tujuan juga tidak akan bisa dicapai. Evaluasi implementasi Edward menyatakan bahwa ada empat variable krusial dalam implementasi tersebut beroperasi secara simultan dan saling berinteraksi satu sama lainnya.

Dari analisis yang dilakukan oleh peneliti dapat diambil kesimpulan bahwa untuk implementasi kebijakan program Padat Karya Tunai Desa ini untuk pengimplementasiannya seperti komunikasi yang terjadi antar masyarakat desa dengan aparatur desa kemudian sumber daya yang ada dan disposisi yang ada sudah berjalan dengan cukup baik. Hal ini bisa dilihat dari sudah terpenuhinya indikator-indikator keberhasilan dari implementasi kebijakan. Hanya saja dalam penelitian dalam struktur birokrasi dalam pengimplementasiannya belum sesuai dengan yang seharusnya karena pemerintah desa Siswo Bangun tidak memebentuk kepengurusan baru dalam pelaksanaan Kebijakan Padat Karya Tunai Desa ini dan tetap menggunakan kepengurusan seperti yang ada di pemerintahan desa. Seharusnya dalam pengimplementasian dibentuk Tim Pengelola Kegiatan yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang atau jasa serta Tim Teknis Kegiatan yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pembangunan.

B. Program Padat Karya Tunai Desa dalam Mengurangi Pengangguran di Desa Siswo Bangun

Pemerintah pusat memberikan acuan dalam pelaksanaan Padat karya Tunai Desa agar sesuai dengan target yang ingin dicapai. Acuan tersebut harus menjadi pedoman bagi desa sehingga program Padat Karya Tunai Desa ini tepat sasaran. Program Padat Karya Tunai Desa ini wajib ditujukan bagi masyarakat kurang mampu sesuai kriteria penerima manfaat yang telah dirancang. Dalam jangka panjang berdampak pada peningkatan pendapatan (*income generating activities*) tanpa sepenuhnya menggantikan pekerjaan yang lama, sehingga penduduk setengah menganggur dapat memperoleh penghasilan tambahan tanpa harus beralih dari pekerjaan utamanya. Karakteristik masyarakat di wilayah pedesaan mayoritas bekerja sebagai petani dengan waktu bekerja yang menyesuaikan dengan musim. Pekerjaan seperti ini sangat cocok ketika mereka sedang tidak ada pekerjaan yang bisa dikerjakan di sawah atau lading. Untuk itu, pemerintah tidak menganjurkan pelaksanaan Program Padat Karya Tunai Desa ini pada saat musim panen berlangsung.

Padat Karya Tunai Desa juga ditujukan untuk menyediakan lapangan pekerjaan sementara bagi penduduk yang belum mempunyai pekerjaan atau yang sedang tidak mempunyai pekerjaan dengan harapan agar masyarakat memperoleh penghasilan sebelum mereka mendapatkan pekerjaan tetap. Pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja yang disusun sendiri oleh desa sesuai dengan musyawarah mufakat sesuai rencana yang telah ditetapkan bersama. Program ini harus difokuskan pada pembangunan sarana dan prasarana pedesaan dengan pendayagunaan sumber daya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat.

Padat Karya Tunai Desa merupakan program pemerintah berupa kegiatan pemberdayaan masyarakat

desa, khususnya bagi masyarakat miskin, pengangguran, setengah menganggur dan stunting. Bersifat produktif yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja dan teknologi local untuk menambah pendapatan, mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengaturan desa bertujuan antara lain untuk memajukan perekonomian masyarakat desa, mengatasi kesenjangan pembangunan serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan.

Untuk pelaksanaan program Padat Karya Tunai Desa ini diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat, mengurangi angka gizi buruk, mengurangi kemiskinan, menggerakkan ekonomi desa serta mengembangkan kawasan pedesaan. Ada 2 (dua) hal yang menjadi sasaran program Padat Karya Tunai Desa, yaitu pembangunan infrastruktur dan peningkatan perekonomian masyarakat. Pokok pelaksanaan program Padat Karya Tunai Desa adalah penganggaran kegiatan-kegiatan yang bersifat padat karya yang didanai Desa dalam APDes.

Untuk pembangunan infrastruktur di desa program Padat Karya Tunai Desa, program kegiatan Padat Karya Tunai Desa antara lain tata guna air irigasi (P3TGAI), operasi dam pemeliharaan irigasi, pengembangan infrastruktur sosial ekonomi dan ekonomi wilayah, program penyediaan air minum berbasis masyarakat, sanitasi berbasis masyarakat serta pemeliharaan rutin jalan.

Dari data dan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti jadi program Padat Karya Tunai Desa yang dijalankan di Desa Siswo Bangun ini dari tahun 2020-2022 yakni pembuatan tata guna air atau irigasi yang sudah dilaksanakan di tiga dusun yakni pada tahun 2020 dikerjakan di dusun tegal rejo kemudian pada tahun 2021

di laksanakan pada dusun meta raman, sedangkan pada tahun 2022 Padat Karya Tunai Desa ini dilaksanakan pada dusun Karang Sari.

Karena di Desa Siswo Bangun diterapkan nya program Padat Karya Tunai Desa ini salah satu tujuannya adalah untuk mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Desa Siswo Bangun.

Gambar 4.1

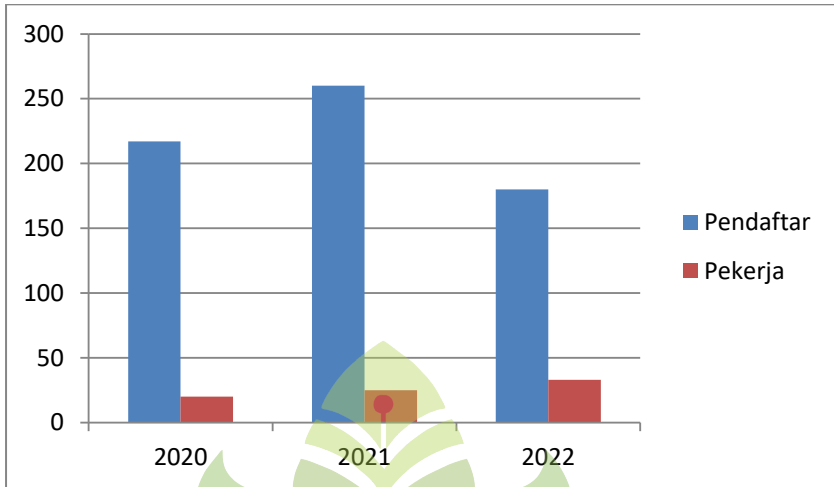
jumlah pengangguran di Desa Siswo Bangun tahun 2020-2022:



Sumber Data: Kantor Desa Siswo Bangun diolah tahun 2023

Jumlah pengangguran di Desa Siswo Bangun cukup tinggi terjadi pada tahun 2020 yakni berjumlah 345 orang. Jumlah yang cukup tinggi ini merupakan dampak dari adanya wabah penyakit *covid-19* yang menyerang, banyaknya warna yang terkena pemutusan hubungan kerja menjadi penyebab meningkatnya pengangguran khususnya di Desa Siswo Bangun.

Gambar 4.2
jumlah pendaftar untuk program PKTD 2020-2022



Sumber Data: Kantor Desa Siswo Bangun Diolah Pada Tahun 2023

Jumlah pendaftar untuk program Padat Karya Tunai Desa ini cukup banyak masyarakat yang mendaftar pendaftar terbanyak ada pada tahun 2021. Jumlah pekerja yang terdaftar untuk Program Padat Karya Tunai Desa ini dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 tidak terlalu bisa menekan jumlah pengangguran yang ada di Desa Siswo Bangun.

C. Analisis implementasi kebijakan program Padat Karya Tunai Desa dalam mengurangi pengangguran di Desa Siswo Bangun dalam perspektif ekonomi islam

Mengurangi pengangguran di Indonesia bukanlah merupakan hal yang mudah, masalah pengangguran masih menjadi masalah yang cukup besar yang dihadapi di Negara ini. oleh karena itu pemeitah selalu berupaya mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi angka

pengangguran di Indonesia salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam mengatasi pengangguran adalah melalui Progra Pa

dat Karya Tunai Desa yang ditujukan keberbagai desa agar bisa di implementasikan di seluruh desa di Indonesia.

Program Padat Karya Tunai Desa ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat

Dengan mengembangkan potensi serta memanfaatkan sumber daya yang ada baik sumber daya manusia dan yang lainnya.

Dengan adanya program Padat Karya Tunai Desa di Desa Siswo Bangun ini diharapkan para aparatur desa dan masyarakat setempat mampu bekerja sama dengan baik dalam mengimplementasikan program Padat Karya Tunai Desa ini

agar berjalan sebagaimana mestinya sehingga mampu mengurangi angka pengangguran yang ada di Desa Siswo Bangun. Serta masyarakat yang menjadi sasaran dari program Padat Karya Tunai Desa ini dapat bersemangat dan dapat mengembangkan potensi seta berusaha untuk dapat meningkatkan taraf hidup yang lebih baik lagi.

Sebagaimana telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an Ar'rad ayat 11:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Sebagaimana telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an Ar'rad ayat 11:

11:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Terjemahan Kemenag 2019

11. Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Dalam tafsir Al-Muyassar pada surat Ar-rad ayat 11 mengatakan: Allah memiliki malaikat-malaikat yang

senantiasa mengikuti manusia secara bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya dengan perintah Allah dan mereka mencatat apa yang muncul darinya berupa kebaikan atau keburukan. Sesungguhnya Allah tidak merubah kenikmatan yang telah diberikan-Nya kepada suatu kaum kecuali jika mereka merubah apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka lalu mereka mendurhakai-Nya. Apabila Allah menghendaki petaka kepada suatu kaum maka tidak ada tempat berlari darinya. Mereka tidak mendapatkan selain dari Allah seorang pelindung pun yang mengurus urusan mereka, lalu suatu yang disenangi didatangkan kepada mereka dan suatu yang tidak disenangi dihindarkan dari mereka.

Pada dasarnya kebijakan program Padat Karya Tunai Desa yang dilaksanakan di Desa Siswo Bangun termasuk upaya menggerakkan roda perekonomian di desa yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan mengurangi pengangguran khususnya masyarakat desa Siswo Bangun yang diarahkan untuk mencapai tujuan dari Padat Karya Tunai Desa itu sendiri. Kesejahteraan ekonomi yang berhasil dicapai oleh masyarakat merupakan hasil kerja kolektif dari semua komponen dalam masyarakat tersebut.

Pemerintah dan masyarakat pada dasarnya adalah dua institusi yang memiliki fungsi untuk merealisasikan segala kewajiban kolektif untuk mewujudkan falah. Berntuk peran keduanya, karenanya pada hakikatnya dapat saling bertukar sesuai dengan situasi dan kondisi. Peran masyarakat akan menjadi semaki penting manakala pemerintah tidaak dapat menjalankan tugas dengan baik.

Dalam pandangan ekonomi islam implementasi Padat Karya Tunai Desa dalam mengurangi pengangguran di Desa Siswo Bangun yang juga dapat dilihat dari nilai-nilai dasar ekonomi islam sebagai berikut:

1. *Adl*

Keadilan merupakan nilai paling asasi dalam ajaran islam. Menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan utama risalah para rasul. Ibn taimiyah

menyebut keadilan sebagai nilai utama dari tauhid, sementara Muhammad Abduh menganggap kezaliman sebagai kejahatan yang paling buruk dalam kerangka nilai-nilai islam. Sayyid Qutb menyebut keadilan sebagai unsur pokok yang komprehensif dan terpenting dalam semua aspek kehidupan.

Setiap umat muslim diperintahkan untuk adil dalam setiap hal diperintahkan untuk adil dalam setiap hal termasuk dalam bidang ekonomi. Prinsip adil dalam setiap hal termasuk di bidang ekonomi. Prinsip adil merupakan pilar penting dalam ekonomi islam. Allah telah menurunkan islam sebagai system kehidupan bagi seeluruh umat manusia, menekan kan pentingnya keadilan dalam setiap sektor dengan memanfaatkan potensi yang ada pada suatu wilayah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program Padat Karya Tunai Desa dalam menjalankan programnya tentu berhubungan dengan pihak masyarakat dalam bentuk kerja sama yang nantinya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat tersebut. Ekonomi islam mengajarkan agar dalam melakukan kegiatan dalam perekonomian yang melibatkan dua orang atau lebih harus ada jalinan ikatan yang jelas diantara mereka. Mekanisme dalam penentuan dan pembagian upah dibangun secara partisipatif dalam musyawarah desa. Harus ada keepakatan antara pemerintah desa dengan pekerja terkait penentuan besaran upah yang akan diberikan dan tentunya harus mengacu pada standar upah dikabupaten setempat.

Dalam pengimplementasian program Padat Karya Tunai Desa ini bedasarkan hasil observasi dan wawancara bahwasanya pemerintah desa sudah menerapkan nilai adil dalam pengimplementasian Program Padat Karya Tunai Desa ini dilihat dari cara merekrut para pekerja, masyarakat diberikan kebebasan untuk mendaftarkan

sendiri dirinya untuk menjadi pekerja dalam program ini sehingga ini terbuka untuk masyarakat umum. Namun untuk menentukan siapa saja yang berhak menjadi pekerja adalah pemerintah desa dengan mempertimbangkan dan melihat sasaran dan tujuan dari program Padat Karya Tunai Desa ini. Selanjutnya, pemerintah desa Siswo Bangun juga sudah menerapkan system adil dalam pembagian upah sesuai dengan kesepakatan bersama antara masyarakat yang akan berpartisipasi dalam program ini dengan Pemerintah Desa Siswo Bangun.

2. *Khalifah*

Nilai *khalifah* secara umum berarti tanggung jawab sebagai pengganti atau utusan Allah di alam semesta terhadap apa-apa yang telah dikuasakan kepadanya, dalam bentuk sikap dan perilaku manusia terhadap Allah, sesama dan alam semesta. Manusia diciptakan Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi, yaitu menjadi wakil Allah untuk memakmurkan bumi dan alam semesta.

Dalam program Padat Karya Tunai Desa di desa Siswo Bangun ini sudah mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang pengangguran sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan perekonomian bagi para pekerja khususnya. Contoh nilai khilafah yang diterapkan dalam pengimplementasian program Padat Karya Tunai Desa di Desa Siswo Bangun ini contohnya adalah dari aparatur desanya yang menerapkan nilai khilafah yakni dengan cara bertanggung jawab menyampaikan tentang adanya Program Padat Karya Tunai Desa ini ke masyarakat yang memang benar-benar menjadi sasaran atau tujuan dari program Padat Karya Tunai Desa ini. sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Masadi Selaku kepedal desa bahwasanya setelah kami mendapatkan kebijakan ini maka kami menyampaiannya kepada masyarakat dengan cara mensosialisasikannya di Balai Desa.

Kemudian juga ada dari pihak masyarakat yang menjadi pekerja dalam program Padat Karya Tunai Desa ini bahwasanya mereka juga sangat berperan penting dalam keberhasilan program ini yakni para pekerja sangat harus bertanggung jawab dalam pekerjaan mereka yakni membuat siring atau irigasi. Selain menjalankan pekerjaan itu mereka juga masih memiliki tanggung jawab yakni dengan tetap menjaga kelestarian alam dan tidak merusak lingkungan. Ini menandakan bahwasanya para implementor yang menjalankan proram Padat Karya Tunai Desa di Siswo Bangun ini sudah menerapkan sikap tanggung jawab sebagai *khalifah* dimuka bumi ini.

3. Takaful

Takaful didasarkan pada prinsip tolong menolong sesama muslim dan manusia. Islam mengajarkan bahwa umat manusia merupakan keluarga besar kemanusiaan. Untuk dapat diselenggarakannya kehidupan bersama umat harus tolong menolong. Ayat Al-Qur'an surat al-maidah ayat 2 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْأَقْلَابِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرُ مِنْكُمْ شَنْآنٌ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahan Kemenag 2019

2. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! 197) Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka

menghalang-halangi-mu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.

Qur'an surah al-maidah ayat dua sangat jelas mendeklarasikan keniscayaan tolong menolong dalam mengemban misi kemanusiaan menuju kebajikan dan takwa. Dalam konteks ini tolong menolong dalam kebajikan diwujudkan dalam kegiatan takaful yatu saling menanggung, saling menjaga amanah, saling melindungi dan saling bertanggung jawab.

Islam mengajarkan bahwasanya seluruh manusia adalah bersaudara. Jaminan masyarakat ini merupakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Jaminan masyarakat ini tidak hanya bersifat material melainkan juga bersifat ma'awiy. Konsep takaful ini bisa dijabarkan lebih lanjut menjadi sebagai berikut.

Jaminan terhadap pemilik dan pengelolaan sumber daya oleh individu memiliki dan mengembangkan sumber daya ekonomi. Oleh karena setiap individu dalam pandangan islam mempunyai hak untuk itu, tidak diperbolehkan memonopoli suatu barang atau sumber daya ekonomi untuk kepentingan pribadi. Sebagaimana yang sudah terlaksana dalam program Padat Karya Tunai Desa di Siswo Bangun bahwasannya dengan adanya program ini sangat membantu masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan atau masyarakat yang setengah menganggur untuk mendukung roda perekonomian masyarakat. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Fatkhur Rahim selaku sekretaris desa Siswo Bangun bahwasannya program ini sangat bagus untuk membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang menganggur khususnya di Desa Siswo Bangun. Hal ini senada dengan

yang dikatakan oleh bapak Suhar selaku masyarakat beliau mengatakan dengan adanya program ini cukup membantu dirinya yang belum mempunyai jadi memiliki pekerjaan dan memiliki penghasilan. Sebagaimana hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwasannya aparatur desa dan masyarakat yang sedang menjalankan program Padat Karya Tunai Desa di Ssiswo Bangun ini sudah menerapkan nilai dasar ekonomi islam yakni nilai *takaful* yakni dengan cara saling membantu seperti pemerintah desa meberkan informasi mengenai adanya program Padat Karya Tunai Desa ini kepada masyarakat kemudian pemerintah desa merekrut masyarakat yang memang benar-benar menjadi sasaran dari program Padat Karya Tunai Desa ini.

Berdasarkan nilai-nilai dasar ekonomi islam diatas dapat dilihat bahwa nilai dasar ekonomi *khalifah*, *takaful* dan *adl*

telah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh aparatur desa dan masyarakat yang menjadi pelaksana dari program Padat Karya Tunai Desa ini dan dalam pelaksanaan kebijakan Padat Karya Tunai Desa ini tetap berprinsip kepada aturan-aturan islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan teori pengumpulan data dan analisis yang telah dilakukan mengenai implementasi kebijakan Padat Karya Tunai Desa dalam Mengurangi Pengangguran di Desa Siswo Bangun Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Implementasi Kebijakan Padat Karya Tunai Desa Sudah dapat dikatakan cukup maksimal. Hal tersebut dikarenakan sudah terpenuhinya indikator-indikator keberhasilan dari implementasi kebijakan. Mulai dari komunikasi, sumber daya dan disposisi yang sudah dilakukan oleh Aparatur Desa Siswo Bangun, hanya saja Program Padat Karya Tunai Desa ini belum bisa mengatasi masalah pengangguran yang ada di Desa Siswo Bangun dikarenakan lapangan pekerjaan yang tersedia belum dapat mencukupi jumlah pendaftar program Padat Karya Tunai Desa tersebut, dan juga sifat pekerjaan dari Padat Karya Tunai Desa ini hanya bersifat sementara.
2. Implementasi kebijakan padat karya tunai desa memiliki potensi untuk mengurangi tingkat pengangguran di Desa Siswo Bangun. Dengan memberikan pekerjaan kepada penduduk desa dalam berbagai proyek infrastruktur dan pelayanan publik, kebijakan ini dapat menciptakan lapangan kerja baru dan memberikan pendapatan kepada warga desa. Namun dari data yang diperoleh di desa siswo bangun keberadaan PKTD ini belum sepenuhnya dapat menyerap pengangguran yang ada di Desa Siswo Bangun.
3. Berdasarkan nilai-nilai dasar ekonomi islam implementasi Kebijakan Padat Karya Tunai Desa dalam mengurangi pengangguran di Desa Siswo Bangun telah sesuai dengan keadilan, *khalifah* dan *takaful* dalam penerapan kebijakan Padat Karya Tunai Desa baik dari Aparatur Desa maupun masyarakat yang terlibat.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa saran kepada pihak-pihak yang tertarik pada penelitian tentang implementasi kebijakan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dalam mengurangi pengangguran di desa. Berikut beberapa saran yang diberikan peneliti:

1. Pemerintah desa diharapkan menerapkan kepengurusan sendiri untuk program Padat Karya Tunai Desa dan juga diharapkan merekrut pengurus menggunakan kriteria yang sesuai agar dapat berjalan lebih baik lagi serta sesuai dengan tujuan dari program Padat Karya Tunai Desa itu sendiri. Untuk pengelolaan laporan program ini tetap memanfaatkan teknologi khususnya dalam pembukuan sehingga pengelolaan keuangan bisa teradministrasi dengan baik serta dalam melakukan kerja sama dengan masyarakat diharapkan untuk melakukan perjanjian tertulis agar lebih jelas.
2. Pemerintahan desa Siswo Bangun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu evaluasi dan koreksi agar segala bentuk kerjasama dilakukan secara tertulis dan dapat menyampaikan informasi secara detail dan jelas. Serta dapat mempertahankan serta meningkatkan segala kegiatan Padat Karya Tunai Desa karena sudah sesuai dengan ekonomi islam.

DAFTAR RUJUKAN

- Abbas, Anwar. "Sistem Ekonomi Islam: Suatu Pendekatan Filsafat, Nilai-Nilai Dasar, Dan Instrumental." *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 4, no. 1 (2016).
- adib. *Padat Karya Tunai Desa*. Yogyakarta: deepublish, 2020.
- . *Padat Karya Tunai Desa*. Yogyakarta: deepublish, 2020.
- Aswad, Muhammad. "Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam – ISSN 2089-7227 (p) 2598-8522 (E)." *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam* 6, no. 1 (2021): 1–22.
- Azharsyah, Etc. *Pengantar Ekonomi Islam*, 2021.
- Bakar, Abu. "Konsep Dasar Ekonomi Islam Ditengah Konservatisme Pemikiran Ekonomi Modern Di Indonesia." *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 4, no. 1 (2020): 84–94.
- Budiasa, Anak Agung Gde Rai, A. A. Gde Raka, and I Made Mardika. "Implementasi Kebijakan Padat Karya Tunai (PKT) Pada Masyarakat Miskin Di Desa Lebih, Gianyar." *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik* 4, no. 2 (2019): 71–82.
- Dan, B Kode, Data Wilayah, Administrasi Pemerintahan, Kabupaten Kota, Kecamatan Dan, Desa Kelurahan, and Seluruh Indonesia. no. 33 (2007): 1–120.
- Delvian Yosuky, Felix Santono, Felycia Felycia, and Tio Sania. "Analisa Kebijakan Pemerintah Terkait Ancaman Pengangguran Pasca Kenaikan Inflasi." *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa* 1, no. 4 (2022): 181–87.
- Desa, Dana, Kabupaten Pasuruan, Analis Keuangan, and Direktorat Jenderal. "Implementasi Padat Karya Tunai," 2020, 25–35.
- Dian, Tiara Rama, and Muhammad Farid Ma'ruf. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Padat Karya Tunai (Studi Kasus Desa Plandaan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)." *Publika* 7, no. 4 (2019): 6. www.bps.go.id.
- Dr. Vladimir, Vega Falcon. "Gastronomia." *Gastronomía Ecuatoriana*

y *Turismo Local*. 1, no. 69 (1967): 5–24.

Edwards III, George. *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional, 1980.

Ekonomi, Globalisasi, D A N Pengangguran, Ari Setyawan, Universitas Lampung, and Universitas Lampung. “Studi Kasus Indonesia Menciptakan Atau Malah Menghilangkannya Studi Mengenai Dampak Globalisasi Ekonomi Dan Peneliti Karena Hasil Yang Berbeda-Beda . Beberapa Makalah Penelitian Menemukan Bahwa Keterbukaan Perdagangan Dapat Menurunkan Tingkat Penganggur” 10, no. 3 (2021): 263–78.

Fahmi, Nurul. “Norma Dan Nilai Dalam Ilmu Ekonomi Islam.” *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 11, no. 1 (2019): 105–23.

Firdhania, Riza, and Fivien Muslihatinningsih. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Di Kabupaten Jember Factors Affecting of Unemployment Rate in Jember Regency.” *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi* IV, no. 1 (2017).

Franita, Riska. “Analisa Pengangguran Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 1, no. 3 (2016): 88–93.

GFallis, A. “Teori Kebijakan Implementasi.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–99.

Herdiana, Deni. “Implementasi Padat Karya Tunai Dalam Menurunkan Penduduk Miskin Di Pedesaan Provinsi Lampung Dan Riau.” *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Ekonomi* 16, no. 02 (2019): 175–87.

Hutahaean, Marlan. “Perkembangan Teori Implementasi Kebijakan,” n.d., 81–150.

Indah, Apriani, Poti Jamhur, and Edison. “Online ISSN 2746-8453,” no. 2017 (2021): 327–37.

Kinanti, Cindy Sangri. “Analisis Tentang Setengah Penganggur Di Indonesia: Antara Sukarela Dan Keterpaksaan.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB [Universitas Brawijaya]* 3, no. 1 (2014): 1–22.

Latif, Abdul, Fakultas Syariah, Dan Ekonomi Islam, Iain Sultan, Amai Gorongtalo, Kata Kunci, Nilai Dasar, and Membangun Ekonomi

- Islam. "Nilai-Nilai Dasar Dalam Membangun Ekonomi Islam," 2021, 153–69.
- Mahroji, Dwi, and Iin Nurkhasanah. "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Banten." *Jurnal Ekonomi-Qu* 9, no. 1 (2019).
- Maisyaroh, Tetti. "Inflasi Dan Pengangguran Dalam Islam Inflation And Unemployment In Islam" 7, no. 1 (2023): 1–5.
- Mankiw, n. gregory. *Teori Makro Ekonomi*. Edited by Yati Sumiharti. 4th ed. Jakarta: Erlangga, 2000.
- Meilinda Nainggolan, Ellen, and Siti Mardiana. "Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tentang Program Bela Pengadaan." *Jurnal Manajmen Sumber Daya Manusia* 10 (2023): 1–16.
- Modesta, Maria, Missi Mone, Yosep Dyego, and Armando Nong. "Pengaruh Disiplin Kerja Dan Lingkungan Kerja Fisik Terhadap Kinerja Aparatur Pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Magepanda (Desa Kolisia , Desa Magepanda Dan Desa Reroroja)" 7 (2023): 4392–99.
- Moh, H. "Pemberdayaan Pendidikan Islam," 2013.
- moleong, lexy j. "Metedologi Penelitian Kualitatif," 2001, 135.
- Muafiah, Andi Firdha. "Implementasi Padat Karya Tunai Desa." *Ayan* 8, no. 5 (2019): 55.
- Muslim, Mohammad Rifqi. "Pengangguran Terbuka Dan Determinannya." *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan Volume 15, Nomor 2* 15, no. 2 (2014): 171–81.
- Mustanir, Ahmad, and Darmiah Darmiah. "Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarat Dalam Pembangunan Di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang." *Jurnal Politik Profetik* 4, no. 2 (2016): 225–38.
- Nurjihadi, M. "Strategi Pengembangan Program Padat Karya Tunai Desa (Pktd) Dengan Pendekatan Analisis Swot Di Desa Stowe Brang Kecamatan Utan." *Jurnal TAMBORA* 4, no. 2A (2020).

- Nursalim. "Implementasi Kebijakan Tentang Pemungutan Retribusi Pasar Oleh Unit Pelaksana Teknis Pasar Cikatomas Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017." *Studi Administrasi Publik*, 2017, 117–26.
- Olsson, John. "Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa" 1, no. 1 (2008): 305.
- Pawening, Astuti Sri, and Puji Lestari. "Implementasi Padat Karya Tunai....(Astuti Sri Pawening Dan Puji Lestari) Implementasi Program Padat Karya Tunai Dalam Mengurangi Pengangguran Di Desa Wonoenggal, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo," 2020, 2–14.
- Purwana, Agung Eko. "Pembangunan Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Justicia Islamica* 10, no. 1 (2013).
- Rahayu, Yunita, Muhammad Iqbal Fasa, and Kata Kunci. "Islamic Economics and Finance Journal Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang," n.d., 1–12.
- Risa, Hajar, Badaruddin Badaruddin, and Munir Tanjung. "Implementasi Program Padat Karya Tunai Dari Dana Desa Dalam Mengatasi Kemiskinan Masyarakat Desa Karang Gading." *Perspektif* 10, no. 2 (2021): 739–53.
- Robi. *Dasar- Dasar Ekonomi Islam*. CV. Adanu Abimata, 2020.
- Roni, Oleh, Ritonga Manembu, Albert W S Kusen, and Djefry Deeng. "Padat Karya Sebagai Kontribusi Kehidupan Masyarakat Pada Penggunaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Kaneyan Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan)." *Holistik* 12, no. 2 (2019): 1–21.
- Salim & Syahrums. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Setiawan, Muhammad Yusril Amar, and Suci Megawati. "Evaluasi Kebijakan Padat Karya Tunai Di Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo." *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 10, no. 2 (2022): 665–80.
- Setyawan, Dody, and Nanang Bagus Srihardjono. "Analisis Implementasi Kebijakan Undang-Undang Desa Dengan Model

- Edward III Di Desa Landungsari Kabupaten Malang.” *Jurnal Reformasi* 6, no. 2 (2016): 125–33.
- Sinaulan, Ryan David. “Masalah Ketenagakerjaan Di Indonesia.” *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Budaya* 5, no. 1 (2019): 55.
- Sisnita, Aisyah, and Nano Prawoto. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Di Provinsi Lampung (Periode 2009-2015).” *Journal of Economics Research and Social Sciences* 1 (2017): 1–7.
- Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Sleman: Literasi Media, 2015.
- SKB 4 (empat) Kementerian. “Surat Keputusan Bersama 4 Kementerian Nomor 140-8696/2017 Tentang Penyelarasan Dan Penguatan Percepatan UU 6 2014,”
- Somantri, Gumilar Rusliwa. “Memahami Metode Kualitatif.” *Makara Human Behavior Studies in Asia* 9, no. 2 (2005): 57.
- Subadi, tjipto. “Metode Penelitian Kualitatif,” 2006, 1–110.
- Subhan, Moh. “Pengangguran Dan Tawaran Solutif Dalam Perspektif Islam.” *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 3, no. 1 (2018): 22–33.
- Suhandi, Hendra Wijayanto, and Samsul Olde. “Dinamika Permasalahan Ketenagakerjaan Dan Pengangguran Di Indonesia.” *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika* 13, no. 1 (2020): 85–94.
- Tabo, Sarfan, Rahim Gobel, Universitas Negeri Makassar, Universitas Gorontalo, and Masyarakat Desa. “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Padat,” no. 140 (2022): 73–80.
- Tachijan. *Implementasi Kebijakan Publik*, n.d.
- “Wawancara,” 2023.
- Wijaya, Muhamad Rudi, M Bahri Ghazali, Sonhaji, and Heni Noviarita. “Community Participation in Utilization of Village Funds on Empowerment of Islamic Communities in East Lampung District.” *Prosiding ICSMR* 1, no. 1 (2020): 60–73.

Wildan, Muhammad, and Muhammad Wildan. “Sistem Ekonomi Islam Simbol Kesejahteraan Masyarakat.” *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2018): 49–64.



LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

Tanggal Wawancara:

Nama Responden:

Jabatan:

Usia:

Pendidikan Terakhir:

Subjek penelitian: Pemerintah desa

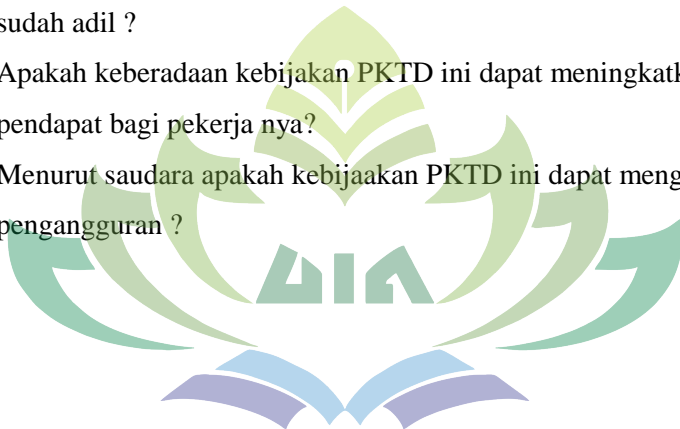
1. Kapankah pertama kali kebijakan padat karya tunai desa ini dilaksanakan di desa siswo bangun?
2. Apakah dalam pelaksanaan padat karya tunai desa ini dibentuk suatu kepengurusan tersendiri diluar dari kepengurusan pemerintah desa?
3. Bagaimana dengan pembagian kewenangan dan tanggung jawab antar bagian?
4. Bagaimana SOP padat karya tunai desa dalam pengelolaan pktd ini?
5. Bagaimana cara pengambilan keputusan terkait pengelolaan padat karya tunai desa ini?
6. Bagaimana cara pemerintah desa dalam mensosialisasikan tentang kebijakan padat karya tunai desa ini kepada masyarakat? Siapa saja yang terkiat dalam proses sosialisasi ?
7. Apakah terdaapat hambatan atau kendala dalam melakukan sosialisasi ?
8. Bagaimana cara mengatasi hambatan atau kendala tersebut?

9. Apa yang dilakukan pemerintah desa siswo bangun ini agar kebijakan padat karya tunai desa ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan?
10. Berapa jumlah sumber daya manusia atau pekerja yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan padat karya tunai desa ini ?
11. Bagaimana kemampuan dari implementor dalam pelaksanaan kebijakan ?
12. Apakah terdapat pelatihan-pelatihan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan ini?
13. Darimana sumber anggaran pelaksanaan kebijakan PKTD ini berasal?
14. Bagaimana pemanfaatan dana finansial tersebut dalam pelaksanaan kebijakan PKTD ?
15. Apakah anggaran tersebut mencukupi dalam pelaksanaan kebijakan PKTD ini?
16. Apakah pemerintah daerah mendukung sepenuhnya dalam pelaksanaan kebijakan PKTD ini ?
17. Bagaimana komitmen pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan PKTD?
18. Bagaimana pengawasan dan pengendalian kebijakan PKTD?
19. Apakah terdapat hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan PKTD ini?
20. Apakah keberediaan kebijakan PKTD ini dapat mengurangi pengangguran di desa ini?

Masyarakat

1. Bagaimana tanggapan saudara tentang adanya kebijakan PKTD ini ?

2. Bagaimana tahapan kerjasamanya apa saja kesepakatannya ?
3. Apakah pemerintah desa pernah menginformasikan atau menjelaskan tentang kebijakan PKTD ini?
4. Apakah ada sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa terkait program kebijakan PKTD ini?
5. Bagaiman komunikasi antar pemerintah desa dengan masyarakat tentang PKTD ini?
6. Menurut saudara apakah pengelolaan kebijakan PKTD ini sudah sesuai dengan semestinya?
7. Menurut anda apakah pembagian hasil dalam kebijakan PKTD ini sudah adil ?
8. Apakah keberadaan kebijakan PKTD ini dapat meningkatkan pendapat bagi pekerja nya?
9. Menurut saudara apakah kebijaakan PKTD ini dapat mengurangi pengangguran ?



Lampiran Dokumentasi









Surat plagiat



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Dedy Sutrisno, Sekeloa I, Bandar Lampung 35121
Telp: (021) 700067, 740211 Fax: 700422 Website: www.uinradenintan.la

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-1334 /Un.L6 / P1 /KT/VII/ 2023

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
NIP : 197308291990031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menyatakan Bahwa Sertipi Dengan Judul :

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PADAT KARYA TUNAI DESA (PKTD)
DALAM MENGURANGI PENGANGGURAN DI DESA SISWO BANGUN
DITINJAU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Karya :

NAMA	NPM	FAK/PRODI
FITRIA MAULINA	1951010353	FEBI/ ES

Bebas Plagiasi dengan hasil pemertiksaan kemiripan sebesar 18 % dan dinyatakan **Lulus** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 11 Juli 2023

Kepala Pusat Perpustakaan

Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
NIP: 197308291990031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Sertipi untuk Salah Satu Syarat Penerimaan di Pusat Perpustakaan.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PADAT KARYA TUNAI DESA (PKTD)
DALAM MENGURANGI PENGANGGURAN DI DESA SISWO
BANGUN DITINJAU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

17%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Brookdale Community College Student Paper	2%
2	Submitted to Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Student Paper	1%
3	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	1%
4	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1%
5	Submitted to Sultan Agung Islamic University Student Paper	1%
6	Submitted to Universitas Pendidikan Ganesha Student Paper	1%
7	Ari Setyawan, I Wayan Suparta, Nelli Aida. "GLOBALISASI EKONOMI DAN PENGANGGURAN: STUDI KASUS INDONESIA", Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan, 2021 Publication	1%
8	Submitted to University of Arkansas Student Paper	1%
9	Submitted to Universitas Hang Tuah Surabaya Student Paper	1%
10	Submitted to Universitas Krisnadwipayana - Faculty of Administration Student Paper	1%

11	Submitted to UIN Walisongo Student Paper	1 %
12	Submitted to Binus University International Student Paper	1 %
13	Submitted to Universitas Maritim Raja Ali Haji Student Paper	1 %
14	Submitted to IAIN Bukit Tinggi Student Paper	<1 %
15	Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Student Paper	<1 %
16	Submitted to Konsorsium PTS Indonesia - Small Campus Student Paper	<1 %
17	Submitted to Ho Chi Minh University of Technology and Education Student Paper	<1 %
18	Submitted to Universiti Teknologi MARA Student Paper	<1 %
19	Submitted to Lambung Mangkurat University Student Paper	<1 %
20	Nisya Agniya Rahmah, Laras Pratiwi, Gista Rismayani. "ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA SINDANGKASIH DI ERA PANDEMI COVID-19", JURNAL EKONOMI PERJUANGAN, 2021 Publication	<1 %
21	Roy Irawan, Muh Sarkowi, Dikpride Despa. "Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten	<1 %

Tulang Bawang", Seminar Nasional Insinyur
Profesional (SNIP), 2022

Publication

22 Submitted to University of Melbourne <1 %
Student Paper

23 Submitted to IAIN Ambon <1 %
Student Paper

24 Submitted to LL Dikti IX Turnitin Consortium <1 %
Student Paper

25 Joko Setyoko, M. Kuris Kuris, Syamsurizal
Syamsurizal, Syamsurijal Tan. "Pemerintah
Provinsi Jambi: Peningkatan Pendapatan
Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Dan
Roda Empat", Jurnal Politik dan Pemerintahan
Daerah, 2022 <1 %
Publication

26 Submitted to Universitas Khairun <1 %
Student Paper

27 Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta <1 %
Student Paper

28 Submitted to Institut Agama Islam Negeri
Curup <1 %
Student Paper

29 Submitted to Syntax Corporation <1 %
Student Paper

30 Submitted to Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam Kementerian Agama <1 %
Student Paper

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches = 5 words

